

Dr. Nasruddin Djoko Surjono, S.IP, S.T, M.SE, MBA.



MENJAGA INGATAN KOTA

Strategi Manajemen Kearsipan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya buku berjudul *“Menjaga Ingatan Kota: Strategi Manajemen Kearsipan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”* dapat disusun. Buku ini hadir sebagai upaya untuk mendokumentasikan perjalanan dan praktik pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekaligus menyajikan refleksi tentang arti penting arsip bagi masyarakat luas.

Sebagaimana kita ketahui, arsip bukan hanya kumpulan dokumen yang tersimpan di lemari. Arsip adalah saksi bisu perjalanan kota, alat pertanggungjawaban pemerintahan, serta warisan sejarah yang tak ternilai. Melalui arsip, kita dapat menelusuri dinamika Jakarta, memahami keputusan-keputusan penting, dan menjaga identitas budaya yang menjadi kebanggaan bersama.

Kami menyadari bahwa pengelolaan arsip di Jakarta menghadapi banyak tantangan: dari penumpukan dokumen fisik, keterbatasan sarana, hingga tuntutan digitalisasi. Namun, melalui terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kearsipan, Jakarta telah melangkah maju dengan menata sistem kearsipan yang lebih terpadu, modern, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, atas dukungan penuh dan arahan strategisnya, Kepala Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan, Ibu Fitri, yang telah memberikan bimbingan serta masukan substantif. Kepala Bidang Teknologi Informasi, Bapak Imam MulatiP dan Bapak Ali Imron, yang telah mendukung dari sisi infrastruktur digital dan sistem informasi, serta seluruh pihak yang tidak dapat

kami sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi berharga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik, bagi mahasiswa, peneliti, dan dosen di bidang administrasi publik, ilmu informasi, dan Sejarah juga menjadi panduan praktis, bagi aparatur pemerintah daerah lain yang ingin belajar dari pengalaman Jakarta serta inspirasi publik, bagi masyarakat yang ingin memahami arti penting arsip sebagai bagian dari memori kolektif bangsa.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat luas, dan menjadi pijakan untuk membangun budaya tertib arsip yang lebih baik di Indonesia.

Jakarta, 2025

Dr. Nasruddin Djoko Surjono, S.IP, S.T, MSE, MBA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jakarta sebagai ibu kota negara bukan hanya tumpukan beton, jalan, dan lalu lintas; kota ini menyimpan lapisan-lapisan kehidupan yang terekam dalam bentuk dokumen, peta, foto, surat keputusan, arsip institusional, dan catatan personal yang membentuk memori kolektif kota. Arsip, baik yang tersimpan rapi di gudang arsip dinas maupun yang terjaga di lemari keluarga adalah sumber utama untuk memahami bagaimana identitas kota terbentuk, bagaimana kebijakan lahir, dan bagaimana ingatan sosial bertahan atau lenyap. Posisi arsip dalam tata kelola pemerintahan modern sejalan dengan prinsip yang dituangkan dalam Undang-Undang Kearsipan No. 43 Tahun 2009: arsip berfungsi sebagai tulang punggung administrasi negara, sebagai memori kolektif bangsa, dan sebagai alat akuntabilitas publik. (UU No. 43 Tahun 2009).

Pembacaan terhadap arsip Jakarta menawarkan dua keuntungan sekaligus: pertama, arsip memberi akses ke data faktual seperti dokumen resmi, peta tata guna lahan, keputusan gubernur yang membantu penelusuran kronologis dan rekonstruksi peristiwa; kedua, arsip memberi petunjuk kualitatif tentang tindakan dan nilai yang dominan pada masa tertentu, misalnya kata yang dipilih dalam kebijakan, foto-foto publik, bahkan absennya dokumen tertentu yang menjadi tanda sensor atau pengabaian. Dalam konteks ini, pengelolaan kearsipan menjadi tindakan politik dan budaya: bagaimana dokumen diklasifikasikan,

yang disimpan atau dimusnahkan, serta bagaimana akses diberikan kepada publik akan membentuk narasi sejarah yang dapat diakses generasi mendatang. Pernyataan fungsi dan prinsip pengelolaan ini juga diatur dan diurus oleh lembaga pembina nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang bertugas menyusun norma dan memberikan bimbingan teknis kepada pengelola arsip daerah.

Di tingkat provinsi, Dispusip DKI Jakarta menjalankan peran penting sebagai pengelola arsip, sekaligus mediator antara arsip institusional dan kebutuhan publik. Dalam beberapa tahun terakhir Dispusip DKI menempatkan penguatan layanan kearsipan sebagai bagian dari strategi kelembagaan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan strategis 2023–2026 yang menekankan digitalisasi, integrasi layanan, dan peningkatan akses publik. Salah satu contoh upaya teknis nyata adalah implementasi aplikasi internal bernama *Arjuna*, yang dirancang untuk mempermudah manajemen arsip elektronik dan integrasinya dengan sistem pemerintahan elektronik (e-Office), langkah yang dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2021. Inisiatif seperti ini menunjukkan bagaimana pengelolaan arsip di Jakarta bergerak dari model fisik-manual ke model hybrid/digital yang memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan layanan publik lebih cepat serta terdokumentasi.

Namun, transformasi teknis tidak serta merta menghapus tantangan klasik kearsipan. Studi-studi lapangan tentang manajemen kearsipan di instansi daerah menunjukkan kendala terkait sumber daya manusia, prosedur penyusutan, kualitas klasifikasi, sampai masalah fasilitas penyimpanan dan konservasi arsip statis. Di banyak kasus, layanan arsip statis masih menghadapi

kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan kapasitas layanan. Temuan empiris semacam ini relevan untuk memahami dinamika di Dispusip DKI, karena tantangan teknis dan sumber daya manusia mempengaruhi bagaimana arsip dipilih, dipelihara, dan dibuka untuk penelitian atau layanan publik.

Di samping pengelolaan arsip institusional, Dispusip DKI juga aktif mengembangkan program layanan yang menjangkau masyarakat secara langsung, misalnya Layanan Arsip Keluarga (LASIGA) dan program penyelamatan arsip daerah atau koleksi personal. Konsep layanan arsip keluarga mengakui bahwa banyak serpihan memori warga seperti akta, surat keluarga, foto lama, berpotensi menjadi sumber sejarah lokal bila didokumentasikan, direstorasi, dan diinventarisasi. Kerja sama antarlembaga, termasuk koordinasi dengan ANRI untuk restorasi dan pedoman teknis, memperlihatkan pendekatan *multi-tier* yang menghubungkan kapasitas nasional dan kebutuhan lokal. Program-program ini tidak hanya melestarikan materi fisik, tetapi juga merekonstruksi narasi kolektif yang selama ini tersebar dalam rumah tangga dan komunitas.

Menghubungkan arsip dan identitas kota juga berarti memperhatikan bagaimana kebijakan terdahulu membentuk ruang fisik dan sosial Jakarta: kebijakan tata ruang, pengaturan permukiman, nama-nama jalan, serta keputusan administratif lain tercatat dalam arsip pemerintahan provinsi dan kota/kabupaten yang kini menjadi sumber untuk menelaah proses urbanisasi, relokasi, dan transformasi identitas. Misalnya, keputusan-keputusan perizinan dan dokumentasi proyek infrastruktur menyimpan jejak kebijakan yang berkaitan dengan migrasi internal, penggusuran kampung, dan perubahan ekonomi lokal. Oleh karena itu, arsip bukan

sekadar gudang dokumen; ia adalah alat analitis untuk menautkan kebijakan masa lalu dengan realitas sosial kontemporer. Pernyataan ini berakar pada prinsip keautentikan dan keterpercayaan yang ditegaskan oleh regulasi kearsipan nasional. (UU No. 43 Tahun 2009).

Selain peran administratif dan penelitian, arsip juga menjadi arena pengakuan prestasi kolektif: penghargaan, sertifikat, dan dokumen yang menunjukkan proses capaian birokrasi atau komunitas lokal. Semuanya membantu mengkonstruksi identitas institusional yang ingin dipertahankan. Dispusip DKI dalam beberapa kebijakan kerja juga menempatkan pengelolaan arsip statis dan layanan arsip sebagai alat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, misalnya melalui alur permohonan arsip statis yang dirancang agar publik dapat mengakses dokumen tertentu secara terstruktur. (Layanan Arsip Statis Dispusip DKI).

Transformasi digital nasional, yang ditopang oleh pengembangan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN) oleh ANRI dan dorongan pemerintah untuk digitalisasi arsip, membuka peluang baru sekaligus menuntut perhatian serius terhadap preservasi digital, inter-operabilitas metadata, dan perlindungan integritas arsip elektronik. Kebijakan digital ini memudahkan akselerasi akses publik, misalnya untuk peneliti, jurnalis, dan masyarakat umum namun sekaligus menimbulkan persoalan teknis seperti standar format, jangka waktu preservasi digital, dan ketahanan terhadap perubahan teknologi. Upaya integrasi aplikasi lokal (seperti Arjuna) dengan jaringan nasional adalah salah satu jawaban praktis dari tantangan itu; namun keberhasilan integrasi tersebut akan bergantung pada kepatuhan terhadap standar, kapasitas SDM, dan komitmen pembiayaan jangka panjang.

Buku ini hadir untuk menawarkan peta konseptual dan empiris tentang pengelolaan arsip di Jakarta: bagaimana kebijakan nasional dan lembaga pembina (ANRI) bertaut dengan praktik pengelolaan di tingkat provinsi; bagaimana program-program Dispusip DKI merefleksikan upaya modernisasi; serta bagaimana tantangan teknis dan kelembagaan mempengaruhi pelestarian memori kota. Dengan menggabungkan kajian kebijakan, kajian kasus program, dan refleksi atas arsip sebagai sumber identitas, buku ini bertujuan menjadi sumber yang relevan bagi pembuat kebijakan, pengelola arsip, peneliti sejarah perkotaan, dan warga Jakarta yang ingin memahami jejak kolektif mereka. Untuk kejelasan rujukan, berdasarkan kerangka hukum dan praktik yang ada, sebagian besar argumen dalam bab-bab berikut didukung oleh dokumen perundang-undangan, dokumen strategis Dispusip DKI, publikasi ANRI, serta studi empiris yang menelaah manajemen kearsipan di tingkat daerah.

Akhirnya, penting untuk menegaskan bahwa pengelolaan arsip adalah proses dinamis, ia membutuhkan kesabaran administratif, komitmen politik, kecakapan teknis, dan partisipasi publik. Di kota besar seperti Jakarta, di mana pergantian kebijakan dan pembangunan berlangsung cepat, usaha menyelamatkan, mengorganisasi, dan membuka arsip adalah bagian dari upaya menjaga kontinuitas memori sosial. Melalui buku ini, pembaca diajak menelusuri jejak-jejak itu: bukan sekadar sebagai catatan lama yang kaku, tetapi sebagai bahan hidup yang memungkinkan dialog antara masa lalu, masa kini, dan masa depan Jakarta, bagaikan sebuah dialog yang dipengaruhi secara nyata oleh program-program dan kebijakan yang dijalankan oleh Dispusip DKI dan institusi pembina nasional. Dengan pendekatan ini, bab-bab selanjutnya akan menguraikan arsip sebagai memori

kolektif, mengkaji jejak sejarah Jakarta yang tersimpan dalam arsip, menelaah konstruksi identitas kota melalui dokumen, memetakan transformasi kearsipan lokal, menilai capaian dan pengakuan, serta menawarkan arah kebijakan untuk masa depan kearsipan Jakarta.

1.2. Permasalahan dan Tantangan Kearsipan di Kota Besar

Permasalahan dan tantangan kearsipan di kota besar tidak sekadar soal tumpukan kertas lama yang menunggu di rak: ia berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, identitas sosial, akuntabilitas publik, dan daya tahan memori kolektif di tengah percepatan urbanisasi. Jakarta, sebagai megapolitan yang menjadi pusat administrasi, ekonomi, dan budaya, menghadapi kompleksitas pengelolaan arsip yang berbeda secara kuantitatif dan kualitatif dibanding wilayah lain. Kompleksitas ini muncul dari volume besar dokumen yang dihasilkan setiap hari oleh birokrasi, keberagaman jenis arsip, tekanan ruang fisik, risiko bencana seperti banjir, serta tuntutan digitalisasi yang menuntut standarisasi dan sumber daya teknis. Kompleksitas tersebut bukan hanya tantangan teknis; ia menuntut respons kebijakan terkoordinasi antara lembaga pembina nasional (ANRI) dan pengelola daerah seperti Dispusip DKI.

Tantangan pertama adalah **volume dan heterogenitas arsip**. Pemerintahan provinsi, sektor swasta, hingga lembaga sosial dan organisasi masyarakat menghasilkan ragam dokumen: naskah dinas, peta, foto, kontrak, bukti kepemilikan tanah, hingga rekaman audio-visual. Proses produksi dokumen yang tinggi menuntut sistem klasifikasi, retensi, dan penyusutan yang efisien untuk mencegah *backlog* arsip aktif yang kemudian menjadi arsip statis tanpa proses seleksi yang baik.

Kegagalan mengelola alur ini menyebabkan akumulasi dokumen di unit pengolah, memperbesar risiko kerusakan dan hilangnya jejak administratif. Di tingkat kebijakan nasional, UU Kearsipan menegaskan tata urut pengelolaan arsip sebagai bagian dari sistem kearsipan nasional; namun implementasi teknis di level daerah seringkali terhambat oleh kapasitas SDM dan infrastruktur.

Kedua, **kekurangan kapasitas sumber daya manusia dan teknis** menjadi hambatan nyata. Pengelolaan arsip modern memerlukan tenaga terlatih dalam klasifikasi, konservasi, digitalisasi, dan manajemen metadata. Banyak instansi pemerintah daerah masih bergantung pada prosedur manual atau tenaga dengan pelatihan terbatas, sehingga proses inventarisasi dan alih media berlangsung lambat serta rentan kesalahan. Kajian transformasi kearsipan dari analog ke digital yang dipublikasikan ANRI menegaskan bahwa ketidaksiapan SDM dan kelembagaan sering menjadi penghambat utama dalam integrasi sistem kearsipan lintas instansi. Upaya pelatihan dan pendampingan teknis oleh ANRI, serta program pengembangan kapasitas dalam Renstra Dispusip DKI, menjadi jawaban tetapi perlu konsistensi jangka panjang.

Ketiga, **tantangan digitalisasi dan preservasi arsip elektronik** menghadirkan persoalan baru: bukan hanya bagaimana mengubah kertas menjadi file digital, tetapi bagaimana menjaga keautentikan, integritas, dan keterbacaan jangka panjang berkas elektronik. ANRI mengembangkan Sistem/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN/JIKN) sebagai infrastruktur untuk integrasi layanan nasional, tetapi implementasi lokal menuntut interoperabilitas format, kebijakan metadata yang konsisten, serta pendanaan untuk server dan backup jangka panjang. Dispusip DKI telah meluncurkan aplikasi

e-arsip bernama ARJUNA untuk mendukung manajemen arsip dinamis dan integrasi e-Office; langkah ini penting namun juga menuntut standar teknis dan harmonisasi dengan SIKN/JIKN agar data tidak menjadi silo terisolasi.



Contoh digitalisasi terhadap arsip era Pemerintahan Kota Batavia

Keempat, **kerentanan fisik terhadap bencana perkotaan** seperti banjir dan kebakaran adalah problem nyata yang mempengaruhi arsip keluarga dan institusional. Jakarta secara periodik menghadapi banjir yang dapat merusak arsip kertas berharga di kantor pemerintah maupun dokumen pribadi warga. Merespon hal ini, Dispusip DKI mengembangkan layanan penyelamatan dan restorasi arsip keluarga, dikenal sebagai Layanan Arsip Keluarga (LASIGA) yang melakukan sosialisasi, restorasi, dan alih media untuk dokumen penting warga. Program semacam LASIGA menunjukkan upaya adaptif pemerintah daerah untuk memperluas tanggung jawab kearsipan ke ranah komunitas, tetapi upaya ini membutuhkan jangkauan yang lebih luas untuk menjangkau kelompok rentan dan kawasan rawan bencana.

Kelima, **masalah fasilitas fisik dan konservasi:** depot arsip yang tidak memenuhi standar kelembaban, suhu, dan keamanan akan mempercepat kerusakan arsip kertas dan foto. Di kota besar dengan harga tanah tinggi, penyediaan ruang penyimpanan arsip permanen yang aman menjadi tantangan anggaran dan perencanaan. Selain itu, proses konservasi yang mahal (restorasi fisik, enkapsulasi, deasidifikasi) memerlukan prioritas koleksi dan alokasi sumber daya, sebuah keputusan yang terkadang dipengaruhi oleh politik anggaran dan persepsi publik terhadap nilai arsip. Kebijakan pusat memberi pedoman, namun implementasi fasilitas konservasi tetap bergantung pada kapasitas daerah.

Keenam, **aksesibilitas publik dan transparansi** seringkali menjadi titik tarik sekaligus titik gesek. Arsip berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan memori publik: akses yang baik memperkuat transparansi pemerintahan dan penelitian sejarah, sementara akses yang tertutup mengaburkan rekam jejak kebijakan. Dispusip DKI mengembangkan kebijakan layanan arsip statis dan alur permohonan agar dokumen tertentu dapat diakses publik. Namun praktik di lapangan masih menemui hambatan prosedural, sumber daya untuk layanan, serta ketidaksadaran warga akan pentingnya arsip keluarga yang dapat menjadi sumber sejarah lokal. Integrasi ke portal nasional melalui JIKN diharapkan meningkatkan keterbukaan, tetapi proses harmonisasi regulasi dan proteksi data pribadi tetap harus dielaborasi.

Ketujuh, **koordinasi lintas lembaga dan fragmentasi administrasi** menjadi masalah birokratis yang nyata. Arsip yang relevan untuk sejarah kota sering kali tersebar di berbagai unit: pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kementerian, institusi pendidikan, BUMN, hingga koleksi pribadi. Ketiadaan mekanisme koordinasi

yang efektif menyebabkan duplikasi, kehilangan konteks, atau bahkan pemusnahan dokumen yang seharusnya disimpan. ANRI berperan sebagai otoritas pembina yang mendorong integrasi melalui SIKN/JIKN dan regulasi, sedangkan peran Dispusip DKI adalah mengimplementasikan mekanisme lokal yang menghubungkan arsip institusional dan masyarakat. Kinerja kedua institusi, baik nasional dan daerah, menentukan apakah arsip yang bernilai kolektif dapat terselamatkan.

Kedelapan, **pendanaan jangka panjang dan keberlanjutan program** seringkali menjadi batu sandungan. Digitalisasi yang masif, pembangunan gudang arsip yang layak, dan program restorasi memerlukan anggaran yang konsisten. Proyek satu kali membantu, tetapi tanpa alokasi berkelanjutan, hasil digitalisasi dan konservasi rentan tidak terpelihara. Rencana strategis Dispusip DKI menempatkan penguatan layanan dan digitalisasi sebagai prioritas, namun keberhasilan jangka panjang tergantung pada komitmen pendanaan dari pemerintah daerah dan dukungan pusat. Pendanaan juga harus diarahkan pada pembinaan SDM dan pemeliharaan infrastruktur digital agar investasi tidak sia-sia.

Akhirnya, ada tantangan **sosiokultural dan pendidikan publik**: kesadaran masyarakat terhadap nilai arsip seringkali rendah; banyak warga belum mempraktikkan pengelolaan arsip keluarga sederhana (penyimpanan aman, alih media). Dispusip DKI melalui program LASIGA dan sosialisasi berupaya membangun literasi arsip warga—suatu langkah penting untuk menjadikan arsip sebagai bagian dari praktik keseharian warga kota besar. Pendidikan publik tentang arsip juga memperluas basis partisipasi dalam pelestarian warisan lokal dan membantu mencegah akumulasi arsip rumah tangga yang rentan hilang karena bencana atau migrasi.

Menghadapi tantangan tersebut, solusi harus bersifat multiguna, memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis dari ANRI; mempercepat harmonisasi teknis antara aplikasi lokal (mis. ARJUNA) dan SIKN/JIKN untuk interoperabilitas; memperluas layanan restorasi dan alih media yang menjangkau komunitas rentan; meningkatkan investasi infrastruktur gudang arsip yang memenuhi standar konservasi; serta membangun mekanisme pendanaan jangka panjang yang menggabungkan anggaran daerah, dukungan pusat, dan potensi kerjasama dengan sektor swasta atau donor untuk proyek-proyek khusus. Kerangka hukum seperti UU No. 43/2009 memberikan landasan normatif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas implementasi di level daerah. Oleh karena itu koordinasi antara ANRI dan Dispusip DKI bukan pilihan, melainkan kebutuhan strategis.

Secara ringkas, permasalahan kearsipan di kota besar seperti Jakarta bersifat multidimensional: teknis, kelembagaan, fiskal, ekologis, dan budaya. Upaya mengatasi hambatan ini memerlukan sinergi kebijakan nasional dan program lokal yang pragmatis, berkelanjutan, dan bersifat partisipatif. Dispusip DKI telah menunjukkan inisiatif penting seperti ARJUNA dan LASIGA yang diharapkan menjawab aspek teknis dan sosial; tugas ke depan adalah memperkuat implementasi, memperluas jangkauan, dan memastikan kesinambungan sehingga arsip tidak sekadar terpelihara sebagai benda mati, tetapi menjadi sumber hidup untuk memahami jejak, identitas, dan arah transformasi Jakarta.

1.3. Pengelolaan Arsip di Kota Jakarta

Secara nasional, pengelolaan arsip Indonesia telah menempuh perjalanan transformatif sejak era pasca-Reformasi 1998. Pergeseran paradigma yang paling menonjol tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menegaskan bahwa arsip bukan sekadar bukti administratif pemerintahan, melainkan rekaman memori kolektif bangsa yang harus dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan publik. Di bawah kerangka hukum itu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengambil peran sentral sebagai institusi pembina yang merumuskan kebijakan, norma, standar, dan prosedur kearsipan nasional, sekaligus memegang mandat menyimpan arsip-arsip statis berskala nasional termasuk warisan masa kolonial yang memiliki nilai tak ternilai.

Dalam konteks daerah, tanggung jawab pengelolaan arsip di DKI Jakarta berhadapan dengan dinamika ganda: sebagai ibu kota negara dan sebagai daerah otonom, Jakarta memiliki kebutuhan dokumenter yang khas dan intensitas produksi arsip yang tinggi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispuspip) DKI Jakarta menjadi ujung tombak perlindungan dan pemanfaatan arsip-arsip kota. Hubungan antara ANRI dan Dispuspip DKI menampilkan simbiosis antara otoritas nasional dan pelaksana daerah; meskipun ANRI membina secara teknis, Dispuspip diberi ruang otonomi untuk merancang program dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik Jakarta. ANRI memelihara arsip makro yang membingkai sejarah bangsa, sementara Dispuspip merekam detail-detail keseharian pemerintahan kota, dinamika sosial, dan perkembangan fisik serta budaya yang menandai transformasi urban Jakarta. Kolaborasi keduanya — dalam penyelamatan arsip, pameran bersama, dan alih media digital — menjadi jaminan kesinambungan memori,

dari catatan administratif hingga cerita-cerita publik yang membentuk identitas kota.

Jakarta menghadapi tantangan khas dalam pengelolaan arsip. Pertumbuhan kota yang cepat dan tekanan pembangunan kerap membuat ruang menjadi komoditas mahal sehingga nilai arsip mudah terpinggirkan. Risiko hilang atau rusaknya arsip akibat banjir, kelembaban, atau kelalaian meningkatkan urgensi tindakan pelestarian. Di sinilah peran Dispusip menjadi vital melalui program-program konservasi fisik, alih media digital, dan upaya peningkatan kapabilitas produsen arsip di setiap unit pemerintahan. Inisiatif seperti layanan bagi arsip keluarga dan sosialisasi intensif kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap unit pemerintahan adalah produsen arsip pertama dan pemegang tanggung jawab untuk manajemen naskah dinasnya.

Pemahaman terhadap kategori dan siklus hidup arsip juga penting dalam praktik sehari-hari. Peraturan ANRI menjelaskan konsep arsip dinamis sebagai arsip yang digunakan langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan untuk jangka waktu tertentu; pengelolaan arsip dinamis berarti mengendalikan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip secara efisien dan sistematis. Dalam ranah ini terdapat arsip yang bersifat vital bagi kelangsungan operasional pencipta arsip dan tak dapat digantikan jika hilang; arsip yang aktif dengan frekuensi penggunaan tinggi; serta arsip inaktif yang penggunaannya menurun. Untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan bukti hukum, pencipta arsip perlu menyusun tata naskah dinas, klasifikasi arsip yang mencerminkan fungsi dan tugas institusi, jadwal retensi yang berpedoman pada pedoman retensi nasional, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses yang

menyeimbangkan keterbukaan publik dan perlindungan fisik arsip.

Arsip statis, menurut peraturan ANRI, adalah arsip yang telah habis masa retensinya, memiliki nilai kesejarahan, dan ditetapkan untuk dipermanenkan. Pengelolaan arsip statis menuntut penghormatan terhadap prinsip asal usul dan prinsip aturan asli: arsip harus tetap melekat pada konteks penciptaannya dan disusun sesuai pengaturan asli agar konteks informasi tetap terjaga. Untuk memudahkan penemuan kembali, lembaga kearsipan menyusun sarana temu balik seperti daftar arsip statis, inventaris yang memuat riwayat dan struktur arsip, serta panduan koleksi yang menjelaskan khasanah arsip secara tematis. Selain itu, ANRI aktif memfasilitasi pemanfaatan arsip statis melalui penerbitan naskah sumber tematis, pameran konvensional berkala, dan pameran digital yang menghadirkan arsip hari ini bagi publik.

Melindungi wujud fisik arsip membutuhkan strategi preservasi yang terencana. Pedoman preservasi membagi upaya menjadi tindakan preventif untuk mencegah kerusakan dari faktor eksternal maupun internal, dan tindakan kuratif yang meliputi perawatan serta perbaikan dengan menjaga keutuhan informasi. Restorasi menjadi langkah pemulihan bagi arsip yang telah rusak, dengan tujuan mengembalikan kondisi sedekat mungkin ke bentuk aslinya sehingga informasi dapat diselamatkan. Praktik restorasi dapat melibatkan pembersihan dari kotoran dan jamur, proses deasidifikasi untuk menetralkan asam yang merusak kertas, penambalan dan penyambungan bagian yang hilang atau robek, serta metode seperti laminasi dan enkapsulasi untuk memperkuat arsip rapuh. Restorasi arsip digital pun memerlukan keahlian khusus. Namun tidak semua kerusakan dapat diperbaiki; arsip dengan tinta yang luntur, tulisan yang rontok, atau fisik yang hancur secara

parah seringkali tidak mungkin dikembalikan sepenuhnya. Selain itu, arsip vital yang tidak dapat diperbarui menurut undang-undang menuntut perlakuan pencegahan yang ekstra hati-hati karena kehilangan atau kerusakannya bersifat irreversibel.



Salah satu contoh kegiatan Preservasi berupa Deasidifikasi Arsip

Sebagai pelengkap upaya pelestarian tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana penyimpanan yang memadai menjadi fondasi operasional yang tak bisa diabaikan. Fasilitas fisik yang ideal menyediakan ruang penyimpanan terstruktur dengan rak dan sistem compactus yang sesuai, kotak asam-bebas dan bahan pengemas ramah arsip, serta laboratorium konservasi dan ruang kerja restorasi untuk penanganan teknis. Kendali iklim yang stabil—pengaturan suhu dan kelembapan—ditambah sistem pemantauan lingkungan, deteksi dan sistem pemadaman kebakaran yang ramah koleksi (misalnya gas penggantian), serta proteksi terhadap banjir dan hama, merupakan kebutuhan dasar untuk mencegah degradasi

fisik. Di sisi digital, infrastruktur server yang andal, strategi backup berkala termasuk replikasi offsite atau cloud, mekanisme integritas data seperti checksum, dan kebijakan migrasi format jangka panjang menjadi penopang kelestarian arsip elektronik. Keamanan fisik dan digital—kontrol akses, CCTV, serta kebijakan hak akses berbasis peran—harus diseimbangkan dengan prinsip keterbukaan agar arsip tetap dapat diakses oleh publik yang berhak. Perencanaan kapasitas, anggaran pemeliharaan berkelanjutan, dan program pelatihan staf operasional menjamin bahwa prasarana ini berfungsi optimal dan tahan terhadap risiko jangka panjang.



Lemari Roll O'Pack, salah satu sarana penyimpanan arsip

Di era revolusi industri 4.0, tantangan besar beralih pada transformasi digital. Digitalisasi arsip menjadi jawaban atas berbagai keterbatasan kearsipan konvensional: ia menjamin kelestarian fisik, mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan, memfasilitasi penataletakan dan perpindahan arsip, serta meningkatkan aksesibilitas. Praktik digitalisasi harus memenuhi standar alih media yang ketat,

menjamin autentikasi dan preservasi digital melalui mekanisme seperti tanda tangan digital atau watermark, serta didukung metadata yang memadai untuk pencarian dan pengelolaan jangka panjang. Digitalisasi arsip juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan menciptakan tata kelola yang bersih, efektif, dan transparan. Peran lembaga kearsipan, baik nasional maupun daerah, adalah memberikan pedoman teknis dan pengawasan agar tujuan efisiensi, keberlanjutan informasi, aksesibilitas, dan kualitas dapat tercapai.

Lebih dari sekadar dokumen tua dalam lemari, arsip adalah denyut nadi identitas Jakarta. Melalui arsip dapat dilacak perjalanan kota dari pelabuhan Sunda Kelapa menjadi Batavia, lalu berkembang menjadi metropolita modern; tercermin pula cerita tentang kanalisasi Ciliwung, pembangunan perumahan taman di Menteng dan Kebayoran Baru, gelombang migrasi, serta perkembangan kesenian Betawi. Pameran arsip yang digelar ANRI dan Dispusip bukan sekadar hiburan budaya; mereka berperan mengumpulkan kembali memori kolektif yang terfragmentasi oleh kesibukan kota. Buku ini, "Menjaga Ingatan Kota: Strategi Manajemen Kearsipan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta", hadir untuk menelusuri narasi besar tersebut. Menggabungkan pendekatan historis, sosiologis, dan ilmu kearsipan, karya ini akan mengurai bagaimana arsip membentuk dan mencerminkan perjalanan Jakarta, menilai transformasi sistem kearsipan, mengapresiasi capaian yang ada, dan menawarkan pandangan ke arah masa depan digital. Pengelolaan arsip, sebagaimana dijelaskan sepanjang pendahuluan ini, merupakan kerja kolektif yang merawat ingatan; dalam setiap langkah pelestarian, digitalisasi, dan pemanfaatan arsip tersimpan potongan-potongan yang, jika dirangkai, memperlihatkan

wajah sejati sebuah kota yang tidak melupakan jejaknya sendiri.

BAB II

Arsip Sebagai Memori Kolektif Kota

II.1. Konsep Arsip Menurut Pemikiran Dunia

Arsip sejak lama dipahami bukan sekadar tumpukan dokumen, melainkan representasi dari memori kolektif yang membentuk identitas masyarakat. Dalam konteks global, perdebatan mengenai definisi dan fungsi arsip terus berkembang, sejalan dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Pemahaman tentang arsip telah bertransformasi dari sekadar catatan administratif menuju instrumen pembentuk pengetahuan, kekuasaan, dan identitas kolektif (Cook & Schwartz, 2002). Dengan kerangka pemikiran itu, arsip tidak lagi dilihat hanya sebagai bukti kegiatan pemerintahan atau lembaga, melainkan juga sebagai sumber yang dapat mengungkap dinamika sejarah, relasi sosial, dan konstruksi makna di tengah masyarakat.

Salah satu rujukan penting dalam mendefinisikan arsip modern adalah karya Laura Millar, *Archives: Principles and Practices*. Millar menekankan bahwa arsip adalah rekaman yang memiliki nilai untuk dipelihara karena signifikansinya dalam mendokumentasikan aktivitas manusia, baik dalam konteks individu, organisasi, maupun masyarakat (Millar, 2017). Pandangan ini menempatkan arsip sebagai bagian integral dari memori manusia, di mana pengelolaan arsip yang efektif akan menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang otentik dan andal. Dalam konteks kota besar seperti Jakarta, pemahaman Millar menjadi penting, karena tantangan arsip tidak hanya terkait dengan volume dan kompleksitas data, tetapi juga dengan bagaimana arsip tersebut bisa diakses oleh masyarakat sebagai bahan refleksi atas perjalanan kota.

Patricia C. Franks dalam bukunya *Records and Information Management* menambahkan dimensi manajerial yang lebih eksplisit. Ia menekankan pentingnya sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi, baik arsip konvensional maupun elektronik, untuk menjamin kontinuitas organisasi dan perlindungan hak-hak masyarakat (Franks, 2013). Pemikiran ini menjadi relevan di Jakarta, khususnya ketika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta mengembangkan aplikasi *Arjuna* (Arsip Jakarta untuk Semua), yang bertujuan mengintegrasikan pengelolaan arsip digital di lingkungan Pemprov. Penerapan konsep manajemen arsip ala Franks terlihat dalam cara Dispusip mencoba membangun sistem yang tidak hanya menyimpan, tetapi juga memudahkan temu balik informasi, mengurangi risiko kehilangan, serta memastikan akuntabilitas publik.

Selain itu, *Encyclopedia of Archival Science* yang disusun oleh Luciana Duranti dan Patricia Franks memberikan perspektif ensiklopedis mengenai konsep-konsep dasar kearsipan, termasuk terminologi, teori, dan praktik di berbagai negara. Salah satu gagasan penting yang mereka tekankan adalah bahwa arsip merupakan fenomena global yang meskipun memiliki perbedaan tradisi dan praktik, tetap terikat pada prinsip otentisitas, keandalan, dan konteks penciptaannya (Duranti & Franks, 2015). Konsep ini membantu kita memahami bahwa arsip Jakarta, meski lahir dari konteks lokal yang khas, tetap berada dalam lanskap kearsipan dunia yang menuntut standar interoperabilitas, khususnya di era digital.

Terry Cook dan Joan Schwartz dalam karya penting mereka *Archives, Records, and Power* memunculkan dimensi kritis dengan menekankan hubungan erat antara arsip dan kekuasaan. Menurut mereka, arsip bukanlah sekadar kumpulan dokumen netral, melainkan produk dari

pilihan politik, sosial, dan institusional yang menentukan apa yang diingat dan apa yang dilupakan (Cook & Schwartz, 2002). Perspektif ini sangat relevan dalam konteks Jakarta, di mana arsip-arsip tentang pembangunan, peristiwa politik, hingga catatan kehidupan sosial masyarakat sering kali mencerminkan dinamika kekuasaan. Upaya Dispusip dalam mengembangkan program *Layanan Arsip Keluarga (LASIGA)*, misalnya, bisa dibaca sebagai strategi memperluas cakupan memori kolektif kota agar tidak hanya didominasi oleh dokumen resmi pemerintah, tetapi juga mencakup arsip personal dan keluarga sebagai bagian dari sejarah kota.

Dari sisi standar internasional, International Council on Archives (ICA) memberikan fondasi normatif yang mendukung praktik kearsipan global. Melalui *ICA Handbook Series*, lembaga ini menegaskan prinsip-prinsip pengelolaan arsip yang berfokus pada keaslian, integritas, keandalan, dan kemudahan akses (ICA, 2016). Dua instrumen penting lain dari ICA adalah *ISAD(G) Handbook* dan *ISAAR(CPF) Handbook*. *ISAD(G)* (General International Standard Archival Description) memberikan pedoman bagaimana arsip harus dideskripsikan secara hierarkis agar dapat dipahami dan ditelusuri konteks penciptaannya, sedangkan *ISAAR(CPF)* (International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families) mengatur cara mencatat entitas pencipta arsip untuk menjaga keterhubungan informasi (ICA, 2000; ICA, 2004).

Kedua standar ini, meskipun teknis, memiliki dampak penting bagi kota besar seperti Jakarta. Ketika Dispusip DKI Jakarta mengelola arsip statis yang berasal dari berbagai dinas, BUMD, maupun lembaga legislatif daerah, penerapan standar internasional membantu menjaga konsistensi deskripsi dan memudahkan temu balik.

Implementasi prinsip ISAD(G) misalnya, akan menjamin bahwa arsip tentang kebijakan transportasi atau tata ruang kota dapat dipahami secara utuh, termasuk hubungan antar-dokumen, konteks pencipta, dan dampaknya bagi warga. Hal ini memperlihatkan bagaimana standar global bisa diterapkan dalam praktik lokal untuk memperkuat akses masyarakat terhadap memori kolektif kota.

Di sisi lain, perkembangan arsip digital juga menuntut perhatian khusus. ICA melalui *Records in Electronic Environments (ICA-Req)* menekankan prinsip-prinsip dasar dalam memastikan arsip elektronik tetap autentik, dapat dipercaya, dan berkelanjutan meski lingkungan teknologinya berubah (ICA, 2008). Konsep ini sangat relevan dengan situasi di Jakarta, di mana sistem elektronik pemerintahan terus berkembang dan berganti platform. Tantangan terbesar adalah menjamin bahwa arsip digital tidak hanya tersimpan, tetapi juga tetap dapat dibaca dan diverifikasi di masa depan. Implementasi ARJUNA dan upaya integrasinya dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah contoh bagaimana prinsip ICA-Req dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah untuk menghadapi tantangan arsip elektronik.

Mengaitkan semua pemikiran dunia tersebut dengan konteks Jakarta, terlihat bahwa pengelolaan arsip di ibu kota berada pada persimpangan antara tuntutan lokal dan standar global. Jakarta menghadapi realitas unik sebagai kota metropolitan dengan kompleksitas birokrasi, volume arsip yang sangat besar, serta risiko bencana seperti banjir yang dapat mengancam kelestarian arsip fisik. Namun di sisi lain, Jakarta juga menjadi laboratorium bagi inovasi kearsipan di Indonesia, sebagaimana terlihat dalam program digitalisasi, LASIGA, dan keterlibatan publik dalam kegiatan pameran serta edukasi arsip.

Dengan demikian, konsep arsip menurut pemikiran dunia bukan hanya memberikan kerangka teoritis, tetapi juga membuka ruang bagi refleksi kritis terhadap praktik kearsipan di Jakarta. Millar menekankan pentingnya arsip sebagai memori; Franks menyoroti manajemen yang sistematis; Duranti dan Franks menempatkan arsip dalam standar global; Cook dan Schwartz menyingkap dimensi kekuasaan; sementara ICA memberikan instrumen praktis untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan. Semua konsep ini pada akhirnya bermuara pada satu hal: bagaimana arsip dapat berfungsi sebagai memori kolektif yang inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Di Jakarta, implementasi konsep-konsep tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, namun langkah-langkah yang dilakukan Dispusip DKI menunjukkan keseriusan untuk menempatkan arsip bukan sekadar sebagai beban administratif, melainkan sebagai aset pengetahuan kota. Upaya integrasi dengan standar internasional, penerapan teknologi digital, serta pelibatan masyarakat dalam penyelamatan arsip keluarga memperlihatkan bagaimana pemikiran global bisa berpadu dengan kebutuhan lokal. Dengan pendekatan semacam ini, arsip Jakarta bukan hanya catatan birokrasi, tetapi juga narasi hidup yang merekam perjalanan ibu kota dalam lintasan sejarah, identitas, dan transformasi sosialnya.

II.2. Arsip Sebagai Jejak Identitas Kota

Arsip sebagai jejak identitas kota memiliki peran ganda: ia merekam tindakan administratif dan pada saat yang sama menyimpan potongan-potongan kehidupan sosial yang merajut narasi bersama tentang siapa sebuah kota itu. Membaca arsip Jakarta berarti menelaah

lapisan-lapisan rekaman yang berasal dari birokrasi, komunitas, dan rumah tangga yang bila disusun memberi gambaran tentang bagaimana identitas kota itu dibentuk, dipertahankan, atau bahkan dilupakan. Peran arsip sebagai jejak identitas bukan semata soal pengarsipan fisik, melainkan tentang bagaimana rekaman dipilih, dilestarikan, dan diberi akses sehingga mereka dapat bercerita kepada generasi penerus. Pemahaman ini menuntut pendekatan yang memadukan teori memori kolektif dengan praktik kearsipan yang konkret.

Secara teoritis, gagasan bahwa arsip membentuk kemungkinan ingatan dibahas oleh pemikir seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida. Foucault menempatkan arsip sebagai struktur yang memungkinkan munculnya pernyataan sehingga arsip selalu berhubungan dengan kekuasaan yang memilih dan menata kata-kata sejarah. Derrida, di lain pihak, melihat 'demam arsip' sebagai gejala hasrat kolektif untuk menyimpan memori sekaligus instrumen pengendalian masa lalu; ia mengingatkan bahwa proses seleksi, penyimpanan, dan akses arsip selalu menyimpan dimensi etis dan politis. Lensa-lensa ini membantu kita melihat bahwa identitas kota tidak pernah netral: ia terbentuk melalui praktik administratif dan budaya yang merekam sebagian kisah dan mengaburkan sebagian lain.

Dalam praktik kearsipan modern, konsep-konsep teoritis ini diterjemahkan ke dalam strategi teknis seperti appraisal (penilaian nilai arsip) dan records continuum. Terry Cook dan para pengembang paradigma records continuum menekankan bahwa arsip bukan hanya benda akhir; ia adalah proses berkesinambungan antara penciptaan, pengelolaan, dan pelestarian yang harus dirancang untuk keuntungan jangka panjang sebagai alat akuntabilitas, memori, dan bukti hukum sekaligus.

Pendekatan ini penting untuk kota besar seperti Jakarta, di mana laju produksi dokumen sangat tinggi dan sumber daya untuk menyimpan semuanya terbatas. Pilihan apa yang dipertahankan akan membentuk bahan historis yang kelak membentuk identitas urban.

Di era digital, perhatian berpindah pula ke bagaimana arsip elektronik mempertahankan keautentikan dan keterbacaan jangka panjang. Luciana Duranti dan peneliti lainnya menekankan pentingnya diplomatik digital, yakni prosedur teknis dan metadata yang memastikan dokumen elektronik dapat dipercaya sebagai bukti administratif. Untuk Jakarta, transformasi elektronik ini berarti pengembangan sistem yang tidak hanya menyimpan file, tetapi juga metadata yang menjelaskan asal-usul, perubahan, dan hak akses dokumen, sehingga identitas yang disimpulkan dari arsip elektronik tetap dapat dipertanggungjawabkan. Keautentikan digital menjadi lapisan baru dalam pembentukan jejak identitas kota karena semakin banyak aspek administrasi dan kehidupan urban yang terekam secara elektronik.

Pengalaman praktis di Jakarta menunjukkan bagaimana teori-teori tersebut dioperasionalisasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta (Dispusip DKI) mengembangkan aplikasi manajemen arsip elektronik yang disebut ARJUNA untuk mempermudah pengelolaan arsip dinamis dan integrasi dengan sistem kerja pemerintahan elektronik. ARJUNA berperan pada level operasional untuk menstandarisasi proses penciptaan, inventarisasi, dan akses dokumen, sebuah langkah penting agar rekaman administratif dapat diakses secara konsisten dan menjadi bahan yang dapat digunakan untuk menyusun narasi kebijakan kota. Pengembangan dan sosialisasi aplikasi semacam ini menandai upaya konkret dalam

menghadirkan arsip sebagai jejak identitas yang dapat diakses dan diverifikasi.

Sisi lain dari arsip sebagai jejak identitas muncul dari koleksi-koleksi non-institusional: arsip keluarga, komunitas, dan organisasi lokal yang sering kali memuat cerita identitas yang tidak tercatat dalam dokumen resmi. Menanggapi hal ini, Dispusip DKI menjalankan Layanan Arsip Keluarga (LASIGA) yang terdiri dari digitalisasi arsip keluarga yang juga menyelenggarakan sosialisasi tentang pentingnya menyimpan dokumen keluarga. Program seperti LASIGA memperluas ruang kearsipan kota dengan menghadirkan potongan-potongan kehidupan sehari-hari yang membentuk identitas lokal dan memori komunitas. Dengan menjangkau rumah-rumah warga, LASIGA membantu menyelamatkan lapisan sejarah yang rentan terhadap bencana dan migrasi; sekaligus memperkaya bahan bagi penulisan sejarah kota yang lebih inklusif.

Jejak identitas yang ditinggalkan arsip juga bersifat terfragmentasi: dokumen-dokumen terkait satu peristiwa atau ruang sering tersebar di berbagai institusi seperti pemerintah daerah, kementerian, badan usaha milik daerah, dan koleksi personal. Oleh karena itu, inisiatif nasional seperti Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN/SIKN) yang dikelola Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupaya menghubungkan arsip dinamis dan statis di seluruh negeri agar informasi tidak terjebak dalam silo-institusi. Integrasi semacam ini bukan sekadar teknis; ia memungkinkan penelusuran lintas-sumber yang penting untuk merangkai narasi identitas kota secara lebih menyeluruh. Implementasi integrasi lokal ke jaringan nasional menuntut standarisasi metadata dan alur kerja yang konsisten agar potongan-potongan arsip dari berbagai sumber dapat saling melengkapi.

Namun, pembentukan identitas melalui arsip bukan tanpa masalah. Proses seleksi dan konservasi sering dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kapasitas teknis, dan prioritas politik. Keputusan untuk menyimpan atau tidak menyimpan dokumen memainkan peran dalam menegaskan narasi yang mendominasi—misalnya dokumen proyek infrastruktur yang tersimpan baik dibandingkan dokumen yang merekam relokasi komunitas yang mungkin kurang terdokumentasi. Dengan sumber daya terbatas, kebijakan appraisal yang transparan dan berbasis fungsi sangat penting untuk memastikan bahwa arsip yang menyangkut hak publik, pertanggungjawaban kebijakan, dan keberagaman pengalaman warga mendapatkan tempat dalam koleksi. Di sinilah praktik kearsipan profesional harus mengimbangi tekanan administratif dengan tujuan memelihara jejak identitas yang adil dan representatif.

Selain itu, ancaman fisik seperti banjir dan kebakaran serta risiko digital seperti format usang dan kehilangan metadata mengancam kontinuitas jejak identitas. Upaya mitigasi melalui gudang arsip yang memenuhi standar konservasi, program alih media, dan strategi backup digital menjadi bagian integral dari tugas menjaga identitas kolektif. Dispusip DKI, melalui Renstra dan rencana program, menempatkan digitalisasi, konservasi, dan layanan masyarakat sebagai pilar untuk menjaga keamanan arsip dan memperluas akses publik. Kebijakan ini penting agar identitas yang tersimpan tetap dapat diakses di masa depan.

Keterlibatan warga dan komunitas adalah elemen penentu agar arsip tidak menjadi monolog institusional. Program LASIGA menunjukkan bahwa edukasi dan layanan praktis kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pelestarian

dokumen keluarga. Partisipasi semacam ini juga memperkaya koleksi publik jika ada mekanisme akuisisi sukarela atau kolaborasi komunitas-institusi yang memfasilitasi salinan digital atau deposit arsip keluarga yang relevan bagi kepentingan publik. Dalam kerangka demokrasi kota, memperbesar ruang partisipasi warga dalam kearsipan adalah langkah penting agar identitas kota tercatat dalam pluralitas suara.

Akhirnya, melihat arsip sebagai jejak identitas kota menuntut kebijakan yang menggabungkan aspek teknis, etis, dan partisipatif: standar metadata dan diplomatik digital untuk menjamin keautentikan; appraisal yang transparan untuk memastikan representasi; fasilitas konservasi dan strategi mitigasi risiko untuk mempertahankan kontinuitas; serta program pemberdayaan publik untuk memperluas spektrum suara yang terekam. Integrasi inisiatif lokal seperti ARJUNA dan LASIGA dengan jaringan nasional JIKN/SIKN serta dukungan pembinaan dari ANRI menjadi kunci untuk menyusun arsip Jakarta menjadi koleksi yang mampu merefleksikan kompleksitas identitas kota. Dengan demikian, arsip tidak lagi hanya gudang dokumen, melainkan laboratorium publik untuk memahami siapa Jakarta telah, sedang, dan ingin menjadi.

II.3. Arsip dan Pembentukan Memori Sosial

Arsip dan pembentukan memori sosial saling terikat: arsip tidak hanya menyimpan catatan administratif, melainkan juga menjadi bahan mentah bagi ingatan kolektif sebuah komunitas, termasuk kota besar seperti Jakarta. Memori sosial terbentuk ketika kelompok manusia memilih untuk mengingat atau melupakan; proses seleksi itu seringkali dimediasi oleh arsip untuk menentukan apa yang disimpan, bagaimana disimpan, siapa yang mendapat

akses yang akhirnya memengaruhi citra bersama tentang masa lalu, identitas, dan arah masa depan. Untuk memahami hubungan ini secara utuh, penting menautkan teori memori kolektif dengan praktik kearsipan kontemporer, termasuk program-program yang dijalankan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta (Dispusip DKI).

Secara teoretis, gagasan memori kolektif dimulai dari Maurice Halbwachs yang menyatakan bahwa memori manusia berfungsi dalam konteks kolektif: ingatan individu selalu direkonstruksi melalui kerangka sosialnya, sehingga kenangan bersama adalah hasil interaksi sosial, bukan sekadar akumulasi memori personal. Halbwachs menegaskan bahwa kelompok sosial memiliki cara khas untuk memilih, menata, dan meneruskan ingatan. Praktik ini lahir dan dipertegas oleh berbagai institusi, termasuk arsip. Dalam ranah budaya yang lebih luas, Jan Assmann membedakan antara memori komunikatif dan memori kultural, menekankan peran institusi (seperti arsip, ritual, dan monumen) dalam menstabilisasi memori jangka panjang yang membentuk identitas budaya. Konsep-konsep ini membantu kita melihat arsip bukan sekadar gudang dokumen, tetapi sebagai mekanisme yang menyusun struktur memori bersama.

Pierre Nora melengkapi wacana ini dengan konsep *lieux de mémoire* (tempat memori”) yang menandai transisi dari memori yang hidup dalam lingkungan sosial (*milieu de mémoire*) ke ingatan yang diinstitusionalisasikan dalam artefak, arsip, pompa peringatan, dan ritual. Arsip adalah salah satu bentuk *lieu de mémoire*: ia menampung jejak-jejak yang, karena perubahan sosial dan hilangnya praktik tradisional, menjadi tumpuan bagi ingatan kolektif yang ingin dipertahankan. Dalam konteks perkotaan, arsip

bertindak sebagai “tempat” di mana jejak kejadian, kebijakan, dan kehidupan masyarakat direkonsiliasi, dipertanyakan, dan dipelajari kembali oleh berbagai aktor seperti peneliti, pembuat kebijakan, komunitas lokal, dan warga biasa.

Bagaimana arsip membentuk memori sosial dalam praktik? Ada beberapa mekanisme. Pertama, melalui proses seleksi (*appraisal*), yaitu keputusan profesional atau administratif mengenai dokumen mana yang layak disimpan untuk jangka panjang. Terry Cook dan praktik *macro-appraisal* menegaskan bahwa *appraisal* adalah tindakan nilai: apa pun yang dipilih untuk disimpan akan kemungkinan besar memengaruhi cara generasi berikutnya memahami masa lalu. Dengan sumber daya terbatas, pilihan ini tidak bisa semata-mata teknis; ia mengandung implikasi etis dan politik. Jika dokumen-dokumen yang merekam kebijakan publik, relokasi komunitas, atau pengalaman minoritas tidak diarsipkan, maka narasi sejarah kota akan timpang. Oleh karena itu praktik *appraisal* yang transparan dan berbasis fungsi diperlukan agar memori yang dipelihara bersifat representatif dan akuntabel.

Kedua, arsip sebagai infrastruktur teknis: di era digital, rekaman administratif dan publik banyak bertransformasi menjadi format elektronik. Luciana Duranti dan ilmuwan lain di bidang *digital diplomacy* menyorot pentingnya menjaga keautentikan, *provenance*, dan metadata yang andal untuk memastikan rekaman digital dapat dijadikan bukti yang sah di masa depan. Tanpa metadata yang tepat dan kebijakan preservasi digital yang konsisten, catatan elektronik rawan kehilangan konteks atau menjadi tidak dapat dipercaya—suatu kondisi yang merongrong fungsi arsip sebagai pilar memori kolektif. Bagi kota besar yang melakukan transisi ke sistem e-office,

perencanaan teknis terhadap preservasi digital menjadi hal krusial agar memori administratif tetap utuh.

Ketiga, arsip komunitas dan arsip keluarga menjadi sumber memori sosial yang melampaui dokumen resmi. Di banyak kota, pengalaman warga biasa seperti surat, foto keluarga, koleksi acara komunitas mengandung kisah-kisah yang tidak tertangkap dalam arsip pemerintahan. Pendekatan *community archives* menempatkan warga sebagai agen pelestarian sehingga memori yang terekam lebih plural dan inklusif. Di Jakarta, Dispusip DKI telah menerjemahkan gagasan ini ke dalam program Layanan Arsip Keluarga (LASIGA): layanan yang menyelenggarakan sosialisasi, restorasi, dan alih media untuk arsip keluarga, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menyelamatkan dokumen pribadi dari risiko bencana dan degradasi fisik. Program semacam ini penting karena memperluas basis bahan historis yang kemudian membentuk gambaran kolektif tentang siapa warga dan bagaimana pengalaman urban mereka direkam.

Keempat, arsip sebagai alat akuntabilitas publik berperan langsung dalam pembentukan memori sosial-politik. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN/SIKN) yang dibangun oleh ANRI dimaksudkan untuk memfasilitasi akses arsip dinamis dan statis secara nasional sehingga rekam jejak administrasi publik dapat diakses secara lebih luas oleh publik dan peneliti. Transparansi akses ini memungkinkan masyarakat menilai kebijakan publik dan membangun narasi kolektif yang didasarkan pada dokumen. Dalam perspektif memori sosial, mekanisme akses yang baik memperkaya diskursus publik dan membantu menghindarkan dominasi satu versi sejarah yang ditentukan oleh aktor-aktor berkuasa.

Namun tantangan nyata mengiringi aspirasi-aspirasi tersebut. Pertama, seleksi arsip yang dikelola secara sentral dapat mereproduksi bias: dokumen yang dianggap “penting” oleh birokrasi cenderung merefleksikan perspektif administratif, sementara pengalaman masyarakat marginal sering luput. Kedua, bencana alam seperti banjir, kebakaran dan kondisi penyimpanan yang kurang memadai mengancam kontinuitas bahan arsip kertas dan foto, sehingga memori fisik mudah lenyap. Dispusip DKI menanggapi masalah ini lewat program restorasi dan layanan alih media serta upaya mitigasi, tetapi skala program perlu diperbesar agar dapat menjangkau populasi luas. Ketiga, keberlanjutan preservasi digital memerlukan pendanaan berkelanjutan, standar metadata, dan pembinaan SDM, tantangan yang harus dihadapi bersama oleh ANRI sebagai pembina nasional dan pengelola daerah seperti Dispusip DKI.

Intervensi praktis untuk memperkuat peran arsip dalam memori sosial harus bersifat multi pronged. Perlu kebijakan appraisal yang transparan dan partisipatif agar pemilihan dokumen mempertimbangkan nilai sosial dan historis, bukan hanya administratif. Perlu standar teknis dan protokol preservasi digital yang jelas sehingga arsip elektronik mampu mempertahankan keautentikannya; di sisi ini, integrasi aplikasi arsip lokal dengan jaringan nasional (misalnya harmonisasi arsitektur metadata ARJUNA milik Dispusip DKI dengan JIKN/ SIKN ANRI) menjadi langkah krusial agar data tidak terjebak dalam silo. Selain itu, program pemberdayaan warga seperti LASIGA perlu diperluas, dipasang sumber daya untuk restorasi, dan dihubungkan dengan mekanisme deposit sukarela sehingga arsip keluarga yang relevan bisa diakses untuk kepentingan penelitian dan publik tanpa melanggar hak-hak pribadi.

Akhirnya, membayangkan arsip sebagai fondasi memori sosial juga menuntut perubahan budaya: meningkatkan literasi arsip dan kesadaran publik tentang nilai dokumen pribadi, mendorong keterbukaan institusional, dan mengembangkan praktik profesional yang peka terhadap pluralitas pengalaman. Dispusip DKI dan ANRI berada pada posisi penting: ANRI menetapkan standar dan jaringan nasional; Dispusip DKI menerapkan layanan publik yang merangkul komunitas dan mengelola arsip pemerintahan. Bila kedua level ini berjalan sinergis dengan menggabungkan pendekatan teknis (preservasi, metadata), etis (appraisal dan aksesibilitas), dan partisipatif (pelibatan komunitas)—maka arsip akan mampu berfungsi sebagai memori sosial yang hidup: tidak hanya menyimpan masa lalu, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan pembelajaran kolektif untuk masa depan Jakarta.

Kesimpulannya, hubungan antara arsip dan pembentukan memori sosial bersifat dinamis dan bernuansa: arsip membentuk memori melalui proses seleksi, konservasi, akses, dan partisipasi publik. Di era digital dan di kota besar yang bergerak cepat, menjaga kontinuitas memori sosial menuntut kombinasi kebijakan yang cermat, teknologi yang andal, dan keterlibatan warga. Program-program seperti LASIGA dan pembangunan sistem arsip elektronik (ARJUNA) yang terintegrasi dengan JIKN/SIKN menunjukkan arah praktik yang menjanjikan, tetapi keberhasilan jangka panjang bergantung pada pembinaan kapasitas, transparansi dalam pengambilan keputusan kearsipan, serta komitmen untuk menjadikan arsip sebagai ruang kolektif yang benar-benar mencerminkan keragaman pengalaman warga Jakarta.

II.4. Jakarta sebagai Pusat Rekam Jejak Nasional

Sebagai ibu kota negara, Jakarta tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, melainkan juga sebagai simpul utama dalam pembentukan memori nasional Indonesia. Hampir semua peristiwa penting dalam perjalanan bangsa berlangsung dan direkam di kota ini, mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. Arsip-arsip yang tercipta dari dinamika tersebut tidak sekadar menyimpan data administratif, melainkan juga merepresentasikan perjalanan sejarah, budaya, politik, dan identitas bangsa. Posisi Jakarta sebagai pusat rekam jejak nasional semakin menegaskan pentingnya kota ini dalam lanskap kearsipan Indonesia.

Dalam konteks kearsipan, Jakarta menjadi pusat produksi arsip karena kehadiran lembaga negara, kementerian, badan usaha milik negara, organisasi politik, hingga komunitas masyarakat yang berkegiatan di wilayah ibu kota. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, setiap lembaga negara dan instansi pemerintah wajib mengelola arsipnya sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik. Kewajiban tersebut secara praktis menempatkan Jakarta sebagai episentrum penyimpanan dan pemeliharaan arsip nasional, karena sebagian besar aktivitas kenegaraan berlangsung di kota ini.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menjadi institusi kunci yang mengawal peran Jakarta dalam menjaga rekam jejak bangsa. ANRI menyimpan jutaan arsip yang mencakup berbagai periode sejarah, termasuk arsip VOC dan Hindia Belanda, arsip kemerdekaan, hingga dokumen penting perjalanan pemerintahan Indonesia. Koleksi arsip ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi historis dan kultural yang luas, karena merefleksikan bagaimana Jakarta membentuk sekaligus

dibentuk oleh peristiwa nasional. Dalam konteks global, UNESCO telah mengakui sejumlah arsip yang disimpan ANRI sebagai bagian dari *Memory of the World*, seperti naskah *Babad Diponegoro* dan arsip VOC, yang sebagian besar diproduksi dan disimpan di Batavia—nama lama Jakarta

Selain ANRI, keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta menunjukkan peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung kearsipan nasional. Dispusip tidak hanya mengelola arsip statis milik Pemprov DKI, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya arsip melalui program-program publik. Salah satu program unggulannya adalah digitalisasi arsip, yang bertujuan memberikan akses lebih luas kepada warga terhadap informasi sejarah kota. Program ini menjadi penting karena Jakarta tidak hanya menyimpan arsip kenegaraan, tetapi juga arsip lokal yang merekam kehidupan sosial, budaya, dan urbanisasi ibu kota

Peran Jakarta sebagai pusat rekam jejak nasional juga terlihat dari bagaimana kota ini menjadi ruang akumulasi arsip berbagai aktor. Lembaga swasta, organisasi internasional, hingga komunitas masyarakat sipil yang beroperasi di Jakarta turut menghasilkan arsip yang signifikan. Misalnya, arsip media massa nasional yang berkantor pusat di ibu kota, atau arsip organisasi masyarakat sipil yang mencatat gerakan sosial sejak era Orde Baru hingga kini. Dengan demikian, arsip-arsip Jakarta merepresentasikan keragaman pengalaman kolektif bangsa Indonesia, sekaligus memperkaya narasi sejarah di luar dokumen resmi negara.

Namun, posisi Jakarta sebagai pusat arsip juga menghadapi tantangan serius. Pertama, keterpusatan arsip di satu wilayah berisiko terhadap kelestarian informasi bila

terjadi bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Sejarah menunjukkan bahwa arsip-arsip penting pernah musnah akibat kebakaran atau kelalaian pengelolaan. Hal ini menuntut penguatan sistem preservasi digital, sehingga arsip tidak hanya bergantung pada bentuk fisik yang rentan rusak. Kedua, akses publik terhadap arsip masih menghadapi keterbatasan, baik karena kendala teknis maupun kebijakan. Padahal, arsip yang terbuka dapat memperkuat kesadaran sejarah dan demokrasi di masyarakat.

Di tengah tantangan tersebut, ANRI dan Dispusip DKI Jakarta berupaya memperkuat peran Jakarta sebagai pusat memori bangsa melalui inovasi dan kolaborasi. ANRI, misalnya, mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang memungkinkan arsip-arsip dari berbagai daerah terintegrasi dalam satu platform digital. Sementara itu, Dispusip DKI Jakarta aktif meluncurkan program-program berbasis komunitas, seperti pameran arsip tematik, lomba penulisan sejarah berbasis arsip, dan kerja sama dengan sekolah-sekolah untuk pendidikan kearsipan. Upaya ini penting karena memperluas makna arsip, dari sekadar dokumen administratif menjadi medium pembelajaran sejarah yang relevan dengan generasi muda.

Dalam perspektif memori kolektif, arsip-arsip Jakarta tidak hanya melayani kebutuhan birokrasi, melainkan juga berfungsi sebagai fondasi pembentukan identitas nasional. Teori tentang memori kolektif yang dikemukakan Maurice Halbwachs (1992) menekankan bahwa ingatan bersama masyarakat terbentuk melalui institusi, simbol, dan narasi yang terpelihara. Arsip Jakarta memenuhi peran ini, karena menyimpan bukti otentik perjalanan bangsa yang menjadi rujukan identitas dan kebanggaan nasional. Misalnya, arsip proklamasi kemerdekaan yang tersimpan di ANRI tidak

hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi simbol lahirnya bangsa Indonesia.

Dalam konteks lokal, arsip Jakarta juga berperan dalam membangun identitas kota. Arsip-arsip yang merekam kehidupan sehari-hari warga, mulai dari perencanaan tata kota, catatan transportasi, hingga dokumen kebudayaan Betawi, memperkaya pemahaman tentang bagaimana Jakarta berkembang sebagai metropolitan sekaligus ruang hidup komunitas lokal. Dispusip DKI Jakarta berusaha menghidupkan kembali memori kota melalui pameran arsip dan publikasi populer. Dengan cara ini, arsip tidak hanya tersimpan di ruang penyimpanan, tetapi juga hadir dalam kehidupan masyarakat kota sebagai sumber inspirasi dan refleksi.

Dengan demikian, Jakarta sebagai pusat rekam jejak nasional memiliki makna ganda: sebagai pusat arsip negara dan pusat memori kolektif bangsa. Keduanya saling melengkapi, karena arsip kenegaraan memberi legitimasi sejarah bangsa, sementara arsip lokal merekam dinamika kehidupan urban yang membentuk wajah ibu kota. Sinergi antara ANRI dan Dispusip DKI Jakarta menjadi contoh bagaimana pengelolaan arsip dapat dilaksanakan secara kolaboratif untuk menjaga warisan dokumenter bangsa sekaligus memajukan kesadaran publik. Pada akhirnya, arsip-arsip Jakarta tidak hanya berfungsi untuk masa kini, tetapi juga untuk generasi mendatang yang akan memahami identitas bangsa melalui jejak yang ditinggalkan.

BAB III

IDENTITAS DAN SEJARAH JAKARTA DALAM ARSIP

III.1. Dari Batavia ke Jakarta: Arsip Kolonial dan Kemerdekaan

Perjalanan panjang Jakarta dari sebuah bandar kecil di muara Ciliwung menjadi metropolis global abad ke-21 terekam secara detail dalam dua tubuh arsip yang sangat berbeda wataknya: arsip kolonial dan arsip kemerdekaan. Keduanya bukan hanya sekadar dokumen mati, melainkan representasi dari dua rezim kekuasaan, dua sudut pandang, dan dua narasi besar yang saling berkelindan membentuk identitas kota ini. Memahami Jakarta hari ini mensyaratkan pemahaman atas dua lapis memori kolektif yang tertuang dalam kertas-kertas berharga tersebut, sebuah upaya yang kini giat dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Provinsi DKI Jakarta.

Arsip-arsip era kolonial, yang sebagian besar dihasilkan oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* dan kemudian pemerintahan Hindia Belanda, menawarkan sebuah narasi yang kaku dan birokratis. Sebagian besar disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), koleksi ini mulai dari *Daghregisters* (buku harian benteng Batavia), peta, surat-surat perintah, hingga sensus penduduk dibuat untuk mengontrol, mengelola, dan mengeksploitasi (Leirissa, 1991). Mereka merekam Batavia sebagai sebuah *project* Eropa di Timur, sebuah simulakra kota Belanda yang dipaksakan pada tanah tropis. Peta-peta tua karya cartographer seperti Isaac de Graaff menunjukkan sebuah kota benteng yang teratur secara geometris, dengan kanal-kanal yang membagi wilayah berdasarkan fungsi dan ras. Arsip-arsip ini, dalam ketelitiannya, justru mengungkap relasi kuasa yang timpang. Mereka adalah sumber primer yang tak ternilai, namun harus dibaca secara kritis, karena yang tercatat seringkali adalah suara penguasa, sementara suara pribumi yang ditundukkan seringkali absen atau hanya muncul sebagai objek dalam statistik dan peraturan (Blussé, 2001).



Contoh Arsip Peta era Pemerintahan Batavia

Namun, di balik narasi resmi kolonial itu, arsip-arsip tersebut menyimpan jejak kehidupan sehari-hari masyarakat. Dokumen-dokumen pernikahan, izin usaha, laporan kejahatan, dan pengaduan warga di *Schepenbank* (pengadilan kota) memberikan gambaran yang lebih hidup dan manusiawi tentang Batavia. Di sinilah kita menemukan dinamika sosial yang kompleks: interaksi antar etnis (Belanda, Tionghoa, Jawa, Bali, Bugis), praktik ekonomi, hingga konflik sosial. Jejak-jejak ini merupakan puzzle penting untuk merekonstruksi bukan hanya sejarah politik-elit, tetapi juga sejarah sosial kota yang inklusif.

Transisi dari Batavia ke Jakarta pada tahun 1942, menyusul pendudukan Jepang, menandai titik balik dramatis dalam produksi arsip. Bahasa administrasi berganti dari Belanda ke Indonesia dan Jepang. Periode ini, meski singkat, menghasilkan arsip yang

menggambarkan perubahan paksa dan penderitaan masa perang. Namun, momen paling menentukan adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lahirlah sebuah narasi baru yang sepenuhnya Indonesia. Arsip-arsip yang dihasilkan pascaproklamasi seperti poster, pamflet, surat kabar pergerakan, dokumen pemerintah Republik yang masih muda, hingga rekaman radio adalah bukti dari sebuah bangsa yang sedang membangun jati dirinya dari nol. Jakarta, sebagai ibukota, menjadi episentrum dari produksi memori kemerdekaan ini.

Narasi dalam arsip kemerdekaan ini bersifat emansipatoris dan membangun semangat kolektif. Berbeda dengan arsip kolonial yang top-down, arsip periode revolusi fisik seringkali bersifat grassroots, diproduksi oleh berbagai kelompok dan individu yang bersatu padu melawan kembalinya kolonialisme. Arsip-arsip ini menangkap suara rakyat, semangat juang, dan tekad untuk merdeka sepenuhnya. Mereka adalah antitesis dari watak arsip kolonial.

Lantas, di manakah posisi Dispusip DKI Jakarta dalam merawat dan menghidupkan kembali dua warisan arsip yang berlawanan namun sama-sama fondasional ini? Perannya adalah crucial link, menjembatani koleksi nasional yang disimpan ANRI dengan publik Jakarta masa kini. Dispusip tidak hanya menjadi repositori untuk arsip-arsip kontemporer Pemerintah Provinsi DKI, tetapi juga aktif dalam memobilisasi arsip-arsip sejarah untuk membangun kesadaran kewargaan.).

Pameran tematik yang kerap diselenggarakan Dispusip, baik secara fisik maupun virtual dapat menjadi medium efektif untuk mempertemukan dua narasi ini. Sebuah pameran tentang "Jakarta Era Revolusi", misalnya, dapat menampilkan surat-surat perintah Gubernur Jawa Mr. Soewirjo berdampingan dengan foto-foto perjuangan rakyat dan poster propaganda. Dengan kurasi yang tepat, pameran semacam ini tidak hanya menunjukkan fakta sejarah, tetapi juga membangun narasi bahwa

identitas Jakarta dibentuk melalui pergulatan yang panjang antara warisan kolonial dan semangat kemerdekaan.

Tantangan terbesar dalam mengelola "jejak" ini adalah membacanya secara berimbang. Arsip kolonial menawarkan detail administratif yang kaya, tetapi melalui lensa penjajah. Sementara arsip kemerdekaan penuh dengan semangat patriotik, namun seringkali terfragmentasi dan kurang sistematis karena diciptakan dalam situasi perang. Di sinilah peran ahli kearsipan dan sejarawan untuk melakukan kritik sumber (*source criticism*) menjadi sangat penting. Mereka harus menyatukan kepingan-kepingan itu menjadi sebuah mosaik yang utuh, yang mengakui kompleksitas sejarah tanpa menghakimi.

Kesimpulannya, jejak arsip dari Batavia ke Jakarta adalah sebuah dialektika. Arsip kolonial adalah warisan yang tak terelakkan, fondasi fisik dan administratif kota yang harus diakui, namun tidak boleh diromantisasi. Arsip kemerdekaan adalah jiwa yang membebaskan, yang menegaskan kedaulatan dan identitas bangsa. Melalui program-programnya, Dispusip DKI Jakarta telah mengambil peran aktif yang progresif. Mereka tidak hanya menjadi penjaga memori pasif, tetapi menjadi *kurator aktif* yang menghidupkan kembali dialog antara masa lalu dan masa kini, antara warisan kolonial yang kelam dan cahaya kemerdekaan, sehingga warga Jakarta dapat memahami bahwa setiap jalan yang mereka lalui, setiap bangunan tua yang mereka lihat, menyimpan lapisan cerita yang merupakan bagian dari diri mereka sendiri. Jejak-jejak arsip inilah yang akhirnya membentuk memori kolektif dan terus menerus membentuk identitas Jakarta yang dinamis dan transformatif.

III.2. Arsip Pembangunan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

Sebagai ibu kota negara, Jakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan tetapi juga menjadi etalase pembangunan nasional. Setiap periode kepemimpinan, dari era Presiden Soekarno hingga

sekarang, meninggalkan jejak kebijakan dan visi yang direkam dalam arsip pembangunan. Dokumen-dokumen ini—mulai dari master plan kota, blue print gedung pencakar langit, laporan proyek infrastruktur, hingga foto-foto pembangunan—merupakan bukti fisik dari ambisi Indonesia untuk menciptakan sebuah kota dunia yang modern dan berkelas internasional. Pengelolaan arsip-arsip strategis ini, yang sebagian besar menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta, tidak hanya penting untuk akuntabilitas administrasi tetapi juga untuk memahami evolusi ideologi, teknologi, dan tantangan perkotaan yang dihadapi bangsa (Silver, 2007).

Era Soekarno (1945-1966) mungkin adalah periode paling visioner dalam arsitektur pembangunan Jakarta. Sebagai proklamator dan arsitek bangsa, Soekarno memiliki visi yang jelas untuk menggunakan Jakarta sebagai panggung untuk menampilkan kekuatan, identitas, dan modernitas Indonesia yang baru merdeka. Potensi arsip dari masa ini sangatlah banyak, seperti cetak biru Proyek Mercusuar yang meliputi pembangunan Monumen Nasional (Monas), Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan Patung Dirgantara, menggambarkan sebuah ambisi besar yang bersifat simbolik dan nasionalistis. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut menunjukkan bagaimana Soekarno menggunakan bahasa arsitektur modern yang dipadukan dengan elemen-elemen lokal untuk menciptakan "gaya Indonesia" yang baru (Kusno, 2000). Arsip foto yang mendokumentasikan proses pembangunan Monas, dari penyemaian tiang pancang hingga pengangkatan lidah api, adalah rekaman visual yang powerful tentang semangat kolektif sebuah bangsa muda yang sedang membangun dirinya.

Pergantian rezim ke Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menandai pergeseran paradigma pembangunan. Fokusnya bergeser dari proyek-proyek simbolis nasional menjadi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi. Arsip-arsip yang mungkin dihasilkan periode ini

didominasi oleh dokumen-dokumen teknis dan administratif yang terkait dengan industrialisasi, deregulasi, dan ekspansi perkotaan yang masif. Rencana Induk Jakarta 1965-1985 dan revisi-revisinya menekankan pada pembangunan kawasan industri, perumahan massal (seperti kompleks Pondok Indah), dan infrastruktur pendukung seperti jalan tol (Jalan Tol Jagorawi menjadi yang pertama) serta jaringan listrik dan air bersih (Leaf, 1994). Laporan-laporan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dari era ini menjadi sumber primer yang tak ternilai untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi makro diterjemahkan ke dalam transformasi fisik ibukota. Namun, arsip ini juga merekam dampak samping dari pembangunan yang pesat, seperti laporan penggusuran, protes masyarakat, dan kajian dampak lingkungan, yang seringkali tersimpan dalam arsip yang terpisah dan kurang diakses.

Pasca-Reformasi 1998, arsip pembangunan Jakarta menjadi lebih kompleks dan terfragmentasi seiring dengan proses desentralisasi dan demokratisasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara partisipasi swasta dan masyarakat sipil dalam pembangunan kota juga semakin menguat. Master plan dan dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), terus diproduksi, tetapi proses penyusunannya kini melibatkan lebih banyak aktor dan harus melalui mekanisme konsultasi publik yang transparan. Arsip-arsip dari periode ini tidak hanya berupa dokumen teknis pemerintah, tetapi juga meliputi kajian dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), proposal investasi dari pengembang swasta, serta putusan-putusan pengadilan terkait sengketa tanah dan lingkungan. Jejak digital juga mulai mendominasi, dengan email, presentasi PowerPoint, dan laman web resmi menjadi bagian dari memori kolektif pembangunan kota (Cowan, 2020).

Dalam konteks inilah peran Dispusip DKI Jakarta menjadi sangat krusial. Lembaga ini tidak hanya menjadi gudang penyimpanan pasif, tetapi aktif menjadi *knowledge manager* yang mengelola memori kolektif pembangunan ibukota. Selain itu, Dispusip juga menjalankan fungsi sebagai pengelola arsip statis dengan sangat serius. Setiap dokumen final dari proses pembangunan mulai dari Nota Kesepahaman (MoU), Kontrak Kerja Sama, Laporan Akhir Proyek (LAK), hingga Berita Acara Serah Terima (BAST) dari setiap dinas dan badan di lingkungan Pemprov DKI harus diserahkan ke Dispusip ketika retensinya telah habis dan dilakukan penilaian oleh penciptanya. Proses ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan proyek pembangunan meninggalkan jejak yang dapat dipertanggungjawabkan di masa depan, baik untuk keperluan administrasi, hukum, maupun penelitian.

Namun, tantangan dalam mengelola arsip pembangunan ini sangat besar. Volume dokumen yang dihasilkan oleh birokrasi modern sangat masif, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Risiko kehilangan, kerusakan, atau ketidaktersediaan metadata yang memadai dapat memutus rantai memori kolektif kota. Oleh karena itu, upaya Dispusip dalam menerapkan sistem kearsipan yang kuat, termasuk pelatihan bagi arsiparis di setiap satuan kerja, adalah investasi vital untuk memastikan bahwa sejarah pembangunan Jakarta tetap utuh dan dapat dipelajari oleh generasi mendatang.

Secara keseluruhan, arsip-arsip pembangunan Jakarta adalah narasi tentang transformasi, ambisi, dan tantangan sebuah ibu kota negara. Mereka adalah catatan harian teknis yang merekam bagaimana Jakarta terus-menerus dibayangkan, direncanakan, dan diwujudkan dari sebuah kota kolonial menjadi megapolis global. Melalui program-program pembinaan dan pelayanannya, manajemen arsip dinamis, Dispusip DKI Jakarta

memastikan bahwa setiap tahap dalam perjalanan panjang ini tidak hilang ditelan waktu. Dengan menjaga jejak ini, mereka tidak hanya melestarikan sejarah tetapi juga menyediakan peta jalan yang berharga—dan terkadang peringatan yang diperlukan untuk pembangunan Jakarta yang lebih berkelanjutan dan manusiawi di masa depan

III.3. Arsip Kebijakan Publik dan Identitas Pemerintahan

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi dan pembangunan, tetapi juga sebagai cermin dari identitas, nilai-nilai, dan prioritas pemerintahan suatu kota. Di Jakarta, arsip kebijakan publik mulai dari Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Gubernur, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga laporan kinerja instansi membentuk suatu narasi komprehensif tentang bagaimana ibu kota Indonesia ini dikelola dan dibayangkan oleh para pemimpinnya dari masa ke masa. Melalui dokumen-dokumen ini, kita dapat melacak evolusi identitas pemerintahan Jakarta, dari alat kekuasaan kolonial hingga menjadi pemerintah daerah yang berupaya responsif terhadap tuntutan demokrasi dan keberlanjutan. Pengelolaan arsip-arsip kebijakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta memastikan bahwa memori institusional ini terpelihara, terbuka untuk diakses, dan dapat dijadikan landasan untuk perencanaan yang lebih baik di masa depan (Cook, 2013).

Pada era kolonial, arsip kebijakan sangat jelas mencerminkan identitas pemerintahan yang bersifat menindas dan diskriminatif. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* (Lembaran Negara Hindia Belanda) serta peraturan-peraturan locale Batavia dipenuhi dengan kebijakan yang menerapkan segregasi spasial dan sosial, seperti *wijkenstelsel* (sistem permukiman etnis) dan *passenstelsel* (sistem surat jalan). Dokumen-dokumen ini, yang sebagian disimpan di Arsip Nasional RI (ANRI), tidak hanya meregulasi tata kota tetapi juga secara aktif membentuk hierarki rasial yang menjadi fondasi pemerintahan kolonial (Abeyasekere, 1989). Identitas pemerintah saat itu adalah alat untuk mengontrol, mengeksploitasi, dan menjaga kekuasaan demi kepentingan penjajah.

Pasca kemerdekaan, terjadi pergeseran paradigma yang dramatis yang terekam dalam arsip kebijakan. Perda-perda awal

dan instruksi walikota Jakarta pada tahun 1950-1960an berusaha menghapus warisan diskriminatif kolonial sekaligus membangun identitas pemerintahan yang nasionalistis dan melayani rakyat. Penggantian nama-nama jalan dari bahasa Belanda ke Indonesia adalah contoh kebijakan simbolis yang tercatat dalam dokumen resmi, menandai klaim atas ruang kota dan identitas baru (Kusno, 2000). Pada era Gubernur Ali Sadikin, arsip kebijakan seperti Perda tentang retribusi dan pembangunan infrastruktur budaya (Taman Ismail Marzuki, Pusat Kesenian Jakarta) mencerminkan visi pemerintahan yang progresif, yang melihat Jakarta tidak hanya sebagai pusat administrasi tetapi juga sebagai ibu kota budaya yang perlu ditata untuk kesejahteraan warganya.

Era Reformasi membawa perubahan paling mendasar dalam identitas pemerintahan yang tercermin dalam arsip kebijakan. Desentralisasi melalui UU No. 22/1999 (yang direvisi menjadi UU No. 23/2014) memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Arsip kebijakan dari periode ini seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta peraturan tentang partisipasi masyarakat menunjukkan identitas pemerintah daerah yang lebih otonom, akuntabel, dan transparan (Firman, 2009). Kebijakan inovatif seperti pembangunan transportasi massal (MRT, LRT), pengendalian banjir, dan penataan pemukiman kumuh yang terdokumentasi dalam laporan-laporan teknis, mencerminkan pendekatan pemerintahan yang lebih rasional dan berorientasi pada solusi.

Namun, arsip kebijakan juga merekam tantangan dan kontradiksi dalam identitas pemerintahan Jakarta. Dokumen-dokumen tentang penggusuran, polemik reklamasi pantai, dan perdebatan RTRW menunjukkan tarik-menarik antara visi pembangunan ekonomi yang masif dengan perlindungan terhadap ruang hidup warga dan keberlanjutan lingkungan. Arsip dari proses judicial review terhadap Perda di Mahkamah Agung

menjadi bukti penting dari dinamika checks and balances dalam pemerintahan yang demokratis.

Dalam konteks inilah, peran Dispusip DKI Jakarta menjadi sangat krusial. Lembaga ini adalah penjaga memori institusional pemerintah daerah. Melalui fungsinya sebagai pengelola arsip statis, Dispusip memastikan bahwa setiap produk hukum dan kebijakan publik beserta seluruh dokumen pendukungnya tersimpan secara permanen, terorganisir, dan dapat diakses. Ini bukan hanya memenuhi amanat UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tetapi juga menciptakan transparansi dan memungkinkan pembelajaran dari kebijakan masa lalu.

Platform seperti JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) yang terintegrasi dengan katalog Dispusip, memungkinkan warga Jakarta untuk mengakses berbagai Perda dan regulasi dengan mudah. Kemudahan akses ini mentransformasi arsip kebijakan dari dokumen yang tersembunyi di rak-rak menjadi sumber informasi publik yang hidup. Seorang peneliti, akademisi, atau aktivis dapat melacak evolusi kebijakan tata ruang atau transportasi di Jakarta selama puluhan tahun untuk melakukan evaluasi dan memberikan masukan yang berbasis barang bukti. Ini memperkuat identitas pemerintahan yang terbuka dan melayani.

Selain itu, Dispusip juga aktif menyelenggarakan pameran tematik yang mengangkat sejarah pemerintahan Jakarta. Pameran yang menampilkan naskah asli Perda bersejarah, pidato gubernur dari masa ke masa, atau foto-foto peresmian infrastruktur penting, tidak hanya bersifat informatif tetapi juga membangun narasi tentang kontinuitas dan perubahan dalam governance Jakarta. Pameran semacam ini membantu warga memahami proses kebijakan dan membangun apresiasi terhadap kompleksitas mengelola sebuah megapolis.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola volume arsip kebijakan digital (*digital born records*) yang sangat

besar dan memastikan autentisitas, keutuhan, dan keterbacaannya di masa depan. Dispusip harus terus berinvestasi dalam teknologi preservasi digital dan membangun kapasitas SDM untuk menghadapi tantangan ini.

Kesimpulannya, arsip kebijakan publik adalah DNA dari pemerintahan Jakarta. Mereka merekam tidak hanya apa yang diputuskan oleh pemerintah, tetapi juga nilai-nilai, visi, dan pergulatan yang membentuk identitas institusi tersebut. Dari dokumen kolonial yang represif hingga Perda partisipatif era Reformasi, arsip-arsip ini menceritakan perjalanan panjang Jakarta menuju tata kelola yang lebih demokratis dan responsif. Melalui pengelolaan yang profesional dan inisiatif yang pro-aktif, Dispusip DKI Jakarta memastikan bahwa memori kolektif tentang pemerintahan kota ini tetap utuh, terbuka untuk dipelajari, dan dijadikan pijakan untuk membangun identitas pemerintahan Jakarta yang lebih baik di masa depan, yang tidak hanya efisien dan visioner, tetapi juga adil dan manusiawi.

III. 4. Arsip Ketokohan Jakarta Sebagai Memori Kolektif, H.B. Jassin

Jakarta, sebagai sebuah entitas yang dinamis, tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tetapi juga dari gagasan, nilai, dan ingatan yang dirajut oleh para tokoh yang menghuninya. Identitas kota ini terpateri tidak hanya dalam monumen fisik, tetapi juga dalam warisan intelektual dan kultural yang ditinggalkan oleh para pemikir, seniman, dan budayawannya. Dalam konteks ini, arsip pribadi para tokoh menjadi ruang penyimpanan yang sangat berharga, menyimpan memori kolektif yang membentuk jiwa kota. Arsip-arsip ini adalah cermin yang memantulkan pergulatan pemikiran, estetika, dan semangat zaman yang pernah dan terus mengalir dalam denyut nadi ibu kota. Salah satu tokoh yang arsip pribadinya menjadi semacam *prasasti budaya* bagi Jakarta adalah Hans Bague Jassin, atau yang lebih dikenal sebagai H.B. Jassin, Sang Paus Sastra Indonesia.

Kiprah H.B. Jassin sebagai kritikus sastra, editor, dan dokumentator sastra Indonesia modern hampir seluruhnya terpusat di Jakarta. Sejak kedatangannya pada era kolonial hingga wafatnya pada 2000, Jakarta menjadi panggung tempat ia melakukan kerja-kerja kebudayaannya yang monumental. Oleh karena itu, arsip-arsip yang ia kumpulkan sepanjang hidupnya berupa naskah sastra, surat-menyurat dengan para sastrawan terkemuka, kliping koran, foto, hingga catatan pribadi tidak hanya merekam biografi individu, tetapi juga membentuk sebuah narasi besar tentang perkembangan dunia sastra dan pemikiran di Jakarta dari masa ke masa (Jassin, 1983). Koleksi ini merupakan *memori kolektif* yang terinventarisasi, sebuah harta karun yang menceritakan bagaimana Jakarta berperan sebagai inkubator dan sekaligus penyebar gagasan-gagasan kebudayaan modern Indonesia.

Konsep memori kolektif, yang diperkenalkan oleh Maurice Halbwachs, menekankan bahwa ingatan suatu komunitas dibangun, dipelihara, dan ditransmisikan melalui berbagai sarana, salah satunya adalah arsip (Halbwachs, 1992). Arsip Jassin berfungsi sebagai sarana tersebut untuk komunitas sastra dan masyarakat Jakarta pada umumnya. Melalui arsipnya, kita dapat mengingat tidak hanya karya-karya besar seperti *Chairil Anwar: Pelopor Angkatan 45* atau dokumentasi peristiwa penting seperti polemik sastra Manikebu, tetapi juga jaringan sosial-intelektual yang terbentuk di kedai-kedai kopi Menteng, di ruang redaksi majalah *Sastra* dan *Horison*, serta dalam percakapan-percakapan personal yang terekam dalam ribuan surat. Arsip ini mengubah memori yang abstrak dan personal menjadi sesuatu yang konkret, dapat diakses, dan dapat dipelajari, sehingga menjamin kontinuitas identitas kultural Jakarta sebagai pusat gravitasi sastra Indonesia.

Pentingnya arsip Jassin ini diakui secara nasional dengan ditetapkannya sebagai Arsip Nasional yang bernilai penting (ANRI, 2013) dan dikelolanya sebagian koleksinya di Pusat Dokumentasi

Sastra H.B. Jassin di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Namun, peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta, juga krusial dalam konteks yang lebih luas. Meskipun koleksi fisik utama berada di bawah pengelolaan Yayasan H.B. Jassin dan ANRI, Dispusip memiliki peran strategis dalam mempromosikan, mendigitalisasi, dan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam arsip Jassin ke dalam memori kolektif warga Jakarta yang lebih luas.

Dispusip DKI Jakarta, melalui misinya dalam pengelolaan arsip dan perpustakaan, dapat berperan sebagai *jembatan* yang menghubungkan khazanah spesialis seperti Arsip Jassin dengan publik. Program-program yang dijalankan Dispusip, seperti layanan *Jakarta Memory* dan *JAKI* (Jakarta Kini), sejalan dengan semangat untuk melestarikan dan menyebarkan memori kolektif kota. Digitalisasi menjadi kunci di sini. Inisiatif untuk mendigitalisasi arsip-arsip bernilai sejarah, termasuk jika dilakukan dalam bentuk kolaborasi dengan pengelola Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, akan menjamin preservasi dan aksesibilitas yang lebih besar. Sebuah surat dari Chairil Anwar kepada Jassin atau naskah asli cerpen Pramoedya Ananta Toer yang disimpan dengan baik dapat diunggah ke platform digital Dispusip, sehingga dapat diakses oleh siswa, peneliti, dan masyarakat umum dari seluruh penjuru Jakarta hanya dengan gawai mereka. Ini adalah bentuk demokratisasi memori kolektif yang sangat powerful.

Lebih jauh, Dispusip dapat mengkurasi dan mengkontekstualisasikan arsip Jassin melalui program-program edukasi dan publik. Pameran tematik virtual atau fisik yang menyajikan fragmen-fragmen dari Arsip Jassin. Misalnya, “Jassin dan Jejaring Sastrawan Jakarta” atau “Polemik Sastra dalam Kliping Jassin” dapat diselenggarakan di perpustakaan umum yang tersebar di lima wilayah kota. Diskusi buku, workshop penulisan kreatif yang terinspirasi dari karya-karya dalam arsip, atau bahkan tur literer ke lokasi-lokasi bersejarah yang terkait dengan Jassin

dan para sastrawan angkatan '45, adalah kegiatan yang dapat menghidupkan kembali arsip yang mungkin bagi sebagian orang hanya berupa tumpukan kertas usang. Kegiatan semacam ini mentransformasikan arsip dari sesuatu yang statis menjadi dinamis, dari masa lalu yang terpendam menjadi sumber inspirasi untuk masa kini dan masa depan (Cresswell, 2004).

Mengaitkan arsip Jassin dengan identitas Jakarta juga berarti melihat bagaimana nilai-nilai yang diperjuangkannya seperti kebebasan berekspresi, apresiasi terhadap karya sastra, dan ketekunan dalam dokumentasi sejalan dengan karakter Jakarta sebagai kota metropolitan yang inklusif dan berbudaya. Jassin adalah contoh tokoh Jakarta yang dedikasinya telah memberikan kontribusi tidak hanya bagi kota, tetapi bagi seluruh bangsa. Dengan demikian, mempelajari arsipnya adalah juga upaya untuk memahami sebuah etos kerja dan intelektual yang patut menjadi bagian dari identitas warga Jakarta: kritis, terbuka, dan menghargai warisan budaya.

Dalam perspektif kearsipan modern, pengelolaan arsip ketokohan seperti H.B. Jassin tidak lagi sekadar menyimpan dan melestarikan, tetapi juga menciptakan *narasi*. Dispusip DKI Jakarta, dengan jangkauan dan infrastrukturnya, memiliki kapasitas untuk membangun narasi bahwa Jakarta bukan hanya tentang kemacetan dan pusat perbelanjaan, tetapi juga tentang gudang ingatan yang kaya, tempat penyimpanan jejak para pemikir yang telah membentuk wajah kultural Indonesia. Arsip Jassin adalah salah satu permata di dalam gudang tersebut.

Kesadaran bahwa arsip seorang H.B. Jassin adalah bagian dari DNA kultural Jakarta harus terus dipupuk. Kolaborasi antara Dispusip DKI Jakarta, ANRI, Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, dan komunitas sastra merupakan sebuah keharusan untuk memastikan bahwa memori kolektif ini tidak punah. Upaya digitalisasi, edukasi, dan publikasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa setiap generasi baru warga Jakarta dapat

“berdialog” dengan Jassin dan dunia yang diarsipkannya. Pada akhirnya, dengan menjaga arsipnya, kita tidak hanya menghormati seorang tokoh, tetapi merawat sebuah identitas. Kita menjaga agar jiwa Jakarta sebagai kota yang menghargai kata, pikiran, dan ingatan tetap hidup dan menjadi penuntun dalam transformasinya menjadi ibu kota yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga kaya secara spiritual dan kultural.

BAB IV

TRANSFORMASI KEARSIPAN DI JAKARTA

IV.1. Kebijakan dan Regulasi Kearsipan (UU 43/2009, Perda, Pergub)

Transformasi kearsipan di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kerangka kebijakan dan regulasi yang menjadi landasan utama seluruh praktik pengelolaan arsip di Indonesia. Perjalanan ini bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menjadi tonggak nasional. Undang-undang ini merumuskan asas, prinsip, dan tujuan penyelenggaraan kearsipan — mulai dari kepastian hukum, otentisitas, keutuhan, sistematisasi, keamanan, profesionalisme, hingga akuntabilitas dan aksesibilitas (Lukman, 2009). Tujuannya adalah menjadikan arsip sebagai alat bukti yang sah, memori kolektif bangsa, serta penopang akuntabilitas negara dan masyarakat. Dalam kerangka itu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memperoleh mandat sentral untuk menyusun kebijakan, menetapkan standar, memberikan pembinaan, serta menyimpan arsip statis yang bernilai sejarah. Dengan demikian, seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta, wajib menyesuaikan diri dengan pedoman nasional tersebut.

Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki kompleksitas administratif sekaligus beban historis yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain. Kompleksitas ini mendorong lahirnya peraturan daerah dan kebijakan lokal yang berjenjang, termasuk Peraturan Daerah DKI Jakarta dan beberapa peraturan gubernur yang mengatur teknis kearsipan. Khususnya, sejak awal 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memformalkan aspek-aspek teknis pengelolaan kearsipan melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kearsipan. Pergub ini, yang mulai ditetapkan pada 22 Januari 2025 dan diundangkan pada 30 Januari 2025, menegaskan dan merinci kewajiban pencipta arsip,

pembinaan oleh Lembaga Kearsipan provinsi, pembakuan prasarana/sarana kearsipan, serta mekanisme penyusutan dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan provinsi. Pergub tersebut juga mencabut sejumlah peraturan lama sehingga menyediakan payung teknis tunggal bagi operasi kearsipan daerah.

Regulasi di tingkat perda dan pergub ini menjadi pijakan operasional yang penting, tetapi respons terhadap tuntutan digital memerlukan ketentuan teknis yang lebih rinci. Pergub No. 6/2025 melengkapinya dengan Lampiran Ketentuan Teknis yang mengatur siklus hidup arsip dinamis dan statis — mulai dari penciptaan, penggunaan, pemberkasan, alih media (digitalisasi), pemindahan dan pemusnahan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), hingga prosedur penyerahan Arsip Statis ke Lembaga Kearsipan. Penekanan pada JRA penting: retensi aktif dan retensi inaktif ditetapkan secara formal dan (untuk lingkungan provinsi) JRA yang digunakan diberlakukan setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI — sebuah mekanisme yang menjamin harmonisasi standar daerah dengan kebijakan nasional.

Transformasi kebijakan dan regulasi ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif. Ia terwujud dalam berbagai program konkret yang dilakukan secara sinergis oleh ANRI dan Dispusip DKI Jakarta. Salah satu yang menonjol adalah penyelenggaraan kegiatan risk assessment arsip yang dilaksanakan pada Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi potensi risiko kerusakan arsip, menilai tingkat kerawanan, serta merumuskan strategi mitigasi yang sesuai dengan standar nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa amanat undang-undang dan perda dijalankan bukan hanya untuk pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan arsip yang menjadi memori kolektif kota. Pergub 6/2025 memperkuat praktik ini dengan mewajibkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan arsip dinamis oleh Lembaga Kearsipan provinsi dan unit kearsipan di tiap perangkat

daerah, serta menetapkan kegiatan audit dan monitoring sebagai bagian dari pengawasan operasional.

Dalam membicarakan kebijakan kearsipan di Jakarta, sangat penting menekankan bahwa praktik pengelolaan arsip tidak hanya sebatas mengikuti regulasi formal, melainkan juga harus berakar pada teori yang mapan. Yusup (2012) menegaskan bahwa arsip harus dipandang sebagai bagian dari sistem informasi yang mendukung proses administrasi, akuntabilitas, dan memori kolektif lembaga. Kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa regulasi kearsipan, seperti UU 43/2009 dan turunan teknisnya di tingkat provinsi, harus diimplementasikan dengan memperhatikan standar praktik yang konsisten agar arsip benar-benar berfungsi sebagai instrumen tata kelola pemerintahan. Dengan kata lain, keberhasilan regulasi di Jakarta tidak hanya diukur dari kepatuhan formal, tetapi juga sejauh mana teori dan praktik kearsipan modern dapat diintegrasikan dalam keseharian birokrasi kota.

Di ranah program layanan publik, Dispusip DKI Jakarta mengembangkan Alih Media Arsip dan Layanan Arsip Keluarga (LASIGA). Pergub 6/2025 memberi dasar teknis bagi pelaksanaan alih media — termasuk format, prosedur berita acara alih media, kewajiban penyimpanan hasil alih media, dan autentikasi arsip hasil alih media — sehingga inisiatif LASIGA dapat berjalan atas dasar prosedur yang sah dan terdokumentasi. Melalui LASIGA, warga dapat melakukan digitalisasi arsip keluarga mereka, seperti ijazah, akta kelahiran, atau dokumen tanah, tanpa biaya. Program ini tidak hanya melestarikan dokumen pribadi masyarakat, tetapi juga memperkuat keterhubungan antara regulasi dan layanan publik: arsip keluarga yang di-alih-mediakan terdokumentasi menurut prosedur yang selaras dengan ketentuan teknis provinsi, memudahkan akses dan perlindungan hukum bagi pemilik arsip.



Kegiatan LASIGA berupa asistensi digitalisasi untuk arsip yang dimiliki masyarakat

Modernisasi tata kelola juga tampak dalam penerapan sistem elektronik, seperti aplikasi Arjuna dan e-Office. Arjuna merupakan aplikasi naskah dinas elektronik yang memungkinkan pengelolaan arsip dinamis secara digital, mulai dari penciptaan surat keluar hingga pengarsipan yang terintegrasi. Pergub 6/2025 mengakui pentingnya alih media dan pengelolaan arsip elektronik serta mengatur persyaratan teknis alih media, penamaan folder/item arsip digital, dan kewajiban pencatatan berita acara alih media, ketentuan yang memperkuat legitimasi praktik e-Office. Inisiatif ini sejalan pula dengan arah kebijakan nasional melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan JIKN; Pergub menegaskan perlunya harmonisasi JRA dan standar praktis sehingga interoperabilitas data antarsistem lokal dan nasional dapat dicapai.

Dalam konteks hubungan antara regulasi dan praktik, Jakarta memperlihatkan pola integrasi yang konsisten. Regulasi

nasional memberikan payung hukum; regulasi daerah, termasuk Pergub No. 6/2025, menyediakan mekanisme pelaksanaan teknis; dan program kelembagaan menghadirkan realisasi nyata di lapangan. Hal ini membuktikan bahwa transformasi kearsipan di Jakarta tidak berhenti pada penyusunan aturan, melainkan benar-benar hadir dalam kehidupan administrasi dan masyarakat. Pergub juga mengatur pembakuan prasarana dan sarana kearsipan (jenis barang, bentuk, ukuran, sifat khusus) yang menjadi dasar pengadaan fasilitas fisik dan peralatan alih media; ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa investasi infrastruktur mendukung praktik konservasi dan akses yang aman.

Tentu saja, transformasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun tenaga arsiparis yang terlatih. Pergub 6/2025 mengakui aspek pendanaan dengan menetapkan sumber pembiayaan pengelolaan kearsipan berasal dari APBD dan sumber sah lainnya, namun isu kapasitas SDM dan pemeliharaan infrastruktur digital tetap memerlukan prioritas anggaran jangka panjang. Untuk menjalankan program digitalisasi secara berkelanjutan, diperlukan infrastruktur teknologi yang memadai, server yang aman, serta kemampuan teknis yang terus diperbarui.



Contoh Sarana Digitalisasi untuk Arsip berukuran A0

Selain itu, tantangan kultural juga hadir dalam bentuk rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya arsip. Program seperti LASIGA masih perlu diperluas jangkauannya agar masyarakat semakin menyadari bahwa arsip keluarga mereka memiliki nilai historis dan legal yang sangat besar. Tantangan lain adalah kebutuhan integrasi sistem digital lokal dengan jaringan nasional — jika sistem seperti Arjuna tidak terhubung dengan SIKN/JIKN, maka interoperabilitas data bisa terhambat, padahal tujuan akhir adalah menciptakan ekosistem kearsipan nasional yang terintegrasi.

Meski demikian, peluang yang terbuka bagi Jakarta sangat besar. Sebagai kota metropolitan dengan infrastruktur teknologi yang relatif lebih maju dibanding daerah lain, Jakarta berpotensi menjadi laboratorium percontohan transformasi kearsipan digital di Indonesia. Program-program inovatif yang sudah berjalan dapat dikembangkan lebih jauh, misalnya dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk klasifikasi arsip atau mengembangkan portal publik berbasis arsip digital yang dapat diakses luas oleh warga dan peneliti. Pergub 6/2025 menyediakan bingkai teknis untuk inovasi tersebut dengan mengatur strategi percepatan pengelolaan arsip, layanan kearsipan, dan mekanisme penyelamatan arsip saat penggabungan atau pembubaran perangkat daerah — ketentuan penting saat restrukturisasi birokrasi.

Dengan kerangka regulasi yang jelas, struktur kelembagaan yang adaptif, dan komitmen pada pelayanan publik, Jakarta memiliki modal yang kuat untuk menjadi pionir dalam pengelolaan arsip modern. Transformasi kearsipan di Jakarta adalah hasil perpaduan antara kebijakan nasional yang menegaskan prinsip dan standar, regulasi daerah yang mengatur pelaksanaan operasional, serta program kelembagaan yang menghadirkan layanan nyata. UU 43/2009 memberikan fondasi, Perda DKI memberi pijakan, Pergub No. 6/2025 menguraikan ketentuan teknis, dan program-program seperti risk assessment,

alih media, LASIGA, dan aplikasi digital memperlihatkan bagaimana regulasi benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari. Pengelolaan arsip dengan cara demikian tidak hanya menjaga memori kolektif kota, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas publik dan sumber legitimasi identitas Jakarta sebagai ibu kota. Dalam konteks inilah, arsip tidak lagi sekadar tumpukan dokumen, melainkan pilar yang menopang jejak, identitas, dan transformasi Jakarta menuju masa depan.

IV.2. Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah dan UPT

Pembinaan kearsipan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan transparansi tata kelola pemerintahan di Jakarta. Sebagai ibukota negara, Jakarta tidak hanya menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga simpul birokrasi yang melibatkan ribuan dokumen setiap harinya. Arsip yang dihasilkan perangkat daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki nilai strategis karena memuat rekam jejak kebijakan, program, hingga aktivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pembinaan kearsipan tidak dapat dipandang sebagai tugas teknis semata, melainkan bagian dari pembangunan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Dasar hukum pembinaan kearsipan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pencipta arsip, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, wajib melakukan pengelolaan arsip secara baik dan benar, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan (Republik Indonesia, 2009). Di tingkat daerah, termasuk Jakarta, regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan yang menegaskan tanggung jawab perangkat daerah untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai standar nasional (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2007). Lebih lanjut, Peraturan

Gubernur DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah menempatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispupip) sebagai lembaga pembina kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021).

Kehadiran kerangka regulasi tersebut menciptakan fondasi penting bagi pelaksanaan pembinaan kearsipan di Jakarta. Namun, implementasi regulasi tidak cukup tanpa adanya strategi pembinaan yang berkesinambungan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berperan aktif dalam memberikan pedoman dan supervisi teknis, salah satunya melalui program pembinaan kearsipan bagi pemerintah daerah. ANRI menekankan pentingnya pembinaan yang tidak hanya berbentuk pengawasan, tetapi juga berupa pelatihan, bimbingan teknis, serta fasilitasi penggunaan sistem informasi kearsipan (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2020).

Dalam konteks Jakarta, Dispupip memiliki peran ganda sebagai pengelola arsip daerah sekaligus pembina bagi perangkat daerah dan UPT. Pembinaan yang dilakukan Dispupip mencakup beberapa aspek: mulai dari pendampingan dalam penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA), pelatihan penggunaan aplikasi kearsipan, hingga pengawasan internal terhadap pengelolaan arsip aktif dan inaktif di setiap perangkat daerah. Misalnya, pada tahun 2023, Dispupip mengembangkan strategi pengawasan kearsipan berbasis aplikasi SRIKANDI yang memungkinkan monitoring lebih transparan dan efisien terhadap pencipta arsip di lingkungan Pemprov DKI. Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya transformasi digital, sekaligus memperkuat integrasi dengan kebijakan kearsipan nasional yang juga didorong oleh ANRI.

Kegiatan pembinaan ini memiliki tantangan tersendiri. Jakarta adalah kota dengan kompleksitas birokrasi yang tinggi. Jumlah perangkat daerah dan UPT sangat besar, mencakup

dinas, badan, kantor, hingga satuan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Setiap unit tersebut menghasilkan arsip dengan karakteristik berbeda, mulai dari arsip keuangan, pelayanan publik, hingga dokumen teknis infrastruktur. Oleh karena itu, Dispusip harus merancang model pembinaan yang adaptif sesuai kebutuhan unit kerja. Menurut laporan tahunan Dispusip (2023), masih terdapat disparitas kapasitas pengelolaan arsip antar perangkat daerah. Beberapa dinas telah mampu menerapkan standar kearsipan dengan baik, sementara lainnya masih terkendala sumber daya manusia dan infrastruktur.

Pembinaan kearsipan tidak hanya terkait dengan penyelamatan arsip statis yang bernilai sejarah, tetapi juga memastikan arsip dinamis tersedia untuk mendukung pelayanan publik. ANRI menekankan bahwa pembinaan harus diarahkan pada terciptanya sistem pengelolaan arsip yang dapat menjamin ketersediaan arsip sebagai bukti sah hukum, alat pertanggungjawaban, serta sumber informasi dalam pengambilan keputusan (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2023). Prinsip ini sangat relevan bagi Jakarta, mengingat seringkali muncul permasalahan hukum atau sengketa tata ruang yang membutuhkan bukti arsip sebagai referensi.

Di sisi lain, pembinaan juga melibatkan aspek edukasi dan kesadaran aparatur. Arsip seringkali dipandang sekadar dokumen administratif, padahal ia merupakan aset negara. Melalui program bimbingan teknis dan sosialisasi, Dispusip berupaya mengubah paradigma aparatur di perangkat daerah agar melihat arsip sebagai bagian integral dari manajemen organisasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sari & Pramesti (2022) menyoroti pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam layanan arsip keluarga (LASIGA) sebagai contoh bahwa pembinaan arsip dapat diperluas ke ranah masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa pembinaan kearsipan di Jakarta tidak hanya berorientasi ke dalam birokrasi, tetapi juga melibatkan dimensi partisipasi publik.

Transformasi pembinaan kearsipan di Jakarta juga tercermin dari upaya penguatan kapasitas SDM. ANRI bersama Dispusip secara rutin menyelenggarakan pelatihan bagi para arsiparis dan pengelola arsip perangkat daerah. Pembinaan ini mencakup pemahaman regulasi, penerapan teknologi kearsipan, hingga teknik penyelamatan arsip bencana. Mengingat Jakarta rawan banjir, aspek mitigasi bencana terhadap arsip menjadi perhatian serius. Pembinaan diarahkan agar setiap perangkat daerah memiliki rencana kontinjensi dan kemampuan digitalisasi arsip vital.

Digitalisasi arsip di Jakarta tidak dapat dilepaskan dari dasar teoretis yang telah lama dibahas oleh para ahli kearsipan di Indonesia. Yusup (2012) menyebutkan bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi penyederhanaan akses arsip, sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam hal otentisitas dan keamanan informasi. Gagasan ini relevan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sejak beberapa tahun terakhir mengembangkan sistem *e-arsip* melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip). Program ini menjadi wujud nyata penerapan teori kearsipan dalam konteks digital, di mana arsip tidak lagi hanya dipandang sebagai dokumen fisik, tetapi juga sebagai data yang harus dikelola dengan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan keterjaminan autentik. Dengan demikian, digitalisasi kearsipan Jakarta dapat dilihat sebagai kelanjutan langsung dari prinsip dasar yang telah digariskan oleh teori kearsipan nasional.

Digitalisasi arsip menjadi salah satu kata kunci dalam pembinaan kearsipan dewasa ini. Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, yang diinisiasi ANRI, telah diadopsi oleh banyak perangkat daerah di Jakarta. Dispusip mendorong integrasi aplikasi ini agar seluruh surat-menyurat resmi pemerintah dilakukan secara digital, sehingga tidak hanya mempercepat pelayanan tetapi juga mengurangi risiko kehilangan arsip. Program ini sejalan dengan strategi pembangunan Jakarta

sebagai smart city yang berbasis data dan teknologi. Implementasi SRIKANDI membuktikan bahwa pembinaan kearsipan tidak lagi terbatas pada ruang arsip fisik, melainkan masuk ke dalam ranah sistem digital yang mendukung keterbukaan informasi publik (Dispusip DKI Jakarta, 2024).

Hubungan antara pembinaan kearsipan di tingkat nasional dan daerah tampak sinergis. ANRI memberikan pedoman, standar, dan supervisi, sementara Dispusip sebagai lembaga daerah mengadaptasi pedoman tersebut sesuai konteks lokal Jakarta. Kolaborasi ini terlihat dalam berbagai kegiatan pembinaan bersama, misalnya supervisi ANRI terhadap pengawasan internal yang dilakukan Dispusip, atau pelatihan teknis yang menghadirkan narasumber dari ANRI. Hubungan ini memastikan bahwa pembinaan kearsipan di Jakarta tidak berjalan parsial, tetapi menjadi bagian dari kerangka nasional.

Di balik semua upaya tersebut, pembinaan kearsipan menghadapi tantangan keberlanjutan. Transformasi digital membutuhkan investasi teknologi dan pelatihan SDM yang berkesinambungan. Selain itu, resistensi perubahan dari sebagian aparatur juga menjadi hambatan. Tidak semua pegawai terbiasa dengan aplikasi digital atau memahami pentingnya arsip. Oleh karena itu, pembinaan harus dilaksanakan secara konsisten, dengan kombinasi pendekatan regulatif, edukatif, dan motivasional.

Secara keseluruhan, pembinaan kearsipan perangkat daerah dan UPT di Jakarta merupakan proses strategis yang memperlihatkan bagaimana arsip menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan. Dari sisi regulasi, dasar hukum telah kuat. Dari sisi kelembagaan, Dispusip menjadi motor penggerak di tingkat daerah, sementara ANRI berfungsi sebagai pembina nasional. Dari sisi implementasi, aplikasi digital seperti SRIKANDI telah membawa lompatan penting dalam modernisasi kearsipan. Namun, keberhasilan pembinaan pada akhirnya ditentukan oleh

sejauh mana kesadaran kolektif aparaturnya dapat dibangun bahwa arsip adalah memori, bukti, dan identitas Jakarta sebagai ibukota.

IV.3. Digitalisasi Arsip menuju Smart Governance

Transformasi digital dalam bidang kearsipan menjadi salah satu agenda strategis dalam pembangunan tata kelola pemerintahan modern di Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan memiliki peran penting dalam mendorong digitalisasi arsip menuju tercapainya *smart governance*. Digitalisasi arsip bukan hanya perkara memindahkan dokumen fisik ke dalam format digital, melainkan juga menyangkut perubahan paradigma dalam mengelola memori kolektif bangsa dan kota agar lebih mudah diakses, transparan, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan di era digital.

Secara normatif, arah kebijakan digitalisasi arsip di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini menekankan pentingnya penyelamatan, pelestarian, dan pemanfaatan arsip, termasuk melalui teknologi informasi (Republik Indonesia, 2009). Di tingkat pelaksana, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menjadi garda terdepan dalam menyiapkan regulasi, pedoman, sekaligus infrastruktur digital untuk mendukung tata kelola arsip elektronik. Salah satu inisiatif strategis adalah pembangunan aplikasi *Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi* (Srikandi), yang kini menjadi platform nasional pengelolaan arsip elektronik.

Penerapan Srikandi di Jakarta menjadi menarik karena ibu kota memiliki kompleksitas birokrasi yang lebih tinggi dibanding daerah lain. Setiap perangkat daerah, dari tingkat dinas hingga unit pelaksana teknis (UPT), diwajibkan mengelola arsip dinamis sesuai standar nasional. Melalui Srikandi, dokumen administrasi yang dulunya bertebaran dalam bentuk fisik, kini diintegrasikan ke dalam sistem berbasis digital. Hal ini memudahkan proses

penciptaan, distribusi, dan temu kembali arsip, sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik

Digitalisasi arsip di Jakarta juga tidak bisa dilepaskan dari visi besar pemerintah daerah untuk membangun *smart city*. Konsep *smart governance* menuntut keterbukaan informasi, kecepatan layanan, dan efisiensi birokrasi. Arsip digital menjadi fondasi dari sistem ini, karena ia berfungsi sebagai bukti otentik yang dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Tanpa digitalisasi arsip, gagasan *smart city* hanya akan berhenti pada slogan. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan keamanan digital menjadi prasyarat penting yang terus dikembangkan (Hendrawan, 2020).

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah ketimpangan kapasitas antar perangkat daerah dalam mengimplementasikan Srikandi. Tidak semua UPT memiliki SDM yang mumpuni dalam hal literasi digital dan pengelolaan arsip elektronik. Untuk itu, Dispusip DKI Jakarta secara rutin melakukan bimbingan teknis, sosialisasi, dan monitoring guna memastikan bahwa standar kearsipan digital dapat diterapkan secara merata. Program pembinaan ini juga sejalan dengan fungsi Dispusip sebagai lembaga kearsipan daerah yang bertugas membina, mengawasi, serta memberikan layanan kearsipan kepada masyarakat.

Digitalisasi arsip di Jakarta juga menyentuh ranah pelayanan publik. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan layanan arsip keluarga atau LASIGA, yang memungkinkan warga mengakses arsip pribadi dan keluarga secara lebih mudah dalam bentuk digital (Sari & Pramesti, 2022). Inovasi ini bukan hanya menyederhanakan layanan, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat bahwa arsip merupakan bagian penting dari identitas dan hak sipil. Melalui digitalisasi, arsip keluarga yang sebelumnya rawan hilang atau rusak kini dapat disimpan dengan lebih aman dan diakses melalui sistem daring.

Selain itu, digitalisasi arsip juga memiliki implikasi besar terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang berbasis *good governance* menuntut adanya bukti administrasi yang mudah diverifikasi publik. Dengan arsip digital, masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih cepat, sementara lembaga pemerintah dapat meminimalisir praktik penyalahgunaan dokumen atau manipulasi data. Inilah sebabnya digitalisasi arsip dipandang sebagai jembatan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (ANRI, 2020).

Namun, digitalisasi arsip tidak hanya berbicara tentang kecepatan akses, tetapi juga mengenai jaminan autentisitas dan keamanan informasi. Arsip digital harus dilindungi dari ancaman peretasan, manipulasi data, hingga risiko kehilangan akibat kerusakan perangkat. Oleh karena itu, ANRI bersama pemerintah daerah termasuk DKI Jakarta menerapkan standar keamanan informasi, termasuk pengelolaan *backup*, enkripsi, serta tata kelola metadata untuk menjaga integritas arsip (ANRI, 2023).

Transformasi menuju *smart governance* melalui digitalisasi arsip di Jakarta juga menimbulkan perubahan budaya birokrasi. Jika sebelumnya arsip hanya dipandang sebagai dokumen administratif yang disimpan di gudang, kini ia dilihat sebagai aset strategis yang menopang pengambilan keputusan. Digitalisasi mendorong aparatur untuk lebih disiplin dalam mencatat, menyimpan, dan mengelola informasi. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi mentalitas dan etos kerja birokrasi (Hendrawan, 2020).

Keterlibatan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam proses digitalisasi arsip. Dispusip DKI Jakarta secara aktif membuka akses publik terhadap koleksi arsip digital melalui pameran virtual, portal daring, hingga media sosial. Langkah ini tidak hanya menumbuhkan literasi kearsipan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Arsip digital

menjembatani generasi muda dengan sejarah kotanya, sekaligus menghadirkan arsip sebagai ruang dialog yang hidup dan relevan.

Dalam skala nasional, Jakarta juga menjadi laboratorium penting bagi ANRI dalam menguji coba kebijakan dan sistem baru terkait digitalisasi arsip. Sebagai ibu kota, setiap keberhasilan implementasi di Jakarta dapat direplikasi di daerah lain, sementara setiap hambatan yang muncul menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan nasional. Dengan demikian, hubungan antara pengelolaan arsip di Jakarta dan Indonesia bersifat timbal balik: Jakarta menjadi contoh sekaligus penerima manfaat dari arah kebijakan nasional.

Ke depan, tantangan digitalisasi arsip akan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi. Isu kecerdasan buatan, big data, dan integrasi sistem informasi lintas sektor menuntut kesiapan lebih lanjut dari lembaga kearsipan. Dispusip DKI Jakarta bersama ANRI perlu merumuskan strategi jangka panjang agar arsip digital tidak hanya sekadar dokumentasi, tetapi juga menjadi basis analisis untuk perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, arsip digital bukan hanya memotret masa lalu, tetapi juga membantu merancang masa depan kota (ANRI, 2023).

Transformasi kearsipan di Jakarta melalui digitalisasi menunjukkan bahwa arsip tidak lagi berada di pinggiran, melainkan menjadi bagian inti dari *smart governance*. Dengan fondasi regulasi nasional yang kuat, dukungan teknologi melalui Srikandi, serta komitmen pembinaan dari Dispusip, digitalisasi arsip di Jakarta bergerak menuju sistem yang lebih inklusif, efisien, dan transparan. Pada akhirnya, arsip digital akan menjadi penopang utama bagi tata kelola pemerintahan yang responsif dan modern, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat memori kolektif bangsa yang terus relevan di era digital.

IV.4. Jakarta Menuju Kota Global: Tantangan dan Peluang Kearsipan

Transformasi Jakarta menuju kota global tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tata ruang, atau ekonomi kreatif, tetapi juga menuntut penguatan tata kelola informasi dan memori kolektif melalui arsip. Dalam konteks ini, kearsipan tidak dapat lagi dipandang sebagai sekadar penyimpanan dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, serta legitimasi kota di hadapan warganya maupun dunia internasional. Jakarta yang berambisi menjadi kota global harus mampu menunjukkan tata kelola arsip yang modern, terintegrasi, dan sesuai dengan standar global, karena arsip merupakan “urat nadi” birokrasi sekaligus memori yang menjaga identitas kota (Sulistyo-Basuki, 2010).

Tantangan utama dalam pengelolaan arsip di Jakarta berkaitan dengan kompleksitas birokrasi dan volume informasi yang terus meningkat. Sebagai ibu kota negara sekaligus pusat bisnis, pemerintahan, dan diplomasi, Jakarta menghasilkan arsip dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain. Dokumen-dokumen strategis terkait kebijakan publik, perencanaan pembangunan, hingga catatan sejarah perkotaan berpotensi hilang apabila tidak dikelola secara profesional. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah menegaskan pentingnya manajemen arsip yang berorientasi pada akuntabilitas dan perlindungan memori kolektif bangsa, sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) berperan sebagai ujung tombak dalam mengawalnya di tingkat daerah.

Di satu sisi, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Dengan kemajuan teknologi informasi, digitalisasi arsip dan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang dikembangkan ANRI membuka jalan bagi Jakarta untuk membangun ekosistem *smart*

governance. Digitalisasi memungkinkan arsip dikelola secara lebih cepat, mudah diakses, dan aman dari ancaman kerusakan fisik. Bahkan, digitalisasi juga memperkuat posisi Jakarta dalam jejaring kota global karena akses informasi menjadi salah satu tolok ukur keterbukaan pemerintah daerah (Azmi, 2021). Dispusip DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir juga aktif meluncurkan program restorasi arsip, digitalisasi koleksi, serta layanan akses publik berbasis daring yang menjadi bagian penting dalam membangun reputasi kearsipan kota.

Namun, digitalisasi bukan tanpa hambatan. Infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh perangkat daerah dan unit pelaksana teknis (UPT) masih menjadi tantangan serius. Beberapa perangkat daerah masih mengandalkan sistem pengelolaan arsip manual sehingga rawan terjadi duplikasi, kehilangan, maupun inkonsistensi data. Tantangan lain muncul pada aspek sumber daya manusia. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, implementasi di lapangan seringkali terhambat oleh keterbatasan jumlah arsiparis dan tenaga pengelola arsip yang memiliki kompetensi teknologi informasi.

Dalam konteks global, Jakarta juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional dalam pengelolaan arsip. Lembaga-lembaga internasional seperti International Council on Archives (ICA) menekankan pentingnya keterbukaan, interoperabilitas sistem, dan perlindungan data pribadi dalam era digital (ICA, 2019). Bagi Jakarta, ini berarti ada keharusan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan internal birokrasi, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi audit, kolaborasi, dan pertukaran informasi dengan mitra global. Tantangan ini semakin relevan mengingat Jakarta akan mengalami transisi peran setelah pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski tidak lagi menyandang status administratif sebagai ibu kota, Jakarta tetap berperan sebagai

pusat ekonomi global yang dituntut menjaga kualitas tata kelola informasinya (Prakoso, 2023).

Meski menghadapi tantangan, peluang yang dimiliki Jakarta cukup besar. Dispusip DKI Jakarta telah menginisiasi berbagai program pembinaan kearsipan perangkat daerah dan UPT agar standar pengelolaan arsip semakin seragam. Program ini sejalan dengan arahan ANRI yang mendorong harmonisasi sistem kearsipan nasional. Kolaborasi dengan berbagai pihak, baik akademik maupun komunitas masyarakat, juga membuka jalan bagi terciptanya *co-creation* dalam pelestarian arsip kota. Upaya semacam ini tidak hanya memperkuat birokrasi, tetapi juga memberi nilai tambah bagi masyarakat luas, khususnya dalam mengakses arsip sebagai sumber pengetahuan sejarah dan identitas kota (Kusnadi, 2022).

Salah satu peluang strategis lainnya adalah menjadikan arsip sebagai basis inovasi kebijakan publik. Data yang tersimpan dalam arsip dapat menjadi *evidence-based policy making*, sebuah pendekatan yang kini menjadi tren dalam tata kelola kota global. Dengan basis arsip yang kuat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengambil keputusan pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks globalisasi, hal ini menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing dan citra kota (World Bank, 2018).

Selain itu, terdapat dimensi kultural yang memperkuat pentingnya kearsipan Jakarta menuju kota global. Sebagai kota dengan sejarah panjang kolonialisme, perdagangan, dan urbanisasi, arsip-arsip Jakarta menyimpan narasi yang tidak hanya relevan bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi dunia internasional. Upaya Dispusip dalam melestarikan arsip sejarah, termasuk koleksi visual, dokumen kolonial, dan catatan urbanisasi, berkontribusi pada diplomasi budaya yang menjadi salah satu ciri kota global. Arsip menjadi jembatan penghubung antara masa lalu

dan masa depan Jakarta, sekaligus alat untuk memperkuat identitas dalam pergaulan dunia (Wijayanti, 2020).

Ke depan, peluang yang harus dimaksimalkan adalah integrasi antara sistem kearsipan dengan konsep *smart city*. Jakarta telah mengembangkan *Jakarta Smart City* sebagai wadah inovasi digital, namun belum sepenuhnya menyertakan kearsipan sebagai komponen utama. Jika arsip digital terintegrasi dalam sistem ini, maka data yang dihasilkan pemerintah dapat dikelola secara holistik, memudahkan akses bagi warga, dan memperkuat akuntabilitas publik. Integrasi semacam ini akan memposisikan Jakarta sejajar dengan kota-kota global lain yang telah lebih dahulu menerapkan prinsip keterbukaan data (*open data*) dalam tata kelola kota (UNESCO, 2021).

Dengan demikian, Jakarta menghadapi tantangan besar sekaligus peluang emas dalam perjalanan menuju kota global melalui kearsipan. Tantangan berupa infrastruktur, sumber daya manusia, dan standar internasional perlu dijawab dengan inovasi, kolaborasi, serta komitmen kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat. Sementara peluang hadir dalam bentuk digitalisasi, integrasi dengan *smart city*, pemanfaatan arsip untuk kebijakan berbasis bukti, hingga diplomasi budaya. Semua itu akan menentukan apakah Jakarta mampu menjadikan arsip bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai modal strategis untuk meraih reputasi sebagai kota global.

BAB V

PRESTASI DAN PENGAKUAN

V.1. Predikat AA dalam Pengawasan Kearsipan

Pengelolaan arsip di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya penyelenggaraan kearsipan sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kerangka nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki mandat untuk melaksanakan pengawasan kearsipan di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasil dari pengawasan ini diwujudkan dalam pemberian nilai dan predikat tertentu. Salah satu capaian tertinggi adalah predikat AA (sangat memuaskan) dalam pengawasan kearsipan

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menempati posisi strategis dalam bidang kearsipan. Tidak hanya karena kompleksitas arsip yang dihasilkan dari aktivitas birokrasi yang padat, tetapi juga karena perannya sebagai pusat administrasi pemerintahan, perekonomian, dan kebudayaan. Pencapaian predikat AA dalam pengawasan kearsipan bukanlah hal yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang pembinaan, pengembangan sistem, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga mutu penyelenggaraan kearsipan. Sistem penilaian pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI didasarkan pada indikator yang komprehensif. Indikator tersebut mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia kearsipan, program kerja, sarana prasarana, serta implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan arsip. Dengan demikian, predikat AA tidak hanya menilai kerapian arsip secara fisik, tetapi juga konsistensi kebijakan, strategi pengelolaan, serta penerapan inovasi digital.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) telah menunjukkan konsistensi dalam membangun sistem kearsipan yang terintegrasi. Salah satu tonggak penting adalah penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), yang merupakan bagian dari strategi nasional digitalisasi arsip. Srikandi memungkinkan penciptaan, penyimpanan, dan penelusuran arsip secara elektronik yang mendukung prinsip efisiensi dan transparansi dalam birokrasi (Kementerian PANRB, 2021). Dengan penggunaan Srikandi, Jakarta tidak hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menunjukkan kesiapan menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital atau smart governance.

Selain penerapan teknologi, faktor sumber daya manusia (SDM) juga memainkan peran penting dalam capaian predikat AA. Dispusip DKI Jakarta secara aktif menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada arsiparis dan pengelola arsip di perangkat daerah serta Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 43/2009, yang menekankan pentingnya kompetensi pengelola arsip. Upaya penguatan kapasitas SDM telah berkontribusi besar dalam menjaga kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Penghargaan predikat AA juga merepresentasikan pengakuan terhadap keberhasilan Jakarta dalam menjaga prinsip akuntabilitas publik. Arsip bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga instrumen untuk memastikan transparansi, pertanggungjawaban, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks Jakarta yang memiliki dinamika sosial dan politik tinggi, keberadaan arsip yang dikelola baik menjadi landasan bagi kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (Sulistyo-Basuki, 2010).

Tantangan yang dihadapi Jakarta dalam menjaga predikat AA tidaklah sederhana. Besarnya volume arsip, keberagaman

jenis arsip yang dihasilkan, serta keterlibatan ribuan pegawai negeri sipil di berbagai perangkat daerah menuntut adanya konsistensi dan pengawasan berkelanjutan. Di sinilah peran Dispusip menjadi sangat vital. Program monitoring dan evaluasi rutin terhadap perangkat daerah dilakukan untuk memastikan standar kearsipan dipatuhi. Setiap perangkat daerah wajib melaporkan hasil penataan arsip, baik dinamis maupun statis, yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Capaian predikat AA juga memberikan peluang bagi Jakarta untuk memperkuat posisinya di kancah nasional dan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, isu kearsipan semakin mendapat perhatian global, terutama terkait dengan good governance dan keterbukaan informasi. Kota-kota besar dunia berlomba membangun sistem arsip digital yang transparan, aman, dan mudah diakses. Dengan keberhasilan meraih predikat AA, Jakarta memiliki legitimasi untuk menempatkan diri sebagai model pengelolaan arsip perkotaan di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

Lebih jauh, prestasi ini juga berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap birokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola arsip yang baik berkontribusi signifikan terhadap kualitas pelayanan publik (Yusof & Chell, 2000). Warga Jakarta yang semakin melek informasi tentu menghendaki layanan cepat, transparan, dan akurat. Arsip yang tertata dengan baik memungkinkan pejabat publik memberikan keputusan yang tepat berbasis data, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, predikat AA bukan hanya soal penghargaan administratif, tetapi juga soal penguatan demokrasi lokal.

Prestasi ini harus dipandang sebagai capaian kolektif. Selain Dispusip sebagai leading sector, perangkat daerah dan UPT juga menjadi aktor penting. Kolaborasi antar instansi memastikan standar kearsipan diterapkan merata. Tanpa

partisipasi aktif perangkat daerah, predikat AA tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, keberhasilan Jakarta menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjaga mutu penyelenggaraan kearsipan.

Namun demikian, mempertahankan predikat AA merupakan tantangan tersendiri. Perubahan teknologi yang cepat, kebutuhan akan keamanan data digital, serta ancaman bencana alam dan non-alam menuntut adanya inovasi berkelanjutan. Dispusip DKI Jakarta telah merespons hal ini dengan merancang program digitalisasi arsip statis, serta memperkuat sistem backup data untuk menghadapi risiko kehilangan informasi. Upaya ini sejalan dengan tren global di mana digital preservation menjadi perhatian utama lembaga kearsipan.

Dalam konteks pembangunan Jakarta sebagai kota global, predikat AA juga menjadi modal simbolik. Ia menunjukkan bahwa tata kelola birokrasi di Jakarta memiliki kualitas yang dapat disejajarkan dengan standar internasional. Hal ini penting, mengingat reputasi tata kelola kota besar sering kali menjadi sorotan dunia. Predikat AA memberi pesan bahwa Jakarta tidak hanya menjadi pusat ekonomi dan budaya, tetapi juga memiliki infrastruktur birokrasi yang kredibel dan akuntabel.

Dengan demikian, capaian predikat AA dalam pengawasan kearsipan bukan sekadar penghargaan formal, melainkan cerminan transformasi mendasar dalam birokrasi Jakarta. Ia merepresentasikan keberhasilan mengintegrasikan regulasi, SDM, teknologi, dan komitmen kelembagaan ke dalam sistem kearsipan yang modern. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga konsistensi, memperluas inovasi, serta memastikan bahwa arsip benar-benar hadir sebagai fondasi transparansi dan demokrasi di ibu kota. Jika hal ini terwujud, maka prestasi Jakarta tidak hanya berhenti pada predikat AA, melainkan akan menjadi pijakan untuk membangun budaya kearsipan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

V.2. Jakarta sebagai Barometer Kearsipan Nasional

Jakarta, yang telah mengalami perjalanan panjang sebagai pusat pemerintahan kolonial hingga ibu kota republik, kini mengambil posisi penting sebagai barometer kearsipan nasional. Predikat ini tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari konsistensi dalam pengelolaan arsip, sinergi kelembagaan, serta peran strategis DKI Jakarta dalam memfasilitasi arah kebijakan kearsipan yang lebih luas di Indonesia.

Peran Jakarta sebagai barometer dapat dilihat dari sejumlah indikator konkret, terutama adanya kerja sama yang diperkuat dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pada Juli 2025, ANRI menyatakan bahwa DKI Jakarta masih menjadi "salah satu barometer utama dalam perkembangan pemerintah daerah secara nasional" (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2025). Pernyataan ini menegaskan bahwa Jakarta menjadi tolok ukur adaptasi dan implementasi regulasi kearsipan nasional secara efektif.

Kerja sama yang lebih intens terwujud melalui forum audiensi antara pimpinan ANRI dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang membahas rencana bersama—antaranya penyelenggaraan acara berskala nasional maupun internasional dan penominasian khazanah arsip bernilai tinggi untuk dimasukkan dalam Memory of the World (MoW) Asia Pacific (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2025). Inisiatif ini menempatkan arsip Jakarta bukan hanya sebagai dokumen lokal, tetapi sebagai bagian dari memori bersama yang terintegrasi secara global.

Sebagai barometer, Jakarta telah menampilkan praktik pengelolaan arsip yang komprehensif dan inovatif. Dispusip DKI Jakarta tidak hanya mengandalkan sistem manual, melainkan aktif melakukan digitalisasi dan preservasi koleksi arsip—peta, dokumen, audio, foto, film—melalui fasilitas laboratorium internal

yang sesuai standar (Berita Jakarta, 2025). Hal ini menjadikan Jakarta sebagai entitas daerah yang menunjukkan kesiapan teknis dan struktural dalam melindungi memori kolektif kota.

Momen lain yang menegaskan peran barometer adalah pengakuan Jakarta melalui penghargaan dalam Program Memori Kolektif Bangsa. Pada Mei 2025, Dispusip menerima penghargaan dari ANRI karena telah berhasil menetapkan arsip sastra H.B. Jassin sebagai bagian dari Memori Kolektif Bangsa (Berita Jakarta, 2025). Ini menandakan bahwa arsip Jakarta tidak hanya dikelola secara administratif, tetapi juga diakui nilai kebudayaannya di ranah nasional, sebuah indikator nyata bahwa Jakarta menjadi pusat penjaga sejarah dan warisan bangsa.

Namun lebih dari penghargaan simbolis, Jakarta juga aktif sebagai laboratorium percepatan program kearsipan. Risk assessment arsip yang diselenggarakan bersama ANRI pada Mei 2025 merupakan salah satu praktik unggul yang menunjukkan kepedulian terhadap stabilitas jangka panjang arsip (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2025). Metode ini memungkinkan Jakarta menjadi pionir provinsi yang mengidentifikasi dan mengelola risiko kerusakan arsip.

Peran Jakarta sebagai barometer juga menembus aspek pembinaan dan evaluasi perangkat daerah. Dispusip melalui siklus pembinaan, evaluasi, dan monitoring, ikut menetapkan standar kualitas pengelolaan arsip untuk semua perangkat daerah dan UPT—sebuah pola yang menjadi model bagi provinsi lain. Evaluasi pengawasan kearsipan dengan format sistematis dan transparan mencerminkan upaya Jakarta memetakan dan menyebarkan praktik terbaik kepada wilayah lain, sekaligus menarik perhatian nasional terhadap inovasi lokal (.

Secara simbolis, Jakarta menyuarakan visi kearsipan berkelanjutan. Predikat “Sangat Memuaskan (AA)” dari pengawasan nasional adalah validasi atas komitmen Jakarta

dalam mempertahankan konsistensi kearsipan (Berita Jakarta, 2024). Tetapi lebih utama, Jakarta memanfaatkan momentum itu sebagai momentum untuk membangun kultur kearsipan: bahwa arsip bukan hanya dokumen statis, tetapi aset hidup yang mendukung tata kelola publik.

Dari segi sumber daya, Jakarta juga dapat dianggap telah mempunyai amunisi yang lengkap untuk menghadapi tantangan pengelolaan arsip di kota metropolitan. Arsiparis dan pengelola arsip tidak hanya terpusat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, namun tersebar di berbagai unit milik perangkat daerah lainnya. Tercatat, saat ini terdapat 246 jabatan fungsional arsiparis di seluruh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang tersebar di 48 dari 51 Perangkat Daerah.. Angka ini masih mungkin untuk terus bertambah, mengingat kebutuhan akan arsiparis yang belum terpenuhi di beberapa perangkat daerah, serta kebutuhan akan regenerasi dari arsiparis atau pengolah arsip.

Di sisi lain, tantangan Jakarta sebagai barometer nasional juga kompleks. Pertama, beban volume dan diversitas arsip—dari dokumen pemerintahan, media visual, hingga arsip keluarga—membuat beban teknis dan manajerial lebih besar. Dispusip harus terus meningkatkan kapasitas enerjik di bidang digitalisasi, pelestarian, dan akses publik agar tetap relevan sebagai barometer modern. Kedua, kebutuhan integrasi antar sistem. Sebagai kota global, Jakarta mendambakan integrasi kearsipan dengan platform data kota seperti Jakarta Smart City. Tanpa integrasi ini, arsip akan tetap statis dan kurang dimanfaatkan sebagai sumber daya strategis dalam perencanaan dan pelayanan publik. Ketiga, ketergantungan pada kolaborasi nasional. Praktik Jakarta sering diapresiasi dan diadopsi oleh daerah lain. Untuk itu, diperlukan memperkuat mekanisme pelatihan, dokumentasi best practice, dan jejaring antar daerah agar Jakarta tidak hanya menjadi barometer, tetapi juga motor penyebaran inovasi—sebuah peran pusat yang aktif, bukan pasif.

Peluang ke depan cukup terbuka lebar. Jakarta yang sudah memimpin secara nasional dapat memperluas domain pengaruhnya melalui sejumlah langkah. Pertama, menjadi pusat pelatihan kearsipan nasional. Dengan standar, teknologi, dan proses yang telah matang, Jakarta bisa membuka diri sebagai pusat edukasi dan pelatihan untuk arsiparis dari berbagai provinsi. Kedua, menjadikan arsip digital sebagai media diplomasi budaya global. Agenda seperti penominasian MoW, pameran virtual kumpulan arsip kota, dan publikasi tematis dapat memperkuat posisi Jakarta di mata dunia. Ketiga, menciptakan ekosistem inklusif dengan melibatkan komunitas, academia, dan sektor budaya. Ketika praktik kearsipan menjadi bagian hidup masyarakat melalui program arsip keluarga, wisata arsip, dan partisipasi publik, Jakarta bukan hanya barometer formal, tetapi barometer budaya.

Secara keseluruhan, Jakarta memainkan peran ganda sebagai barometer dan inspirasi bagi pengelolaan arsip di Indonesia. Data, nilai pengakuan, praktik inovatif, serta budaya kolaborasi menjadikannya simbol dan prakarsa. Jika diperkuat dengan strategi integrasi, edukasi, serta penguatan jejaring nasional dan global, Jakarta berpeluang memperkuat narasi bahwa Indonesia sebagai bangsa yang menjaga nilai luhur dan memorinya.

V.3. Peran Jakarta dalam Program Memory of the World UNESCO

Jakarta sebagai ibu kota negara tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga simpul penting dalam pelestarian memori kolektif bangsa. Peran strategis Jakarta dalam pengelolaan arsip semakin terlihat ketika kota ini berkontribusi dalam program internasional *Memory of the World* (MoW) UNESCO. Program ini bertujuan melestarikan warisan dokumenter yang memiliki nilai universal luar biasa, serta

menjamin akses publik terhadapnya. Dalam konteks ini, Jakarta tidak sekadar menjadi lokasi penyimpanan arsip penting, melainkan juga arena diplomasi kearsipan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia.

Program *Memory of the World* diluncurkan oleh UNESCO pada 1992 dengan tujuan utama untuk melindungi, melestarikan, dan mempromosikan warisan dokumenter dunia (UNESCO, 2017). Indonesia termasuk negara yang aktif terlibat, melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan didukung oleh lembaga kearsipan daerah, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta. Sebagai pusat administrasi negara sejak masa kolonial, Jakarta menyimpan banyak arsip yang bukan hanya penting secara nasional, tetapi juga memiliki relevansi internasional.

Salah satu tonggak penting adalah pengakuan arsip-arsip Indonesia oleh UNESCO sebagai bagian dari *Memory of the World International Register*. Contoh yang paling menonjol adalah arsip *Arsip VOC (1602–1799)* yang didaftarkan pada 2003. Arsip tersebut sebagian besar tersimpan di Jakarta, di bawah pengelolaan ANRI, dan dianggap sebagai salah satu koleksi paling penting karena mendokumentasikan aktivitas perdagangan global, kolonialisme, dan interaksi antarbangsa di Asia Tenggara (Ketelaar, 2007). Keberadaan arsip VOC di Jakarta bukan hanya memperlihatkan pentingnya kota ini sebagai simpul sejarah global, tetapi juga menegaskan tanggung jawab besar yang diemban oleh lembaga kearsipan di ibu kota untuk menjaganya.

Selain arsip VOC, beberapa koleksi lain yang berbasis di Jakarta juga telah masuk ke dalam daftar MoW UNESCO. Misalnya, naskah-naskah *Babad Diponegoro* (2013) yang memiliki dimensi sejarah perjuangan nasional, serta arsip *Asian-African Conference 1955* yang menandai peran Indonesia dalam diplomasi global. Walaupun tidak seluruh arsip Konferensi Asia-Afrika tersimpan di Jakarta, banyak dokumen persiapan dan

komunikasi diplomatik yang melibatkan pemerintah pusat terekam dalam arsip di ANRI (Sulistyo-Basuki, 2014). Posisi Jakarta sebagai ibu kota menjadikannya pusat arsip politik, diplomasi, dan pemerintahan yang kemudian menjadi rujukan dunia.



Jakarta menerima penghargaan Memori Kolektif Bangsa dari Arsip Nasional, sebagai langkah awal menuju Memory of The World.

Dispusip DKI Jakarta, meskipun skala tugasnya lebih fokus pada arsip daerah, turut mengambil bagian dalam upaya mendukung visibilitas internasional. Sejak 2018, Dispusip aktif mengembangkan program digitalisasi arsip dan penyelenggaraan pameran tematik, seperti pameran arsip sejarah Jakarta dan kolonialisme Belanda, yang sering kali dikaitkan dengan narasi besar bangsa. Pameran-pameran ini memberi ruang bagi masyarakat internasional untuk mengakses warisan arsip Jakarta, baik secara langsung maupun daring. Upaya ini sejalan dengan prinsip UNESCO untuk menjamin akses luas terhadap warisan dokumenter (UNESCO, 2017)

Partisipasi Jakarta dalam program MoW juga memperlihatkan hubungan erat antara pengelolaan arsip nasional dan daerah. ANRI bertindak sebagai penghubung utama dengan UNESCO, tetapi keberhasilan program ini sangat bergantung pada kontribusi lembaga kearsipan di daerah, termasuk Jakarta. Dengan kata lain, Jakarta berfungsi sebagai *hub* yang mengintegrasikan kepentingan nasional dan global dalam hal kearsipan. Hubungan ini menegaskan bahwa pengelolaan arsip di Jakarta tidak hanya berkutat pada birokrasi lokal, melainkan berimplikasi pada citra dan diplomasi budaya Indonesia di mata dunia (Ricklefs, 2001).

Tantangan yang dihadapi Jakarta dalam konteks MoW cukup kompleks. Pertama, masalah konservasi fisik arsip yang masih rapuh, terutama arsip kolonial yang berbahan kertas rapuh akibat iklim tropis dan polusi kota. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam melakukan konservasi dan digitalisasi, yang sebenarnya sangat penting untuk memenuhi standar UNESCO (Rahmah, 2020). Ketiga, rendahnya kesadaran publik terhadap pentingnya arsip membuat akses dan apresiasi masih terbatas. Hal ini diakui dalam beberapa laporan ANRI, yang menekankan perlunya kerja sama lintas sektor untuk memperkuat pengelolaan arsip MoW di Indonesia.

Namun, di balik tantangan itu terdapat peluang besar. Jakarta sebagai kota global memiliki infrastruktur teknologi yang relatif maju dibanding daerah lain di Indonesia. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat digitalisasi arsip berkelas dunia. Misalnya, melalui kerja sama dengan lembaga riset, universitas, dan sektor swasta, digitalisasi arsip VOC atau dokumen diplomasi

dapat dilakukan dengan standar internasional. Selain itu, dengan status Jakarta sebagai pusat diplomasi internasional, promosi arsip-arsip MoW dapat lebih mudah disinergikan dengan agenda budaya dan pariwisata kota.

Program UNESCO *Memory of the World* juga memberikan legitimasi global terhadap arsip yang dimiliki Jakarta. Pengakuan ini dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap warisan dokumenter, sekaligus memperkuat diplomasi budaya di forum internasional. Dengan demikian, keterlibatan Jakarta dalam MoW tidak hanya memberikan nilai tambah akademis atau kultural, tetapi juga strategis dalam politik luar negeri. Dispusip DKI Jakarta dalam beberapa kesempatan turut menekankan peran ini, misalnya dengan menjalin kolaborasi bersama ANRI untuk menyelenggarakan seminar internasional mengenai arsip dan sejarah kota.

Dalam konteks pembangunan nasional, keterlibatan Jakarta dalam MoW juga menegaskan pentingnya arsip sebagai bagian dari *soft power* Indonesia. Warisan dokumenter seperti arsip VOC, naskah Diponegoro, atau dokumen Konferensi Asia-Afrika memiliki nilai simbolis yang mampu menempatkan Indonesia dalam percakapan global. Jakarta, dengan perannya sebagai pusat penyimpanan dan promosi arsip, menjadi ujung tombak dari diplomasi arsip ini. Seperti yang ditegaskan oleh Sulistyo-Basuki (2014), arsip bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga instrumen penting untuk membangun identitas bangsa dan legitimasi di dunia internasional.

Kesimpulannya, peran Jakarta dalam Program *Memory of the World* UNESCO menegaskan posisi strategis kota ini sebagai barometer kearsipan nasional sekaligus aktor penting dalam diplomasi budaya global. Melalui ANRI dan Dispusip, Jakarta berperan menjaga, melestarikan, dan mempromosikan arsip-arsip yang memiliki nilai universal. Meski tantangan konservasi, digitalisasi, dan kesadaran publik masih menjadi kendala, peluang

besar terbuka untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat unggulan dalam pelestarian warisan dokumenter dunia. Dengan demikian, keterlibatan Jakarta dalam MoW tidak hanya mencerminkan prestasi dan pengakuan, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi kearsipan menuju era global yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

V.4. Best Practices Kearsipan Jakarta

Jakarta bukan hanya ibu kota negara, tetapi juga laboratorium bagi inovasi pengelolaan arsip di Indonesia. Praktik-praktik unggul di bidang kearsipan bukan sekadar formalitas, melainkan resultan dari sinergi kebijakan, kolaborasi kelembagaan, dan komitmen berkelanjutan dalam menerapkan teknologi, pelatihan, serta kesadaran kolektif.

Salah satu praktik terbaik yang menjadi sorotan adalah penyelenggaraan risk assessment arsip bersama ANRI pada Mei 2025. Kegiatan ini melibatkan arsiparis dan tenaga kearsipan dari Dispusip yang dilatih dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terhadap arsip—mulai dari kerusakan akibat kelembaban hingga keamanan data. Langkah ini menunjukkan pendekatan proaktif Jakarta dalam menjaga arsip agar tetap aman dan fungsional. Risk assessment dianggap sebagai bagian integral dari tata kelola arsip modern, karena memastikan arsip dikelola dengan sistematis sesuai standar nasional.



Ruang Laboratorium Arsip Dispusip

Selain itu, Dispusip secara aktif menyelenggarakan serangkaian Konsultasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang menyasar beragam kelompok: organisasi masyarakat, BUMD, hingga lembaga pemerintah. Contohnya, KIE kepada Ormas pada Juli 2024 melibatkan 52 organisasi untuk mendongkrak kesadaran dan kapasitas pengelolaan arsip (Dispusip, 2024). Pendekatan serupa diberikan kepada BUMD dan perusahaan pada April 2024, dengan penyediaan pelatihan dan konsultasi teknis oleh para ahli arsip (Dispusip, 2024). Praktik ini menjadi bukti bahwa Jakarta membuka keran pengetahuan kearsipan ke seluruh lapisan masyarakat dan sektor pemerintahan, membumikan arsip sebagai praktik administrasi yang inklusif dan modern.

Kegiatan Gerakan Sadar Tertib Arsip (GSTA) adalah contoh lain yang terus menjadi teladan. Pada tahun 2021, GSTA diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh lebih dari 600 peserta, termasuk OPD, BUMD, dan arsiparis, dengan tema “Kolaborasi Sosial Menjamin Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara.” Acara ini menekankan bahwa tertib arsip bukan hanya

tugas Dispusip, melainkan tanggung jawab kolektif (Dispusip, 2021). ANRI pun memberi apresiasi tinggi atas konsistensi program ini, menganggap GSTA sebagai wujud kuat dari kesadaran dan budaya kearsipan di ibu kota.

Inovasi lain terlihat melalui apresiasi terhadap Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) DKI Jakarta, yang meraih beberapa penghargaan dalam AAI Awards 2024. Penghargaan ini mengakui kualitas kepengurusan dan kreativitas arsiparis di tingkat provinsi (Dispusip, 2024). Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa Jakarta mendukung profesionalisme dan kebanggaan profesi, arsiparis bukan sekadar petugas, melainkan sosok inovatif yang berkontribusi pada kualitas tata kelola arsip.

Kunjungan kerja pejabat Pemprov DKI ke ANRI pada Januari 2025 merupakan praktik baik yang menegaskan sinergi antar lembaga. Rencana kolaborasi seperti program “perjalanan sejarah Jakarta” dan dukungan menjadi tuan rumah peringatan Hari Kearsipan menegaskan bahwa Jakarta berorientasi ke depan serta siap menjadi pelopor dalam inovasi kearsipan (ANRI, 2025). Dukungan ini bukan sekadar formalitas, tetapi memperkuat komitmen pembangunan berbasis memori kota.

Apa yang membuat semua praktik di atas berdampak? Pertama, pendekatan proaktif dan adaptif: risk assessment dan KIE memperlihatkan bahwa Jakarta tidak menunggu masalah muncul, tetapi mempersiapkan diri menghadapi risiko. Kedua, model kolaboratif: GSTA dan penghargaan AAI memperkuat jaringan kearsipan di tingkat provinsi dan komunitas. Ketiga, integrasi kelembagaan: kunjungan kerja dan sinergi dengan ANRI menjadikan Jakarta sebagai titik temu penguatan kearsipan nasional.

Tentu, praktik terbaik ini tidak terlepas dari tantangan. Pertama, menjaga kesinambungan program dan komitmen. KIE dan GSTA perlu divalidasi kembali secara periodik agar tidak

menjadi kegiatan insidental. Kedua, sumber daya manusia yang perlu secara berlanjut dikembangkan seperti arsiparis di OPD, BUMD, dan Ormas memerlukan pelatihan lanjutan agar kualitasnya merata. Ketiga, teknologi dan pendanaan. Risk assessment dan digitalisasi memerlukan investasi infrastruktur yang memadai agar arsip tidak hanya aman, tapi juga mudah diakses publik.

Namun peluang yang terbuka jauh lebih besar. Jakarta bisa menjadikan praktik-praktik ini sebagai model nasional; ANRI dan kementerian lainnya dapat mereplikasi *risk assessment* di daerah lain. Dispusip bisa membangun platform daring untuk edukasi kearsipan seperti misal dengan cara memperluas GSTA ke audiens digital yang lebih luas. AAI DKI Jakarta bisa membuka pelatihan bersertifikat bagi arsiparis nasional. Sedangkan sinergi dengan ANRI dapat dikembangkan menjadi pusat pelatihan dan pameran arsip berkala di Jakarta, mengangkat kota ini sebagai pusat inovasi dan pelestarian arsip.

Secara naratif, *best practices* ini menunjukkan bahwa Jakarta tidak hanya mengelola arsip, tetapi membudidayakannya. Dari risk assessment hingga penghargaan profesi, dari seminar publik sampai sinergi kelembagaan, Jakarta mengukir standar tinggi dalam pengelolaan memori kolektif. Arsip menjadi semangat kolektif untuk merawat identitas kota, membangun akuntabilitas, sekaligus menumbuhkan kebanggaan administrasi modern.

BAB VI

ARAH MASA DEPAN KEARSIPAN JAKARTA

VI.1. Menuju Arsip Digital Terintegrasi

Jakarta berada pada tahap penting dalam pengelolaan memori kolektifnya. Sebagai ibu kota negara, volume informasi yang dihasilkan setiap hari sangat besar. Visi ke depan tidak hanya tentang menyelamatkan dokumen fisik dari kerusakan, tetapi tentang membangun ekosistem digital yang terintegrasi dengan mekonstruksi jaringan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan secara terpadu. Lundy (2012) menyatakan bahwa era digital menuntut arsip berevolusi menjadi "Archive 2.0," yang bersifat partisipatif, mudah diakses, dan dinamis, berbeda dengan citra tradisionalnya yang statis dan tertutup. Mewujudkan arsip digital terintegrasi bagi Jakarta berarti melakukan lompatan signifikan dalam tata kelola informasi, yang akan memperkuat akuntabilitas pemerintah, melestarikan identitas budaya, dan membuka akses pengetahuan bagi warga.

Tantangan yang dihadapi bersifat multidimensi. Pertama, tantangan teknis berupa volume dan heterogenitas data. Arsip Jakarta tidak hanya terdiri dari kertas, tetapi juga mencakup database, email, video, hasil preservasi digital yang terus bertambah setiap tahun. Mengelola dan melestarikan beragam format ini memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan kebijakan preservasi digital yang matang untuk mencegah keusangan teknologi. Kedua, tantangan standarisasi. Integrasi

mustahil terwujud tanpa metadata yang konsisten dan terstandarisasi di seluruh instansi pemerintah. Sebuah laporan digital Dinas Perhubungan, misalnya, harus memiliki struktur metadata yang dapat "berbicara" dengan sistem di Dinas Kebudayaan agar dapat ditemukan, dikelola, dan dipahami konteksnya secara lintas sektor. Ketiga, tantangan sumber daya manusia dan budaya. Transformasi ini memerlukan pergeseran pola pikir dari budaya kerja berorientasi kertas menuju budaya digital, serta investasi berkelanjutan dalam pelatihan para arsiparis agar mampu menjadi pengelola arsip digital yang kompeten (Cook, 2013).



Proses digitalisasi arsip berbasis kertas oleh petugas arsip

Visi integrasi digital ini harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) yang diamanatkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Perka ANRI No. 6 Tahun 2021 menyatakan bahwa SIKN dirancang sebagai platform nasional terintegrasi untuk mengelola arsip dinamis dan statis secara daring. Bagi Jakarta, ini berarti sistem kearsipan daerahnya harus dirancang untuk memiliki interoperabilitas penuh dengan SIKN. Integrasi vertikal ini memastikan bahwa arsip-arsip penting Jakarta yang memiliki nilai nasional dapat dialirkan secara efisien ke dalam memori kolektif bangsa, sementara Jakarta juga dapat mengakses referensi dari daerah lain, memperkaya perspektif sejarahnya sendiri.

Pada tingkat operasional, integrasi dimulai dari pengelolaan arsip dinamis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan sistem e-Office sebagai tulang punggung administrasi modern. Keberhasilan integrasi bergantung pada kemampuan menyambungkan sistem ini dengan repositori arsip digital akhir. Sebuah Surat Keputusan Gubernur yang ditandatangani secara digital dalam e-Office, misalnya, harus secara otomatis memiliki metadata yang lengkap (penandatanganan, tanggal, subjek, klasifikasi) dan pada akhir siklus hidupnya, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) elektronik, dapat ditransfer secara otomatis ke dalam sistem penyimpanan arsip inaktif. Proses otomasi ini menghilangkan celah hilangnya arsip

dan menjamin keutuhan rantai dokumen, yang merupakan prinsip dasar dalam kearsipan.

Manfaat integrasi ini termanifestasi dalam platform layanan publik seperti Arsip Jakarta Mendunia (ARJUNA). Dalam visi integrasi penuh, ARJUNA harus berkembang menjadi titik temu yang dinamis. Ia harus terhubung langsung dengan back-office e-Office dan sistem kearsipan dinamis lainnya. Sebagai ilustrasi: sebuah laporan tahunan Dinas Kebersihan DKI dari tahun 1980-an yang telah melalui proses seleksi dan dinilai bernilai permanen, tidak perlu melalui proses digitalisasi ulang. Karena telah terdigitalisasi dan termetadata dengan baik sejak awal, laporan itu dapat secara otomatis muncul di ARJUNA untuk diakses oleh peneliti yang mempelajari sejarah pengelolaan sampah di Jakarta. Lebih dari itu, ARJUNA dapat mengadopsi model *participatory archive* (Theimer, 2011) dengan memungkinkan komunitas sejarah atau warga yang memiliki koleksi pribadi untuk menyumbangkan digitalisasinya, tentu setelah melalui proses kurasi yang ketat, sehingga memori kolektif Jakarta tidak hanya dibangun dari arsip pemerintah tetapi juga dari memori warga.

Manfaat integrasi melampaui preservasi sejarah. Ia menjadi tulang punggung untuk smart city dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Data historis tentang banjir, kemacetan, atau pertumbuhan penduduk yang tersimpan dalam bentuk terstruktur dan terintegrasi dapat dianalisis dengan kecerdasan buatan

(*Artificial Intelligence*) untuk menemukan pola, memprediksi tren, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data (data-driven policy). Seorang perencana kota dapat menganalisis pola genangan air dari 20 tahun terakhir untuk merancang sistem drainase yang lebih efektif. Seorang sosiolog dapat melacak perubahan demografi melalui arsip sensus penduduk yang terdigitalisasi. Dalam konteks ini, arsip berubah dari benda pasif menjadi aset data aktif yang memberdayakan.

Perjalanan menuju integrasi penuh memerlukan roadmap yang jelas. Langkah strategis pertama adalah penerapan kerangka kerja preservasi digital yang diakui secara internasional, seperti *Open Archival Information System* (OAIS) (CCSDS, 2012). Model ini memberikan panduan komprehensif untuk mengelola informasi digital dalam jangka panjang. Kedua, pengembangan kebijakan one-data untuk metadata, sehingga semua instansi pemerintah di Jakarta menggunakan standar yang sama dalam memberi deskripsi pada arsip digitalnya. Ketiga, investasi dalam keamanan siber dan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) untuk melindungi khazanah digital ini dari ancaman.

Membangun arsip digital terintegrasi bukanlah proyek teknologi semata, melainkan proyek strategis. Ini adalah komitmen Jakarta untuk merawat ingatannya dengan cara yang relevan untuk zamannya—sebuah komitmen bahwa setiap kebijakan, setiap peristiwa, dan setiap cerita warga nya layak untuk dilestarikan dan dijadikan pelajaran bagi generasi mendatang.

Dengan menyinergikan SIKN (nasional), e-Office (operasional), dan ARJUNA (publik), Jakarta tidak hanya akan memiliki sistem kearsipan yang modern, tetapi juga meneguhkan kembali perannya sebagai ibu kota yang memimpin dalam membangun memori dan identitas bangsa yang tangguh di era digital.

VI.2. Arsip sebagai Basis Data Kebijakan Publik

Jakarta sedang memasuki era baru dimana arsip tidak lagi sekadar menjadi rekaman historis pasif, melainkan berubah menjadi aset strategis yang aktif mendukung perumusan kebijakan publik. Transformasi ini merepresentasikan pergeseran paradigmatik dari konsep arsip sebagai **memory institution** menuju arsip sebagai **knowledge institution** (Cook, 2013). Dalam konteks pemerintahan modern yang semakin kompleks, arsip terintegrasi berpotensi menjadi tulang punggung evidence-based policy making yang dapat meningkatkan akurasi, efektivitas, dan akuntabilitas kebijakan publik di tingkat ibukota.

Secara konseptual, arsip sebagai basis data kebijakan publik mengandung pengertian bahwa seluruh dokumen pemerintah mulai dari konsep, riset pendukung, notulen rapat, hingga laporan evaluasi terkelola secara sistematis, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai satu kesatuan pengetahuan (Yakel, 2007). Pendekatan ini mengatasi masalah klasik dimana pengetahuan organisasi terfragmentasi dalam silo-silo departemen, sehingga menghambat proses perencanaan yang

komprehensif. Studi yang dilakukan Janssen et al. (2020) menunjukkan bahwa integrasi data kearsipan dengan sistem pendukung keputusan dapat meningkatkan kualitas analisis kebijakan hingga 40% dibandingkan dengan mengandalkan data terisolasi.

Implementasi konsep ini memerlukan pendekatan terstruktur. Pertama, pembangunan metadata standar yang memungkinkan interoperabilitas antar sistem. Setiap dokumen kebijakan harus memiliki metadata lengkap yang mencakup pencipta, tanggal, subjek, klasifikasi, keterkaitan dengan dokumen lain, dan status aksesnya. Standardisasi ini memungkinkan sistem untuk secara otomatis mengidentifikasi hubungan antara berbagai dokumen terkait kebijakan. Kedua, pengembangan taxonomy khusus kebijakan publik yang memetakan hubungan hierarkis dan fungsional antara berbagai jenis dokumen perumusan kebijakan. Ketiga, implementasi electronic records management system (ERMS) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Jakarta telah memiliki fondasi yang kuat melalui implementasi e-Office dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN). Namun, untuk menjadi basis data kebijakan yang efektif, diperlukan integrasi yang lebih mendalam dengan sistem perencanaan pembangunan seperti Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) dan sistem penganggaran seperti SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Integrasi

ini memungkinkan para perencana kebijakan untuk melacak seluruh dokumen terkait suatu kebijakan mulai dari gagasan awal hingga evaluasi implementasi.

Contoh aplikasinya dapat dilihat dalam pengelolaan kebijakan transportasi perkotaan. Seorang perencana di Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sedang merumuskan kebijakan integrasi transportasi multimodal dapat mengakses melalui sistem terintegrasi: riset-riset sebelumnya tentang pola perpindahan moda (2015-2020), notulen rapat koordinasi dengan operator transportasi, laporan evaluasi kebijakan serupa di kota lain, data kecelakaan di titik transit, hingga arsip video kondisi existing di halte-halte transit. Kemampuan untuk mengakses jejak kebijakan secara lengkap ini dapat mencegah pengulangan kesalahan di masa lalu dan memastikan keberlanjutan kebijakan.

Lebih jauh, dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan big data analytics, sistem ini dapat berkembang menjadi policy intelligence system yang tidak hanya menyediakan data historis tetapi juga mampu melakukan analisis prediktif. Sistem dapat mengidentifikasi pola-pola keberhasilan dan kegagalan kebijakan masa lalu, melakukan simulasi dampak kebijakan, dan bahkan memberikan rekomendasi berbasis pembelajaran mesin (machine learning). Studi oleh Desouza dan Jacob (2017) menunjukkan bahwa pemerintah kota yang menerapkan AI dalam analisis kebijakan dapat mengurangi kesalahan perencanaan hingga 35%.

Tantangan implementasinya tidak kecil. Diperlukan perubahan budaya birokrasi dari yang semula tertutup dan terfragmentasi menuju transparan dan kolaboratif. Perlindungan terhadap data sensitif dan privasi juga menjadi concern utama yang memerlukan framework governance yang jelas. Selain itu, kapasitas teknis aparatur pemerintah perlu ditingkatkan secara signifikan untuk dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal.

Keberhasilan mengembangkan arsip sebagai basis data kebijakan publik akan membawa manfaat besar bagi Jakarta. Kebijakan-kebijakan strategis seperti pengendalian banjir, penataan wilayah, pengelolaan sampah, dan pengembangan permukiman dapat dirumuskan berdasarkan evidence yang komprehensif. Masyarakat juga akan merasakan dampaknya melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan riil. Transparansi proses perumusan kebijakan juga akan meningkat seiring dengan kemudahan akses terhadap dokumen-dokumen pendukungnya (kecuali yang bersifat rahasia negara).

Dalam perspektif jangka panjang, transformasi ini akan mengubah cara kerja birokrasi Jakarta dari yang berbasis prosedur menuju berbasis pengetahuan. Arsip tidak lagi menjadi beban penyimpanan tetapi berubah menjadi intellectual capital yang terus bertambah nilainya seiring waktu. Setiap kebijakan yang dibuat akan meninggalkan jejak pengetahuan yang dapat

dipelajari dan dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan di masa depan, menciptakan siklus pembelajaran dan perbaikan yang terus-menerus (continuous learning and improvement).

Keberhasilan mewujudkan visi ini memerlukan komitmen politik yang kuat, investasi teknologi yang berkelanjutan, dan perubahan mindset seluruh aparatur sipil. Namun, manfaat yang akan diperoleh—berupa kebijakan yang lebih berkualitas, pelayanan publik yang lebih baik, dan governance yang lebih akuntabel—pantas untuk diperjuangkan. Jakarta tidak hanya akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam transformasi digital pemerintahan, tetapi juga akan menempatkan arsip pada posisi strategis sebagai pilar pembangunan kota yang berkelanjutan.

VI.3. Sinergi Kearsipan dengan Pelayanan Publik dan Transparansi

Jakarta sedang membangun masa depan dimana arsip tidak hanya menjadi pusat memori, tetapi juga menjadi motor penggerak pelayanan publik yang efisien dan transparan. Integrasi sistem kearsipan dengan layanan publik merepresentasikan evolusi peran arsip dari fungsi preservasi menuju fungsi pelayanan aktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurut penelitian Shepherd (2019), pemerintah kota yang berhasil mengintegrasikan sistem kearsipan dengan layanan publik mengalami peningkatan kepuasan masyarakat sebesar 28% dan pengurangan waktu penyelesaian layanan hingga 40%.

Transformasi ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konsep integrasi ini bekerja melalui tiga mekanisme utama. Pertama, arsip sebagai enabler layanan satu pintu. Dengan terdigitalisasi dan terintegrasinya dokumen-dokumen kependudukan, perizinan, dan administrasi lainnya, masyarakat tidak perlu lagi menyertakan dokumen fisik yang sama berulang kali untuk different layanan. Sistem yang terhubung dapat mengakses dokumen yang sudah terarsipkan secara digital, selama mendapat otorisasi dari pemilik dokumen. Mekanisme ini secara signifikan mengurangi bureaucratic burden bagi masyarakat (World Bank, 2020). Kedua, arsip sebagai alat verifikasi dan validasi. Dokumen-dokumen historis yang terintegrasi dapat digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dan mencegah pemalsuan dokumen. Ketiga, arsip sebagai basis transparansi kebijakan. Seluruh dokumen perumusan kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program dapat diarsipkan dan diakses publik secara terbuka, kecuali untuk informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara.

Implementasi sinergi ini di Jakarta dapat dilihat dalam beberapa contoh nyata. Sistem layanan perizinan terpadu dapat terintegrasi dengan repositori arsip digital sehingga ketika seorang pengusaha mengajukan izin mendirikan bangunan, sistem secara otomatis dapat mengecek historis perizinan sebelumnya, status tanah, dan dokumen-dokumen pendukung tanpa verifikasi manual

yang memakan waktu. Contoh lain dalam layanan kependudukan, dimana data historis kelahiran, pernikahan, dan kematian yang tersipkan dengan baik dapat mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan dan mengurangi potensi pemalsuan data.

Dalam konteks transparansi, integrasi sistem kearsipan dengan portal data terbuka (open data) Jakarta memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik secara lebih komprehensif. Laporan keuangan daerah, dokumen pengadaan barang dan jasa, serta riset-riset yang dibiayai APBD dapat diarsipkan dan dibuka untuk akses publik. Penelitian yang dilakukan oleh Berliner (2014) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pemerintah berkorelasi positif dengan peningkatan trust masyarakat sebesar 19% dan penurunan tingkat korupsi sebesar 22%.

Tantangan implementasi tidak dapat dianggap remeh. Diperlukan framework governance yang jelas untuk mengatur akses dan sharing data antar instansi, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi masyarakat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi payung hukum yang harus dipatuhi dalam integrasi sistem ini. Selain itu, diperlukan standardisasi metadata dan interoperabilitas sistem yang ketat agar data dari berbagai instansi dapat "berbicara" dalam bahasa yang sama.

Infrastruktur teknologi menjadi penopang utama sinergi ini. Penerapan cloud computing untuk penyimpanan arsip digital,

blockchain untuk memastikan keotentikan dan integritas dokumen, serta artificial intelligence untuk klasifikasi dan retrieval dokumen otomatis menjadi komponen-komponen krusial yang perlu dikembangkan. Sistem harus dirancang dengan architecture yang scalable dan secure, mampu menangani volume data yang besar dan melindunginya dari ancaman siber.

Aparatur sipil perlu dilatih tidak hanya sebagai pengelola arsip, tetapi sebagai knowledge worker yang memahami bagaimana memanfaatkan arsip untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Perubahan mindset dari culture secrecy menuju culture openness menjadi prasyarat keberhasilan transformasi ini. Pelatihan reguler dan change management yang terencana diperlukan untuk membangun kapasitas ini secara berkelanjutan.

Dampak dari sinergi ini bagi Jakarta sangat signifikan. Di tingkat makro, integrasi ini akan memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan mendukung terciptanya clean government. Setiap keputusan dan kebijakan dapat dilacak kembali melalui jejak dokumen yang tertata rapi. Di tingkat mikro, masyarakat merasakan langsung manfaat melalui layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Pengurangan biaya transaksi dan waktu yang signifikan akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa kota-kota seperti Barcelona, Seoul, dan Singapore telah berhasil mengintegrasikan sistem kearsipan dengan layanan publik mereka. Barcelona melalui program "Digital City" -nya berhasil

mengintegrasikan 95% layanan publik dengan sistem kearsipan digital (Barcelona City Council, 2021). Jakarta dapat belajar dari best practices ini sambil mengembangkan model yang sesuai dengan konteks lokal.

Ke depan, perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan 5G akan membuka peluang integrasi yang lebih dalam. Sensor-sensor IoT yang terpasang di infrastruktur kota dapat menghasilkan data real-time yang langsung terarsipkan dan terintegrasi dengan sistem layanan publik. Sebagai contoh, data dari sensor banjir dapat langsung trigger sistem peringatan dini dan respons darurat, dengan seluruh proses terdokumentasi dalam sistem arsip digital.

Visi sinergi kearsipan dengan pelayanan publik dan transparansi bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan journey berkelanjutan yang memerlukan komitmen politik, investasi teknologi, dan perubahan budaya organisasi. Namun, manfaat yang akan diperoleh—berupa pemerintahan yang lebih akuntabel, layanan yang lebih efisien, dan trust masyarakat yang lebih tinggi—menjadikan investasi ini sangat berharga bagi masa depan Jakarta sebagai ibu kota negara yang modern dan berkelas dunia.

VI.4. Inovasi Kearsipan dalam Birokrasi: Arah Pengembangan E-Office dan Arjuna

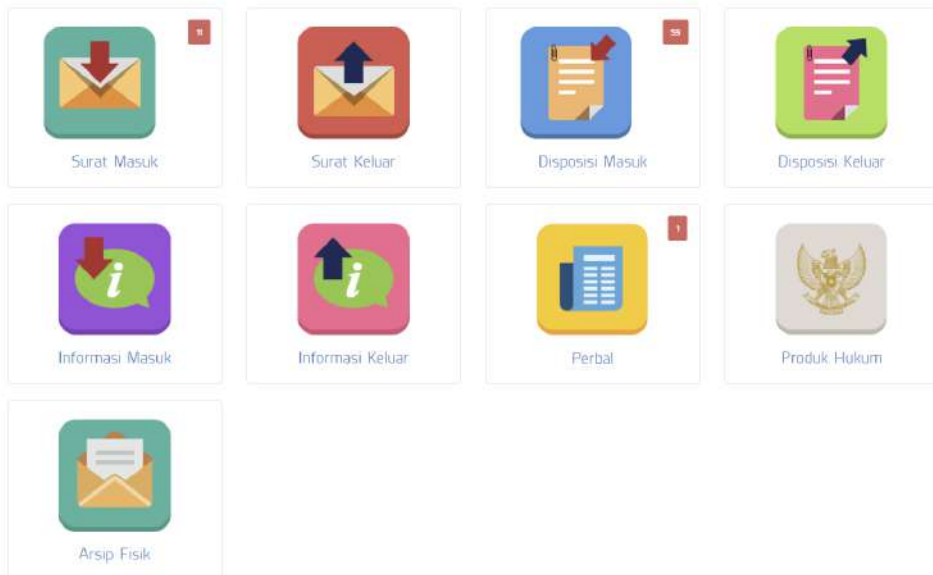
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjadi pelopor dalam transformasi digital sektor publik di Indonesia melalui pengembangan sistem E-Office dan ARJUNA. Inisiatif ini tidak

hanya merepresentasikan modernisasi administrasi pemerintahan tetapi juga komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Latar belakang munculnya sistem E-Office berawal dari tahun 2018 ketika Pemprov DKI Jakarta menyadari pentingnya digitalisasi proses administrasi pemerintahan. Pengembangan aplikasi ini merujuk pada Permenpan RB No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sistem ini diciptakan untuk menjawab tantangan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan naskah dinas yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sebelum adanya E-Office, proses surat-menyurat memerlukan waktu lama karena harus dikirimkan secara fisik, sehingga menghambat kelancaran komunikasi kedinasan antar perangkat daerah, BUMD, dan lembaga terkait lainnya .

Perkembangan E-Office mengalami beberapa fase penyempurnaan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sistem ini telah melalui setidaknya tiga kali pengembangan signifikan dengan melibatkan tenaga ahli seperti analis sistem, web programmer, dan database administrator. Pengembangan terkini pada tahun 2024-2025 mencakup penambahan fitur PLT untuk mengakomodasi pejabat pelaksana tugas, penyesuaian mekanisme surat masuk dan surat keluar, perubahan tampilan antarmuka pengguna, penambahan shortcut untuk mempermudah proses surat, serta pengembangan fitur agenda yang berfungsi sebagai pengingat untuk surat undangan/audiensi. Selain itu, tampilan tracking surat juga disempurnakan menjadi lebih user friendly dan informatif .

Selamat Datang

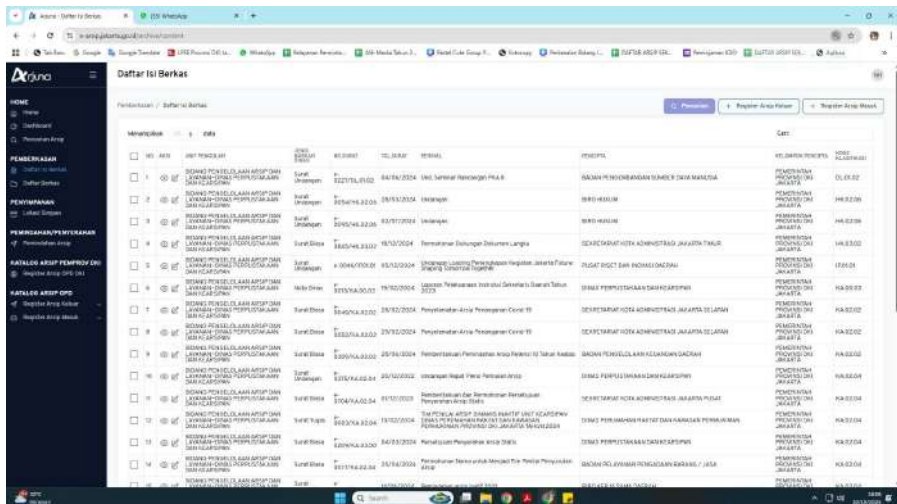


Tampilan Menu E-Office

Fungsi utama E-Office mencakup pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara elektronik, disposisi digital, penomoran surat otomatis, agenda elektronik, pengarsipan digital, dan pelaporan real-time dengan tampilan grafis. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan produk hukum dan aplikasi lain di lingkungan Pemprov DKI, serta dapat diakses melalui berbagai perangkat termasuk smartphone dan tablet. Manfaat yang diperoleh sejak penerapannya sangat signifikan, termasuk efisiensi waktu dan biaya, transparansi dan akuntabilitas proses surat-menyurat, serta dukungan untuk kerja remote yang menjadi sangat krusial selama pandemi COVID-19 .

Sementara itu, sistem ARJUNA (Aplikasi Pengelolaan Arsip) dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan kearsipan daerah. Sosialisasi resmi aplikasi ini dilakukan pada 14 Agustus 2024 oleh Bidang Teknologi Informasi Dispusip, menandai persiapan implementasi sistem ini di

lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ARJUNA dirancang untuk mengelola arsip secara digital, menggantikan sistem manual yang selama ini digunakan .



Tampilan menu pencarian berkas arsip di ARJUNA

Sistem ARJUNA menawarkan berbagai modul dan fungsi yang dirancang untuk pengguna. Modul-modul tersebut meliputi inventarisasi arsip masuk dan keluar, pemberkasan arsip (termasuk integrasi dengan surat dari E-Office), pemindahan arsip dari Unit Pengolah (UP) ke Unit Kearsipan (UK), serta temu kembali arsip. Sistem ini mendukung login multi-level untuk peran seperti Penata Arsip, Admin Unit, Kepala Unit, dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Fitur khususnya mencakup pemberkasan daftar isi berkas ke daftar berkas, pemberkasan surat eOffice, serta pengajuan usul pindah arsip dari UP ke UK .

Integrasi antara E-Office dan ARJUNA merupakan aspek krusial dalam ekosistem digital Pemprov DKI Jakarta. Integrasi ini memungkinkan surat yang dikelola melalui E-Office langsung tersimpan dan terarsipkan dalam sistem ARJUNA, menciptakan

alur kerja yang terintegrasi dari pembuatan hingga pengarsipan dokumen. Sinergi antara kedua sistem ini memperkuat efisiensi dan transparansi administrasi pemerintah, sekaligus mendukung pelestarian memori kolektif bangsa melalui pengelolaan arsip yang modern dan terstruktur .

Dampak dari penerapan kedua sistem ini terhadap birokrasi dan pelayanan publik sangat signifikan. Efisiensi waktu dan biaya menjadi manfaat paling terasa, dengan proses yang sebelumnya memerlukan hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Transparansi proses juga meningkat drastis karena setiap langkah dalam proses surat-menyurat dan pengarsipan dapat dilacak melalui fitur tracking. Selain itu, kedua sistem ini mendukung kerja remote yang menjadi kebutuhan di era new normal .

Tantangan dan rencana pengembangan ke depan untuk kedua sistem terus diperhatikan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperbarui aplikasi ini agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan peraturan baru. Aspek keamanan data menjadi prioritas, dengan implementasi enkripsi data dan sertifikat elektronik. Rencana masa depan termasuk integrasi yang lebih luas dengan sistem lain di lingkungan pemerintah daerah, penggunaan AI dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi, serta ekspansi ke daerah lain sebagai model best practice untuk e-government di Indonesia .

Kesuksesan pengembangan E-Office dan ARJUNA tidak lepas dari komitmen politik dan leadership Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong transformasi digital. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Balai Sertifikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara dalam penyediaan sertifikat elektronik yang aman turut memperkuat fondasi pengembangan sistem ini .

Kedua sistem ini telah membawa Pemprov DKI Jakarta menuju pemerintahan digital yang lebih matang, efisien, dan transparan. Pengalaman Jakarta dalam mengembangkan E-Office dan ARJUNA dapat menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah daerah lainnya dalam melakukan transformasi digital. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan komitmen kuat dan perencanaan yang matang, transformasi digital sektor publik bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan .

Dalam perspektif yang lebih luas, perkembangan E-Office dan ARJUNA sejalan dengan agenda nasional transformasi digital Indonesia. Inisiatif ini tidak hanya tentang adopsi teknologi, tetapi lebih penting tentang perubahan mindset dan budaya kerja aparatur sipil negara menuju pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Diharapkan, keberhasilan Jakarta dalam mengimplementasikan sistem ini dapat menginspirasi daerah-daerah lain untuk melakukan lompatan digital serupa, sehingga pada akhirnya mempercepat terwujudnya governance di seluruh Indonesia .

Dengan segala pencapaian dan perkembangan yang telah dilakukan, E-Office dan ARJUNA telah menjadi tulang punggung digitalisasi administrasi pemerintahan di DKI Jakarta. Kedua sistem ini tidak hanya menjadi alat bantu operasional, tetapi lebih dari itu, menjadi enabler terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi warga Jakarta.

BAB VII PENUTUP

VII.1. Kesimpulan

Arsip merupakan saksi bisu perjalanan peradaban sebuah kota. Ia merekam denyut nadi masyarakat, jejak kebijakan, pergulatan politik, hingga dinamika sosial-budaya yang membentuk wajah Jakarta dari masa ke masa. Dari catatan administrasi pemerintahan hingga dokumen pribadi warga, arsip menyimpan cerita yang tidak hanya menegaskan identitas kota, tetapi juga memelihara memori kolektif bangsa. Melalui arsip, masyarakat dapat memahami asal-usulnya, menilai perkembangan yang telah dicapai, sekaligus menyiapkan pijakan untuk menghadapi masa depan.

Dalam konteks Jakarta, keberadaan arsip memiliki arti yang sangat strategis. Sebagai ibu kota negara sekaligus pusat kebudayaan, ekonomi, dan politik, Jakarta memproduksi volume informasi yang sangat besar dan beragam. Dokumen-dokumen yang lahir dari aktivitas pemerintahan, lembaga sosial, organisasi masyarakat, hingga peristiwa sehari-hari warga, semuanya berkontribusi dalam membentuk identitas kota. Arsip bukan semata kumpulan kertas atau file digital, melainkan refleksi dari perjalanan kolektif masyarakat Jakarta. Tanpa upaya pengelolaan yang serius, memori ini terancam hilang, dan bersama hilangnya memori, lenyap pula sebagian dari jati diri kota.

Kesadaran akan arti penting arsip tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dibangun melalui proses panjang, baik lewat regulasi, penguatan kelembagaan, maupun peningkatan partisipasi publik. Lembaga kearsipan, seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap arsip bernilai guna dapat

terselamatkan, dikelola secara profesional, dan dibuka aksesnya bagi masyarakat. Namun, tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada institusi formal. Dukungan masyarakat, akademisi, komunitas sejarah, hingga pemangku kepentingan lain menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menjaga keberlangsungan memori kota.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang sekaligus tantangan baru. Di satu sisi, digitalisasi arsip memungkinkan penyimpanan yang lebih efisien, akses yang lebih luas, serta penyebaran pengetahuan yang lebih cepat. Namun di sisi lain, ketergantungan pada teknologi membawa risiko berupa kerentanan keamanan data, keterbatasan standar metadata, hingga ancaman hilangnya informasi akibat perkembangan perangkat yang kian cepat. Karena itu, transformasi digital harus berjalan seiring dengan pembangunan sistem yang kokoh, kebijakan yang jelas, dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai.

Arsip juga tidak hanya berfungsi sebagai rekaman administratif atau bukti hukum, melainkan dapat menjadi medium edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pameran arsip, seminar, publikasi, dan kegiatan literasi, arsip dapat dihidupkan kembali sehingga masyarakat dapat merasakan kedekatan dengan sejarah kotanya. Di sinilah arsip berfungsi sebagai jembatan: menghubungkan masa lalu dengan masa kini, serta menanamkan kesadaran kepada generasi muda bahwa apa yang mereka warisi adalah hasil dari proses panjang yang layak dihargai dan dijaga.

Lebih jauh, pengelolaan arsip yang baik mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Arsip memberi legitimasi pada setiap kebijakan, menjadi alat kontrol publik, sekaligus sarana untuk menegaskan keadilan. Ketika arsip disembunyikan atau diabaikan, ruang bagi kesewenang-wenangan akan semakin terbuka. Sebaliknya, ketika

arsip dipelihara dan dibuka aksesnya, demokrasi memperoleh pijakan yang lebih kuat. Dalam hal ini, Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus etalase bangsa memiliki kewajiban moral untuk memberi contoh terbaik dalam pengelolaan arsip.

Keseluruhan pembahasan dalam buku ini menegaskan bahwa arsip bukan hanya masalah teknis penyimpanan, tetapi juga menyangkut soal nilai, identitas, dan keberlanjutan peradaban. Arsip adalah aset tak ternilai yang harus dipandang sebagai bagian dari warisan budaya. Ia tidak hanya relevan bagi para sejarawan, peneliti, atau birokrat, melainkan juga bagi masyarakat luas yang ingin memahami perjalanan hidup kotanya. Melalui arsip, masyarakat dapat membangun kebanggaan kolektif sekaligus memperkuat rasa kebersamaan.

Dengan demikian, kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bahwa arsip merupakan fondasi penting bagi Jakarta untuk menjaga kesinambungan sejarahnya, memperkuat legitimasi sosial dan politik, serta memperkaya warisan budaya yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Arsip adalah jendela yang membuka pandangan ke masa lalu sekaligus pintu yang menuntun langkah ke masa depan. Menyelamatkan arsip berarti menjaga identitas, menumbuhkan kesadaran sejarah, dan memastikan bahwa perjalanan ibu kota selalu dapat dikenang, dipelajari, dan dijadikan inspirasi bagi pembangunan di masa depan.

VII.2. Rekomendasi

Arsip, sebagaimana telah diuraikan sepanjang buku ini, adalah denyut nadi sebuah kota. Ia merekam tawa dan air mata warganya, menandai lahir dan runtuhnya kebijakan, serta menjadi saksi bisu atas setiap perubahan zaman. Maka, rekomendasi yang disampaikan di sini bukan sekadar daftar teknis, melainkan seruan moral agar seluruh pemangku kepentingan — pemerintah,

lembaga, komunitas, hingga warga biasa — turut mengambil bagian dalam menjaga warisan dokumenter Jakarta.

Langkah pertama tentu harus datang dari pemerintah, sebab di tangannyalah mandat hukum dan kekuatan kebijakan berada. Arsip harus ditempatkan bukan hanya sebagai urusan administratif, melainkan sebagai fondasi legitimasi dan akuntabilitas. Regulasi yang jelas, dukungan anggaran yang konsisten, dan integrasi program kearsipan ke dalam pembangunan kota akan menentukan apakah arsip hidup sebagai aset strategis atau mati perlahan sebagai tumpukan kertas yang dilupakan. Pemerintah Jakarta memiliki kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa tata kelola yang baik selalu berangkat dari pengelolaan memori yang baik.

Namun, sebuah kota tidak dibangun oleh pemerintah saja. Lembaga kearsipan harus terus memperkuat kapasitasnya, sementara para arsiparis perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan semangat yang sepadan dengan tantangan zaman. Digitalisasi dan teknologi informasi bukanlah pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mutlak. Repositori daring, standar metadata yang kokoh, dan sistem keamanan yang andal adalah benteng agar arsip tetap terjaga di tengah arus deras disrupsi digital. Tetapi lebih dari itu, teknologi harus menjadi jembatan: membuka arsip agar bisa disentuh, dibaca, dan dipelajari oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja.

Namun arsip tidak hidup di layar komputer semata. Arsip hidup ketika masyarakat mengenalinya, menyentuhnya, dan merasakan kaitannya dengan kehidupan mereka. Karena itu, literasi arsip adalah sebuah keharusan. Sekolah-sekolah dapat menanamkan nilai arsip sejak dini, pameran dan festival arsip dapat menghidupkan kembali ingatan kolektif, sementara komunitas lokal dapat menyuarakan kisah-kisah kecil yang tak kalah penting dari narasi besar. Arsip keluarga, surat-surat lama,

foto-foto sederhana. Semua itu adalah fragmen yang jika disatukan, akan membentuk mosaik sejarah kota yang utuh.

Kolaborasi pun tak bisa ditawarkan. Jakarta harus membuka diri pada pertukaran pengalaman dengan lembaga kearsipan lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Akademisi, sejarawan, seniman, jurnalis, hingga warga biasa dapat menjadi mitra dalam menjaga, menafsirkan, sekaligus menyebarkan nilai arsip. Partisipasi publik melalui program sukarelawan, digitalisasi bersama, atau pengumpulan arsip komunitas akan menumbuhkan rasa memiliki yang sejati. Dengan cara ini, arsip bukan hanya milik lembaga, tetapi menjadi milik seluruh warga kota.

Pada akhirnya, semua langkah ini bermuara pada satu hal: penciptaan budaya sadar arsip. Budaya ini akan memastikan bahwa setiap catatan, sekecil apa pun, dipandang sebagai bagian dari perjalanan kolektif yang berharga. Dalam budaya seperti itu, masyarakat tidak lagi melihat arsip sebagai beban, melainkan sebagai warisan; bukan sekadar dokumen, melainkan cermin jati diri; bukan hanya catatan masa lalu, melainkan bekal untuk melangkah ke depan.

Maka, rekomendasi yang tersisa hanyalah sebuah ajakan: mari kita jaga arsip Jakarta dengan kesungguhan, sebab di dalamnya tersimpan kisah siapa kita, dari mana kita berasal, dan ke mana kita hendak melangkah. Dengan menjaga arsip, kita menjaga memori kota; dengan menjaga memori kota, kita menjaga peradaban itu sendiri. Dan ketika generasi mendatang menoleh ke belakang, mereka akan menemukan sebuah warisan yang utuh — bukan karena waktu berbaik hati, melainkan karena kita hari ini telah memilih untuk merawatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeyasekere, S. (1989). *Jakarta: A history*. Oxford University Press.
- ANRI. (2013). *Penetapan arsip bernilai nasional*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- ANRI & Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. (2025). *Risk assessment arsip di kantor Dispusip DKI Jakarta, 14–16 Mei 2025*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Kepala ANRI No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Kepala ANRI No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2018). *Peraturan ANRI No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2020). *Laporan kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia 2020*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pembinaan kearsipan di lingkungan perangkat daerah*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kepala ANRI No. 6 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Kearsipan*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). *Peraturan ANRI No. 2 Tahun 2021 tentang Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). *Laporan kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2020*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2022). *Pedoman penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2023). *Penilaian kerusakan arsip audio-visual di Dispusip DKI Jakarta*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2023, Juni 6). ANRI lakukan pembinaan kearsipan di Pemprov DKI Jakarta. <https://anri.go.id>

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2024). *Laporan hasil pengawasan kearsipan 2023*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2025). *Forum audiensi ANRI–Pemprov DKI terkait MoW dan sinergi*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2025). *Penguatan peran lembaga kearsipan daerah*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2025). *Pernyataan ANRI mengenai DKI Jakarta sebagai barometer perkembangan daerah*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2025). *Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Azmi, F. (2021). Digitalisasi arsip dan tantangan tata kelola informasi di era smart governance. *Jurnal Kearsipan Indonesia*, 15(2), 45–62.
- Az Zahra, D. C. (2022). *Proses pengolahan arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta*. Politeknik Negeri Jakarta.
- Barcelona City Council. (2021). *Barcelona digital city: Transforming the city through technology and innovation*. Ajuntament de Barcelona.
- Berita Jakarta. (2024). Predikat AA pada pengawasan kearsipan daerah. <https://beritajakarta.id>
- Berita Jakarta. (2025). Digitalisasi dan pelestarian arsip koleksi Jakarta oleh Dispusip. <https://beritajakarta.id>
- Berita Jakarta. (2025). Dispusip terima penghargaan arsip H.B. Jassin sebagai Memori Kolektif Bangsa. <https://beritajakarta.id>
- Berliner, D. (2014). The political origins of transparency. *The Journal of Politics*, 76(2), 479–491.
- Blussé, L. (2001). *Persekutuan aneh: Pemukim Cina, wanita peranakan, dan Belanda di Batavia VOC*. KITLV-Jakarta.
- Cook, T. (2013). Evidence, memory, identity, and community: Four shifting archival paradigms. *Archival Science*, 13(2–3), 95–120.

- Cook, T., & Schwartz, J. (2002). Archives, records, and power: The making of modern memory. *Archival Science*, 2(1–2), 1–19. <https://doi.org/10.1007/BF02435628>
- Cowan, T. (2020). The urban village and the megaproject: Linking vernacular and official urbanism in Jakarta, Indonesia. *International Journal of Urban and Regional Research*.
- Cresswell, T. (2004). *Place: A short introduction*. Blackwell Publishing.
- Duranti, L., & Franks, P. C. (Eds.). (2015). *Encyclopedia of archival science*. Rowman & Littlefield.
- Halbwachs, M. (1992). *On collective memory* (L. A. Coser, Ed. & Trans.). University of Chicago Press.
- Harvey, R. (2012). *Preserving digital materials*. De Gruyter Saur.
- Hendrawan, A. (2020). Digitalisasi arsip sebagai fondasi smart governance. *Jurnal Kearsipan Indonesia*, 12(1), 45–62.
- International Council on Archives (ICA). (2000). *ISAD(G): General international standard archival description* (2nd ed.). International Council on Archives.
- International Council on Archives (ICA). (2004). *ISAAR(CPF): International standard archival authority record for corporate bodies, persons, and families* (2nd ed.). International Council on Archives.
- International Council on Archives (ICA). (2008). *Principles and functional requirements for records in electronic office environments (ICA-Req)*. International Council on Archives.
- International Council on Archives (ICA). (2016). *ICA handbook series*. International Council on Archives.

- International Council on Archives (ICA). (2019). *Principles of access to archives*. International Council on Archives.
- Jassin, H. B. (1983). *Pengarang Indonesia dan dunianya*. Gramedia.
- Ketelaar, E. (2007). Archives as spaces of memory. *Journal of the Society of Archivists*, 29(1), 9–27.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). *Pedoman implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)*. Kementerian PANRB.
- Kusnadi, R. (2022). Kearsipan dan identitas kota: Studi kasus Jakarta. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 20(1), 33–50.
- Kusno, A. (2000). *Behind the postcolonial: Architecture, urban space and political cultures in Indonesia*. Routledge.
- Leaf, M. (1994). The suburbanization of Jakarta: A concurrence of economics and ideology. *Third World Planning Review*, 16(4), 341–356.
- Leirissa, R. Z. (1991). Arsip nasional sebagai sumber sejarah. Prasarana pada Seminar Sejarah Nasional V.
- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa: Silang budaya* (Jilid 2). Gramedia Pustaka Utama.
- Lukman, S. (2009). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Universitas Gadjah Mada.
- Millar, L. (2017). *Archives: Principles and practices* (2nd ed.). Facet Publishing.

- Nurdiansyah, A., & Syarif, V. D. P. (2025). Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dalam perlindungan dan penyelamatan arsip masyarakat melalui layanan arsip keluarga (LASIGA). Universitas Terbuka.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2007). *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan*. Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2019). *Seminar implementasi SPBE dan audit kearsipan online (SIAK)*. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah*. Sekretariat Daerah.
- Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. (2017). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Prakoso, A. (2023). Jakarta pasca pemindahan ibu kota: Reposisi sebagai kota global. *Jurnal Tata Kelola Kota*, 8(1), 77–95.
- Prenowitz, E. (1995). Archive fever: A Freudian impression. *Diacritics*. <https://doi.org/10.2307/465144>
- Rahmah, L. (2020). Digitalisasi arsip dan tantangan kearsipan di Indonesia. *Khazanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 8(2), 123–135.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Sekretariat Negara.

- Ricklefs, M. C. (2001). *A history of modern Indonesia since c.1200*. Stanford University Press.
- Saidi, R. (2017). *Profil orang Betawi: Asal muasal, kebudayaan, dan adat istiadatnya*. Gunara Kata.
- Sari, N., & Pramesti, D. (2022). Layanan arsip keluarga (LASIGA) DKI Jakarta: Upaya pelestarian arsip pribadi masyarakat. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 6(2), 163–176.
- Shepherd, E. (2019). Archives and records management for governance and service delivery. *Archives and Manuscripts*, 47(3), 235–254.
- Silver, C. (2007). *Planning the megacity: Jakarta in the twentieth century*. Routledge.
- Sulistyo-Basuki. (2010). *Manajemen arsip dinamis*. Universitas Terbuka.
- Sulistyo-Basuki. (2010). *Pengantar ilmu kearsipan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sulistyo-Basuki. (2014). *Pengantar ilmu kearsipan*. Universitas Terbuka.
- UNESCO. (2017). *Memory of the World: Documentary heritage in Asia and the Pacific*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2022). *UNESCO Memory of the World Programme: General guidelines*. UNESCO Publishing.
- Wijayanti, S. (2020). Arsip sebagai instrumen diplomasi budaya: Studi kasus Jakarta. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 14(2), 101–118.

World Bank. (2018). *Evidence-based policy making in urban governance*. World Bank.

World Bank. (2020). *Digital government for service delivery*. World Bank.

Yampolsky, P. (2013). *Music and media in the Dutch East Indies: Gramophone records and radio in the late colonial era*. Routledge.

Yusof, Z. M., & Chell, R. W. (2000). The records continuum model and the management of government records in Malaysia. *Records Management Journal*, 10(2), 85–98.

Yusup, P. M. (2012). *Teori dan praktik kearsipan*. Rajawali Pers.

LAMPIRAN

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta dari Masa ke Masa



ISMUKANTO HANDOJODIGDO, BA

KEPALA DINAS ARSIP DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DKI JAKARTA

I

PERIODE 1977 - 1986



SAWALUDIN, SH

KEPALA DINAS ARSIP DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DKI JAKARTA

II

PERIODE 1986-1989



H. HUSEIN ALWI, SH

KEPALA DINAS ARSIP DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DKI JAKARTA

III

PERIODE 1989-1994



MANSYUR RAZAK

KEPALA KANTOR PERPUMDA
PROVINSI DKI JAKARTA
PERIODE 1993 - 1998



LOEMAYAN SUHARTONO

KEPALA DINAS ARSIP DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DKI JAKARTA
IV
PERIODE 1994-1998



Drs. H. M. SATAR

KEPALA DINAS ARSIP DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DKI JAKARTA
V
PERIODE 1998-2000



RACHMAN HERMAWAN

KEPALA KANTOR PERPUMDA
PROVINSI DKI JAKARTA
PERIODE 1998 - 2003



Drs. H. SAIDIN MURKANA, M.Si

KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
VI
PERIODE 2001 - 2004



BOSE DEVI

KEPALA KANTOR PERPUMDA
PROVINSI DKI JAKARTA
PERIODE 2003 - 2006



Drs. H. GITO PURNOMO, MM

KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
VII
PERIODE 2004 - 2006



TUTI MULYATI

KEPALA KANTOR PERPUMDA
PROVINSI DKI JAKARTA
PERIODE 2006 - 2008



Drs. H. PRABOWO SOENIRMAN, A.Kt, MM

KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
VIII
PERIODE 2007 - 2008



Ir. SRI MULYORINI, MM, MT

KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
IX
PERIODE 2008



Dr.H. MAMAN ACHDIYAT, MM

KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
X
PERIODE 2009-2013



HM. ANAS EFFENDI, SH, MM

KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
XI
PERIODE 2013-2014



Prof. Dr. SURADIKA, M.pd

KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
XII
PERIODE 2014-2015



Dr. TINIA BUDIATI, M.A
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
XIII
PERIODE 2015-2017



Drs. CATUR LASWANTO, MM
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
XIV
PERIODE 2017



Drs. WAHYU HARYADI, M.Si
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
XV
PERIODE 2017-2023



Drs. FIRMANSYAH, M.Pd
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
XVI
PERIODE 2023 - 2024



SYAEFULOH HIDAYAT, MAP

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
XVII
PERIODE 2024 - 2025



NASRUDDIN DJOKO SURJONO, SIP, S.T, MBA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
XVIII
PERIODE 2025 - SAAT INI

Contoh Arsip Pembangunan DKI Jakarta

1. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG ATAS NAMA PENETAPAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH DAN WILAYAH KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA PEMBANGUNAN SUNTER DAERAH KHUSUS IBUKOTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

No.:D.IV-c.13/1/55/74.

tentang

PENETAPAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH DAN
WILAYAH KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA
PEMBANGUNAN SUNTER DAERAH KHUSUS IBU
KOTA JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

- Membaca kembali : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.D.IV-c.13/1/54/74 tanggal 15 Februari 1974 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Sunter Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Menimbang : bahwa dengan dibentuknya Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Sunter dimaksud, maka sesuai dengan pasal 4 Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan peruntukan bidang tanah dan wilayah kerja Badan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria) ;
2. Undang-undang No.2 Paps tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
3. Undang-undang No.10 tahun 1964 tentang Penegasan Jakarta sebagai Ibukota Negara RI ;
4. Undang-undang No.18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No.6 tahun 1969 (LN Tahun 1969 No.137) ;
5. Keputusan Presiden RI No.22 tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 1966 tentang Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Agraria dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur Kepala Daerah ;
7. Peraturan Bangunan Jakarta 1919 - 1941 jo. Peraturan Daerah tanggal 20 Februari 1953 (TBMRI tanggal 24 No - pember 1953 No.94 Tambahan No.61) ;
8. Keputusan DPRD GR DKI Jakarta No.9/P/DPRD GR/67 tanggal 3 Mei 1967 tentang Rencana Induk (Master Plan) Jakarta 1965 - 1985 ;
9. Keputusan DPRD GR DKI Jakarta No.9/P/DPRD GR/69 tanggal 17 Maret 1969 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) DKI Jakarta 1969/1970 - 1973/1974 ;
10. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.Ib.3/1/1/1970 tanggal 7 Januari 1970 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tatakerja Otorita-otorita Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
11. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.D.IV-c.13/1/54/1974 tanggal 15 Februari 1974 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Sunter Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

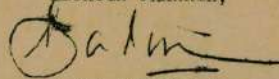
MEMUTUSKAN.....

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : I. Peruntukan bidang tanah uang terletak di daerah Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, wilayah Jakarta Utara, seluas ± 1.020 HA satu dan lain sebagaimana dijelaskan pada peta situasi skala 1 : 20.000 yang diberi tanda warna merah jambu yang aslinya disimpan di Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Biro III/Administrasi), adalah untuk pembangunan perumahan, sekolah, rumah sakit, industri, waduk dan fasilitas2/lainnya, sebagai wilayah kerja Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Sunter DKI Jakarta. /Kepentingan Umum
- II. Menugaskan kepada Walikota Jakarta Utara, Kepala Direktorat Agraria, Kepala Dinas Tata Kota dan Kepala Sub. Direktorat Pendaftaran Tanah, untuk mengamankan isi Keputusan ini.
- III. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- IV. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a.-
Pada tanggal : 15 Februari 1974.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



(ALI SADIKIN).-
Letnan Jenderal TNI (KKo-AL).

TINDASAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri PUTL,
3. Inspektur Jenderal Dep. Dalam Negeri,
4. Direktur Jenderal Agraria,
5. Para Pj. Wakil Gubernur Kepala Daerah,
6. Pimpinan DPRD DKI Jakarta,
7. Pangda TNI AD V Jayakarta,
8. Kadapol Metro Jaya,
9. Pangkodau V,
10. Pangdaeral III,
11. Jaksa Tinggi DKI Jakarta,
12. Para Ketua Pengadilan Negeri Jakarta,
13. Sekretaris Daerah,
14. Ketua Harian BP-BPP,
15. Para Kepala Inspektorat/Direktorat/Biro,
16. Para Walikota,
17. Para Kepala Dinas/Kantor dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta,
18. Ketua Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Sunter DKI Jakarta,
19. Camat Tanjung Priok.-

2. SK GUB PEMBENTUKAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

No.D.IV-3161/d/11/'76

tentang

PEMBENTUKAN PROYEK PEMBANGUNAN TAMAN MA-
KAM PAHLAWAN NASIONAL.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

- Membaca : Keputusan Presiden R.I. No.19 Tahun 1976 tanggal 9 April 1976 tentang Proyek Taman Makam Pahlawan Nasional/Monumen Pahlawan Nasional.
- Menimbang : a. bahwa Jakarta dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan sebagai kota Metropolitan, disamping melaksanakan kegiatan2 pembangunan dipandang perlu menjunjung tinggi serta menempatkan dihati para Warganya jasa-jasa daripada para Pahlawan Nasional ;
- b. bahwa untuk memenuhi kepentingan kebutuhan dimaksud diperlukan kegiatan2 yang bersifat perencanaan, pengendalian, pengamanan daripada Taman Makam Pahlawan Nasional ;
- c. bahwa oleh karena itu dan untuk mencapai tujuan tersebut sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. No.19 Tahun 1976 tanggal 9 April 1976 dimaksud diatas, diperlukan Penanggung Jawab Pelaksana yang mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan2 pembangunan Taman Makam Pahlawan Nasional dimaksud diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Pns Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
2. Undang-undang No.10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah ;
4. Keputusan Presiden R.I. No.19 Tahun 1976 tanggal 9 April 1976 tentang Proyek Taman Makam Pahlawan Nasional/Monumen Pahlawan Nasional ;
5. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICN-Stbl 1925 No.448) sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
6. Keputusan DPRD-GR DKI Jakarta No.9/P/DPRD-GR/1967 tanggal 3 Mei 1967 tentang Rencana Induk (Master Plan) DKI Jakarta 1965-1985 ;
7. Peraturan Daerah No.1 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA - II) Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Tahun 1974/1975 - 1978/1979).
- Mendengar : Pertimbangan Instansi-instansi yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : I. Membentuk Proyek Pembangunan Taman Makam Pahlawan Nasional dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan dengan susunan Personalia sbb. :

I.1. Penanggung

III. Pembiayaan untuk pelaksanaan proyek ini akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 7 Keputusan Presiden No.19 Tahun 1976.

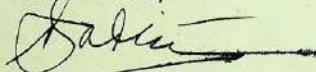
IV. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

V. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a.-

Pada tanggal : 12 Mei 1976.-

GOVERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



(ALI SADIKIN).
Letnan Jenderal TNI (Marinir)

TINDASAN Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.:

1. Bapak Presiden R.I.
2. Bapak Menteri Hankam.
3. Bapak Menteri Sosial.
4. Bapak Menteri Sekretaris Negara.
5. Bapak Menteri Dalam Negeri.
6. Bapak Menteri P.U.T.L.
7. Para Wakil Gubernur DKI.
8. Para Pimpinan DPRD DKI Jakarta.
9. Pangda TNI-AD V Jayakarta.
10. Pangkodau V.
11. Pangdaeral III.
12. Kadapol Metro Jaya.
13. Jaksa Tinggi DKI Jakarta.
14. Para Ketua Pengadilan Tinggi.
15. Sekwilda/Ass.Sekwilda.
16. Ketua BAPPEDA DKI.
17. Para Kep.Dirat/Biro/Inspektorat DKI.
18. Para Kep.Dinas/Kantor/Jawatan dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta.
19. Para Walikota DKI Jakarta.
20. Para Camat DKI Jakarta.
21. A r s i p.-

3. PEMBENTUKAN PROYEK PEMBANGUNAN PAVILLION PEMERINTAH DKI JAKARTA PADA PROYEK MINIATUR INDONESIA INDAH DI PASAR REBO

14-1-74

14/1 769

KEPUSATAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
No.D.IV-c.13/1/13/74
tentang
PEMBENTUKAN PROYEK PEMBANGUNAN "PAVILLION"
Pemerintah DKI Jakarta pada Proyek
MINIATUR INDONESIA INDAH DI PASAR REBO.

AGENDA No. 197/4/10/1/74
ANGGAL 24/1

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pembangunan "Pavillion" Pemerintah DKI Jakarta pada Proyek Miniatur Indonesia Indah di Ps. Rebo dipandang perlu untuk membentuk Proyek Pembangunan "Pavillion" dimaksud.

Mengingat : 1. Undang2 No.2 Pnpa Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
2. Undang2 No.10 Tahun 1964 tentang Penegasaan Jakarta sebagai Ibukota Negara R.I. ;
3. Undang2 No.18 Tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo. Undang2 No.6 Tahun 1969 (L.N. Tahun 1969 No. 37) ;
4. Keputusan Presiden R.I. No.22 Tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
5. Keputusan DPRD-GR DKI Jakarta No.9/P/DPRD-GR/67 tanggal 3 Mei 1967 tentang Rencana Induk (Master Plan) Jakarta 1965 - 1985 ;
6. Keputusan DPRD-GR DKI Jakarta No.9/P/DPRD-GR/69 tanggal 17 Maret 1969 tentang REPELITA DKI Jakarta 1969/1970 - 1973/1974.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Pembentukan Proyek Pembangunan "Pavillion" Pemerintah DKI Jakarta pada Proyek Miniatur Indonesia Indah, dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Pengawas : Ir. Prajogo (Pj.Wk.Gub/KDKI Bid.III).
Ir. Piek Muljadi (Ket.Harian BP-BPP DKI)
merangkap sebagai penanggung jawab pengisian.

2. Penanggung Jawab Umum :
Ketua : Ir. Harbowo (Pj.Kop.Dirat IV/Pemb).
Wk.Ketua : Ir.W.Pragantha (Staf Dirat IV/Pemb).

3. Penanggung Jawab Pelaksanaan :
Ketua : Ir. B.Satiarto (Staf Dirat IV/Pemb).
Sekretaris: Nazaruddin -
M.Kasjimir, BA -
Bendahara: Soritua Harahap (Kop.Dirat VI/Kuangan).
Bid.Arsitektur :
1. Ir. Imam Sunaryo (Staf Dirat IV/Pemb).
2. Ir. Dodo Yosida -
3. Ir. Adhiansid (Atelier - 6).
4. Ir. Imam Subagio (D.F.U.).

Bid. Konstruksi :

**4. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NO. D.IV-C.13/3/40/73 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PEMBANGUNAN
PROYEK MOH. HUSNI THAMRIN D.K.I. JAKARTA**

A F S I P
Biro Umum DKI Jkt.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

No. D.IV - C.13/3/40/73

Tentang:
PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PEMBANGUNAN
PROYEK MOH. HUSNI THAMRIN D.K.I. JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan proyek Moh. Husni Thamrin, selubungan dengan adanya bantuan dari Bank Dunia, diperlukan suatu Badan yang tetap, yang mengurus segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut ;

b. Bahwa adanya Badan dimaksud, merupakan salah satu prasyarat untuk dapat di realisasinya bantuan Bank Dunia tersebut ;

c. Bahwa guna mencapai maksud tersebut diatas, perlu menetapkan pembentukan dan struktur organisasi "Badan Pelaksana Pembangunan Proyek "Moh. Husni Thamrin DKI Jakarta".

Mengingat : 1. Undang2 No.1 Pps th.1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;

2. Undang2 No.10 th.1964 tentang Penegaraan Jakarta sebagai Ibukota Negara R.I. ;

3. Undang2 No.17 th.1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo. Undang2 No.6 th.1969 (L.N th.1969 No.37) ;

4. Peraturan Bangunan Jakarta 1919-1941 jo. Peraturan Daerah tgl.20 - Pebruari 1953 (JENP tgl.24 Nopember 1953 No.94 WISMAN No.61) ;

5. Keputusan Presiden R.I. No.22 th.1971 tentang Pembinaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;

6. Keputusan DPRD-GR-DKI-Jakarta No.9/P/DPRD-GR/1967 tgl.3 Mei 1967 tentang Rencana Induk (MASTER PLAN) Jakarta 1965 - 1985 (L.D. No.-38 th.1967) ;

7. Keputusan DPRD-GR-DKI-Jakarta No.9/P/DPRD-GR/1969 tgl.17 Maret 1969 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (PEPELITA) DKI Jakarta - 1969/1970 - 1973/1974 (L.D. th.1969 No.47) ;

8. Keputusan DPRD-DKI-Jakarta No.4/P/DPRD/72 tgl.23 Maret 1972 tentang Penetapan nama resmi bagi Proyek Perbaikan Perkampungan dalam wilayah DKI Jakarta dengan nama "PROYEK MOH. HUSNI THAMRIN".-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : I. Membentuk Badan pelaksana pembangunan proyek perbaikan perkampungan, yang lebih lanjut disebut "Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Moh. Husni Thamrin DKI Jakarta" (disingkat Bappan Proyek "M.H.Thamrin DKI Jakarta, shb. :

B a b - I.
Kedudukan dan Tugas Pokok.

Pasal - 1.

Bappan Proyek "M.H.Thamrin DKI Jakarta adalah aparatatur Pemerintah Daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada GUBERNUR KEPALA DAERAH.

Pasal - 2.

Tugas Pokok Bappan Proyek "M.H.Thamrin adalah shb. :

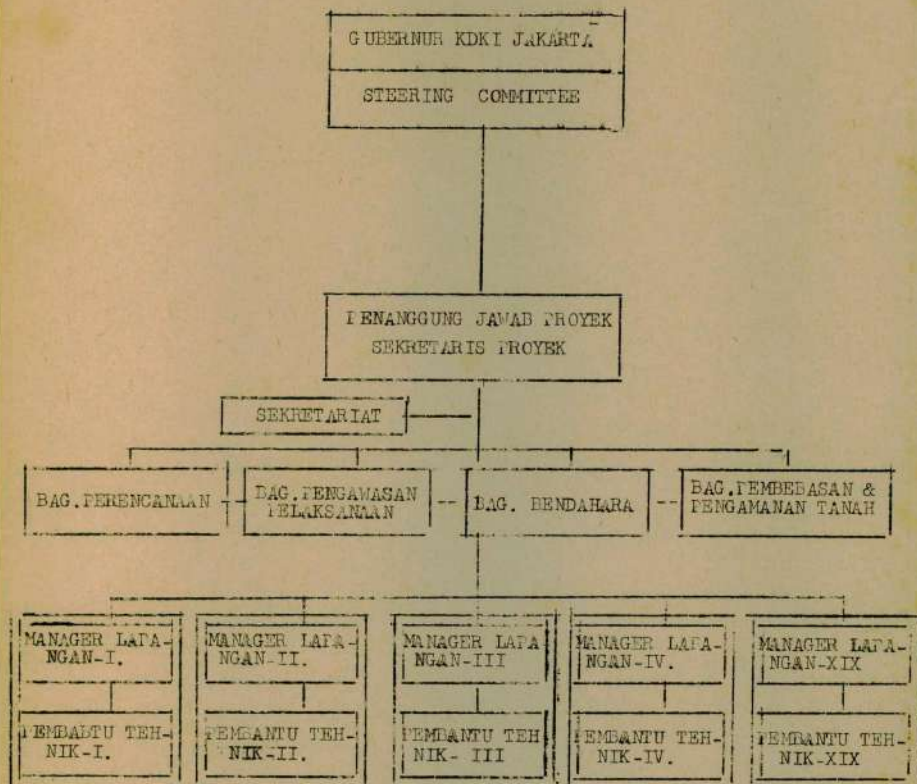
1) Menyiapkan perencanaan, menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan perbaikan, kebersihan serta keindahan kota Jakarta ;

2) Membina

Lampiran

KEPUTUSAN GUBERNUR KDKI JAKARTA No. D.KK-0.12/340733 10 5 1973

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PEMBANGUNAN
PROYEK MUHAMMAD HUSNI TELMIRIN DKI JAKARTA



Keterangan:

- = Garis Komando.
----- = Garis Konsultatif.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ALI SADIKIN.

LETNAN JENDRAL T.N.I. (KKo-AL).

5. INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NO. 319/Instr/k/BKD/1975 TERKAIT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN KAMPUS BARU UNIVERSITAS INDONESIA ATAS TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN SRENGSENSAWAH KEC. PASAR MINGGU

0927
24-3-75

- 1.711.52 419

(5)

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBU KOTA JAKARTA

I N S T R U K S I
No. 319/Instr/k/BKD/1975.

D a r i : GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA.
K e p a d a : 1. Wali Kota Jakarta Selatan.
2. Kepala Direktorat Agraria.
3. Kepala Dinas Tata Kota.
4. Kepala Dinas Pengawas Pembangunan Kota.

Dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Kampus Baru Universitas Indonesia, atas tanah terletak di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Pasar Minggu, Wilayah Kota Jakarta Selatan seluas ± 75 (tujuh puluh lima) hektare, sebagaimana Peta Situasi diberi garis keliling warna kuning, maka dengan ini diinstruksikan kepada Saudara untuk :

1. Mencegah adanya pemindahan dan/atau peralihan hak atas tanah/ bangunan, pembangunan baru, perubahan dan/atau penambahan bangunan serta penambahan penduduk ;
2. Kepada Direktorat Agraria DKI Jakarta diminta untuk mengadakan inventarisasi dan pengukuran atas tanah, bangunan serta benda2 lainnya yang ada di atasnya untuk pelaksanaan pembebasan dan pengosongan areal tanah tsb. ;
3. Mengadakan penaksiran, pembayaran serta pengamanan atas areal tanah tsb. yang sifatnya akan menyulitkan isi instruksi ini ;
4. Pelaksanaan Instruksi ini harus sudah selesai selambat-lambatnya akhir bulan April 1975 dan melaporkan secara periodik ;

Demikian agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 28 Februari 1975

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBU KOTA JAKARTA

Ali Sadikin
ALI SADIKIN
Letnan Jenderal TNI (KKO-AL).-

TEMBUSAN : Instruksi ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri.
2. Bapak Menteri Keuangan.
3. Bapak Menteri EKUII.
4. Bapak Menteri Sekretaris Negara.
5. Bapak Ketua BAPPENAS.
6. Pembantu Rektor Bidang Administrasi & Keuangan Universitas Indonesia.
7. Bapak Direktorat Jenderal Agraria.
8. Pj. Wakil Gubernur DKI Bidang Pembangunan.
9. Kepala Direktorat IV dan V.
10. Para Maspida Wilayah Jakarta Selatan.
11. ----- A r s i p -----

6. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
CHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. Da. 1/3/70
PEMBANGUNAN JAYA ANTJOL CIRCUIT DJAKARTA

12

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA

No. : Da. 1/3/70.
tentang
PEMBANGUNAN JAYA ANTJOL CIRCUIT DJAKARTA.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA ;

Menimbang : 1. Bahwa dianggap perlu melengkapi fasilitas kota Djakarta sebagai Ibukota Negara dan Kota Metropolitan dengan suatu Circuit untuk balap Sepeda Motor dan Mobil, yang disamping berfungsi sebagai arena Olah Raga, juga berfungsi sebagai arena promosi kepariwisataan dan Industri Motor/Mobil;

2. Bahwa daerah Proyek Antjol, dianggap cukup memenuhi syarat untuk pembangunan Circuit tersebut ;

3. Bahwa untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan Circuit dimaksud dan penggunaannya, perlu dibentuk/ditunjuk suatu badan pelaksanaannya ;

Mengingat : 1. Undang2 No. 18 Tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 Tahun 1969;

2. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. Undang2 No. 5 Tahun 1969 ;

3. Undang2 No. 10 Tahun 1961 ;

4. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1969 tentang peruntukan dan penggunaan Tanah Antjol tertanggal 23 Desember 1960 ;

5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta No. DC.7/1/6/1967 tgl. 20 Februari 1967.

Mendengar : Saran/pertimbangan dari Ketua Otorita Pembangunan Proyek Antjol; Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Antjol/P.T. Pembangunan Jaya; Ikatan Motor Indonesia (IMI); Ikatan Penggemar Motor Djakarta (I.P.M.D.) dan Persatuan Olah Raga Sepeda Motor Djakarta (Pesidja) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Daerah Proyek Antjol sebagai tempat pembangunan Circuit "JAYA ANTJOL CIRCUIT DJAKARTA" sebagai mana dipertelakan dalam Gambar situasi terlampir. yang disimpan di Sekretariat Pemerintah DKI. Djakarta.

II. Menunjuk Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Antjol/P.T. Pembangunan Ibukota Djakarta Raya sebagai Badan Pelaksana tunggal untuk mengatur penyelenggaraan dan penggunaan Circuit tersebut, pembangunan mana harus sudah selesai dalam tahun 1971.

III. Membentuk Team Asistensi Pembangunan Jaya Antjol Circuit Djakarta dengan susunan keanggotaan dan tugas sbb.:

4. Susunan keanggotaan Team sbb. adalah sbb.:

1. Ir. Prajogo - selaku Ketua merangkap Anggota

2. Mgs.N.Asaari - selaku Wakil Ketua I.
(Ketua IMI)

3. Let.Kol.L.D.Dwinanto- selaku Wk.Ketua II merangkap anggota.

4. Ir.Piek

4. Ir. Piek Moeljadi - selaku Anggota.
5. Ir. Bun Yamin Ranto - selaku Anggota.
6. Aribasjah S.H. - selaku Anggota.
7. Ir. Rio Tambunan - selaku Anggota.
8. Drs. Tjuk Soegiarto - selaku Anggota.
9. Ir. Ojek Soenarjo - selaku Anggota.
10. Mochtar Latiep - selaku Anggota.
(Ketua Pesidja).
11. Hardjodisastro - selaku Anggota.
(Ketua I.P.M.D.)
12. A.K.B.P. Drs. Tony SK - selaku Anggota.

B. Tugas Team tsb. diatas adalah :

1. Membantu Badan Pelaksana Pembangunan Projek Antjol/P.T. Pembangunan Jaya dalam penjielenggaraan pembangunan listrik, pengumpulan dana Pembangunan Circuit dan penggunaan Circuit.
2. Bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

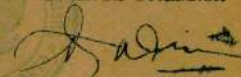
IV. Hal2 jang belum diatur atau belum tjukup diatur dalam surat Keputusan ini akan diatur kemudian.

V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a .

Pada tanggal : 19 Djanuari 1970.-

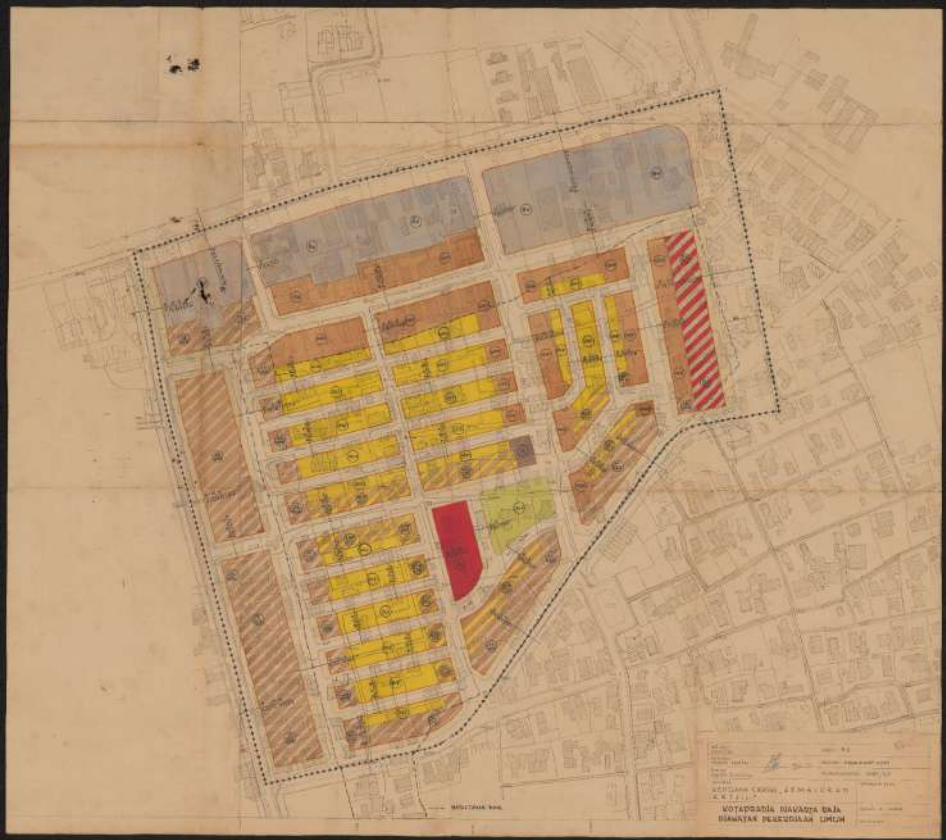
GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBUKOTA DJAKARTA


(ALI SADIKIN)
Major Djenderal KKO.

SALINAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada: Jth.

1. Menteri Dalam Negeri.
 2. Menteri P.&P.
 3. Menteri Perhubungan.
 4. Pangdam V/Djaya.
 5. Pangdak VII/Djaya.
 6. Pangdamar III.
 7. Para Wk. Kepala Daerah.
 8. Para Pimpinan Dewan.
 9. Anggota B.P.H.
 10. S e k d a .
 11. Pimpinan Harian B.P.F.
 12. Kep. Direktorat III, IV.
 13. Kep. Biro II dan V.
 14. Walikota Djakarta Utara.
 15. Pimpinan Projek Antjol/P.T. Pembangunan Jaya.
 16. Jang bersangkutan untuk diketahui/dilaksanakan.
-

PETA KEMAJORAN KETJIL



BLUEPRINT GARIS SEMPADAN BANGUNAN DI KRAMAT LONTAR I

